

PERPUSTAKAAN PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA
Jalan Daksinapati Barat IV
Jakarta 13220, Telepon 4896558, 4706287, 4706288

DAFTAR ISI

BAHASA

BAHASA INDONESIA-KOSAKATA DAN ISTILAH

Kamus Politik	1
Kamus Politik	2
Kamus Politik	2
Kamus Politik	3
Kamus Politik	4
Kamus Politik	4
Kamus Politik	5
Kamus Politik	5
Kamus Politik	6
Kamus Politik	6
Kamus Politik	7
Kamus Politik	7
Kamus Politik	8
Kamus Politik	8
Kamus Politik	9
Kamus Politik	9
Kamus Politik	10
Kamus Politik	10
Kamus Politik	11
Kamus Politik	11
Kamus Politik	12
Kamus Politik	12
Kamus Politik	13
Kamus Politik	13
Kamus Politik	14
Kamus Ekonomi	14
Kamus Politik	15
Kamus Ekonomi	15
Kamus Ekonomi	16
Kamus Ekonomi	16
Kamus Ekonomi	17
Kamus Ekonomi	17
Kamus Ekonomi	17

II

Kamus Ekonomi	18
Kamus Ekonomi	18
Kamus Ekonomi	19
Kamus Ekonomi	19
Kamus Ekonomi	19
Kamus Ekonomi	20
Kamus Ekonomi	20
Kamus Ekonomi	20
Kamus Ekonomi	21
Kamus Ekonomi	21
Kamus Ekonomi	21
Glosarium Ekbis 'KR'	22
Glosarium Ekbis 'KR'	22
Glosarium Ekbis 'KR'	22
Kosakata Hari ini	23
Kosakata hari ini	23
Kosakata Hari ini	23
Kosakata Hari ini	24
Kosakata Hari ini	24
Kosakata Hari ini	24
Kosakata Hari ini	25
Ensiklopedi Sunda Diluncurkan	25
Ulasan Bahasa: Istilah 'Ombudsman' Impeachment', dan lainnya	26
 BAHASA INDONESIA-ULASAN	
Nomina Turunan	27
Patriarki, Kyriarki, dan Istilah Lain	29
Pusat Bahasa Sebaiknya Jadi Lembaga Independen	31
Menyoal Kata Berafiks PeN- dan Pe-	33
Presiden Ber- "Saya" atau Ber- "Kami"?	35
Ikhwal Kata-kata Fatis	36
Yahya A Muhaimin: Bahasa Menunjukkan Peradaban	38
Mutu Daya Ungkap Bahasa Indonesia Masih Harus Ditingkatkan	39
Tinggal Bahasa Indonesia yang Tersisa Sebagai Perekat Bangsa	41

III

Mendiknas Prihatinkan Kosakata Asing	43
Upaya Mengangkat Harkat Bahasa Indonesia Masih Bukan Pekerjaan Mudah	45
Bahasa Dapat Persatukan Bangsa	46
Kembangkan Bahasa Indonesia dengan Teknologi Informasi	48
BAHASA DAERAH-PELAJARAN	
Bahasa Daerah Berpeluang Jadi Bahasa Pengantar di Sekolah	49
Bahasa Daerah Mungkin Sampai Kelas Tiga	50
BAHASA SUNDA -ENSIKLOPEDI	
Sisi Lain Peluncuran Ensiklopedi Bahasa Sunda	51
BAHASA INGGRIS-ULASAN	
Bahasa Inggris buat SDM Tersisih	53
SASTRA	
CERPEN-ULASAN	
Cerpen Punya Martabat Sastra	55
Eksistensi Cerpen Tergantung Koran	56
Kongres Cerpen di Pantai Parangtritis	57
Kongres Cerpen Indonesia: Lakukan Pemetaan Karya Fiksi	58
Belajar dari Gorki	59
MENGARANG-ULASAN	
Soal Pengajaran Mengarang	61
Murid Menyambut Positif Kehadiran Pelajaran Mengarang	63
Pelajaran Mengarang Tumbuhkan Rasa Percaya Diri Anak	65
SASTRA INDONESIA-PENGAJARAN	
Sistem Pengajaran Sastra Perlu Diubah	66
SASTRA INDONESIA-ULASAN	
Apresiasi: Imaji-imaji Surealistik Tjahyono Widarmanto	67
Romantisme dalam Kesahajaan	69
Sastrawan Perlu Tradisi Perenungan	70
Sastrawan Harus Berani Tentukan Pilihan	71
Sastrawan Harus Mampu Membongkar Ketidakadilan	72

IV

Editing Karya Sastra Masih Lemah	73
Dari Perkampungan Penulis Rantau Melayu III	75
Titis Basino Terbitkan Novel Baru	77
PUISI INDONESIA-ULASAN	
Harus Ada Kritik Sastra untuk Karya Puisi	78
Puisi Indonesia Masih Bergairah	80
Siapa Bilang Puisi Mati?	81
Sutardji Calsaum Bachri	82
Sutardji CB	83
'Penyair tak Boleh Berhenti pada Puisi	84
Puisi dari Bali	86
SASTRA LAMA-ULSAN	
Bagonjong Wujud Absitektur dari Karya Sastra	94
SASTRA RIAU-ULASAN	
Riau Lupa Sejarahnya	97
KEBUDAYAAN-ULASAN	
Kebudayaan yang Dieksploitasi	99
Kebudayaan Sebaiknya yang Diinstitusikan	101
Pemerintah 'Merusak' Kebudayaan Daerah	103
Tiga Pandangan Sempit tentang Kebudayaan	105
Ngurah Bagus, Dampak Studi Kebudayaan Bali	107
Seminar Internasional II Ramayana dan Mahabharata	109
Gelar Wacana Kebudayaan dan Pariwisata Hasilkan Pokok Pikiran	111

BAHASA INDONESIA-KOSAKATA DAN ISTILAH

KAMUS POLITIK

Didrop. Didrop sama dengan dipasok, dikirim, diberikan untuk mendapatkan sesuatu. Sesuatu tersebut bisa berupa hal yang memang sebelumnya diinginkan, bisa juga tidak diinginkan. Didrop bisa pula dipahami sebagai sesuatu yang diturunkan, diperosotkan atau malah bisa dijatuhkan. Contoh kalimat yang menggunakan kata didrop misalnya, ratusan telur busuk sudah didrop untuk menyambut persidangan Soeharto. Dalam konteks politik, kata didrop juga sering muncul atau digunakan misalnya untuk menunjukkan adanya kader atau figur titipan yang ditempatkan di posisi tertentu. Penempatan figur atau kader tersebut biasanya menimbulkan kontroversi, namun karena didrop dari "atas" maka sulit untuk ditolak. Pada masa Orde Baru sering sekali muncul tokoh yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi ketua umum partai. Penunjukan tersebut sama artinya dengan didrop.

Ngegosip. Ngegosip adalah tindakan atau perbuatan yang punya konotasi iseng atau main-main sehingga sukar dipertanggungjawabkan. Ngegosip berarti mengembangkan isu, menyebarkan atau menggumungkan desas-desus yang belum tentu faktual atau signifikan. Namun ada yang menganggap ngegosip adalah bagian dari perang urat syaraf (*psy war*) atau propaganda yang bisa melemahkan mental atau moral lawan. Bahkan di dalam praktik politik ngegosip sering sekali digunakan, sebagai bagian dari manuver atau bahkan teror mental. Seseorang yang dalam posisi digosipkan biasanya sering menjadi pihak yang merasa dirugikan.

Rakyat Merdeka, 2 September 2000

KAMUS POLITIK

Badut Politik. Istilah badut politik sering digunakan untuk menunjukkan perilaku politisi yang dianggap menipu rakyat, karena hanya mengutamakan kepentingan golongan sendiri. Badut politik biasanya sering menjual nama rakyat dan mengaku-ngaku berpolitik untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Ada yang menganggap para politisi saat ini cenderung bersikap seperti badut politik, karena konflik yang mereka munculkan ternyata lebih bernuansa kepentingan mereka sendiri, ketimbang kepentingan rakyat dan bangsa.

Koit. Koit berasal dari bahasa Betawi, artinya sama dengan mati, tewas atau meninggal dunia. Kata koit sering digunakan dalam pergaulan sehari-hari, dan dianggap memiliki konotasi humor atau jenaka. Dalam konteks pemberitaan, kata koit muncul berkaitan dengan berita tidak hadirnya Soeharto ke pengadilan. Ketidakhadirannya itu ditanggapi oleh Wakil Ketua DPR AM Fatwa dengan mengatakan Soeharto harus diadili sebelum koit.

Rakyat Merdeka, 2 September 2000

KAMUS POLITIK

Sumpah Pocong. Hingga kini belum ada landasan hukum formal yang memuat aturan secara jelas mengenai pelaksanaan sumpah pocong. Ada yang menganggap dasar pelaksanaan sumpah pocong lebih berkaitan dengan tradisi atau kepercayaan masyarakat lokal. Sumpah pocong memang tidak berlaku secara universal, karena itu hanya masyarakat di beberapa daerah tertentu saja yang meyakini efektifitas atau kemampuan hukum sumpah pocong. Syahdan, seseorang yang mengingkari kesalahan yang pernah diperbuat kalau terkena sumpah pocong sekejur tubuhnya bisa membusuk atau terkelupas seperti mayat. Karena itu hukuman berupa sumpah pocong sangat ditakuti. Disamping sangat keramat, sumpah pocong tidak boleh dibuat main-main lantaran tulahnya begitu kuat. Contoh berita yang berkaitan dengan sumpah pocong yakni berkaitan dengan usulan supaya Aryanti melakukan sumpah pocong. Pocong adalah bagian "pakaran" yang dikenakan pada mayat, ikatan kain kafan pada ujung kepala mayat disebut sebagai pocong.

Eling. Presiden Gus Dur dan para elit politik hendaknya eling. Begitu imbauan sekaligus harapan rakyat. Sikap eling dianggap penting dan perlu dilakukan supaya bangsa ini tidak tergelincir lebih dalam ke jurang kehancuran. Kata eling sebenarnya melekat pada kalimat: eling lan waspada, yang berarti sadar dan waspadalah. Eling memang berarti sadar, selalu ingat. Sadar atau ingat ditujukan kepada Yang Maha Kuasa. Ada anggapan pemimpin yang tidak eling maka akan bersifat deksura, sok kuasa atau seenak gue. Pemimpin yang demikian tentu tidak dimaui oleh rakyat.

Rakyat Merdeka, 4 September 2000

KAMUS POLITIK

Hukum Diludahi. Hukum diludahi adalah ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan kekecewaan rakyat, karena pemerintah ternyata tidak bersikap serius dalam menegakkan supremasi hukum. Dulu, pada masa awal reformasi banyak kelompok reformis menyatakan bahwa hukum harus ditegakan, namun ketika mereka masuk dalam lingkaran kekuasaan ternyata hukum termasuk salah satu bidang yang tidak mereka urus, terkesan mereka sepelekan dan bahkan mereka ludahi. Memang, sangat sukar meraba jalan pikiran mereka yang pernah menyebut diri atau disebut sebagai reformis. Bagaimana sebenarnya kini mereka menyikapi masalah penegakan supremasi hukum. Jangan-jangan hukum mereka anggap cuma sebagai sampah. Salah satu bukti bahwa hukum sudah diludahi yaitu pengadilan sandiwara atas diri Soeharto, yang tanpa juntrungan dan sekadar beralasan sakit, tidak hadir dalam persidangan. Banyak lagi kasus hukum lainnya yang mengecewakan hatinurani rakyat dan profesionalisme hukum sendiri, misalnya penuntasan berbagai kasus KKN yang dilakukan para kroni Orde Baru dan terus merajalelanya konglomerat hitam.

Kepeleset. Kepeleset atau terpeleset, sama dengan terpelanting. Semuanya menyebabkan jatuh. Orang yang kepeleset, terpeleset atau terpelanting berarti terjatuh. Orang menjadi kepeleset atau terpeleset biasanya karena melewati jalanan licin, atau bisa juga karena terhalir kemudian terpeleset. Jadi, sebenarnya banyak hal yang menyebabkan seseorang bisa kepeleset, terpeleset atau terpelanting. Dalam konteks politik, kekuasaan Soeharto kepeleset atau jatuh lantaran berbagai kasus pelanggaran HAM, kasus KKN dan pembungkaman hak-hak politik rakyat serta dominasi militerisme yang begitu kuat. Belakangan ini ada warning, agar pemerintahan Presiden Gus Dur berhati-hati supaya tidak kepeleset gara-gara harga BBM yang menurut rencana bakal naik bulan Oktober mendatang.

Rakyat Merdeka, 3 September 2000

KAMUS POLITIK

Kongkalikong. Kongkalikong adalah persekutuan gelap untuk menjatuhkan lawan. Kongkalikong juga bisa diartikan sebagai kerjasama rahasia atau persekongkolan. Kongkalikong bersifat tahu sama tahu, karena biasanya pihak yang tidak terlibat dalam kongkalikong cenderung ditinggalkan. Kongkalikong memang terkesan berkonotasi negatif, namun dalam pergaulan sehari-hari kata kongkalikong seringkali muncul karena bernuansa humor. Tidak diketahui secara pasti berasal dari bahasa apa kata kongkalikong. Tapi ada yang menduga kongkalikong berasal dari bahasa Cina. Contoh berita yang menggunakan kata kongkalikong misalnya DPR diajak kongkalikong oleh pemerintah untuk menaikkan tarif BBM.

Beking. Beking sering diartikan sebagai tukang pukul, *body guard* atau kaki tangan bos atau orang yang berkuasa. Pada masa Orde Baru main beking-beking dianggap sebagai hal lumrah karena lekatnya budaya militeristik yang sangat kuat. Beking sebenarnya berasal dari bahasa Inggris *backing*, artinya adalah sesuatu yang berada di belakang atau yang melatari. Dalam perkembangannya kemudian kata *backing* diadaptasi menjadi beking. Dalam konteks politik beking membeking adalah hal biasa, misalnya politisi X dibeking orang kuat dari pemerintahan, atau bandar judi X dibeking oknum aparat keamanan.

Rakyat Merdeka, 5 September 2000

KAMUS POLITIK

Aryantigate. Aryantigate sebagaimana Buloggate atau Bruneigate sebenarnya merupakan istilah contekan dari istilah Watergate. Watergate adalah skandal politik yang melibatkan Presiden AS Richard Nixon. Dimana dalam skandal tersebut Nixon melakukan penyadapan jaringan komunikasi lawan-lawan politiknya. Berita mengenai Watergate pertamakali diungkap oleh surat kabar *Washington Post* melalui reportase investigasi. Sedangkan Aryantigate berkaitan dengan beredarnya foto intim Aryanti, sebagaimana diberitakan majalah *Gatra* dan *Pana Masyarakat*. Foto tersebut dianggap menghebohkan dan menjadi perhatian kalangan pers. Aryanti adalah sosok biasa. Dia seorang ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak dikenal secara luas oleh masyarakat. Dengan beredarnya foto intim tersebut, nama Aryanti menjadi terkenal, saking terkenal itu kemudian muncul istilah Aryantigate.

Mejeng. Mejeng adalah istilah anak baru gede (ABG). Tapi belum diketahui secara jelas berasal dari manakah kata mejeng tersebut. Ada yang mengatakan mejeng berasal dari bahasa gaul. Bahasa gaul maksudnya adalah bahasa pergaulan kalangan anak-anak remaja yang masuk dalam kategori ABG. Ada pula yang bilang mejeng berasal dari kata preman alias prokem alias *tree man*. Sampai hari ini belum ada penelitian serius untuk menyepakati arti kata mejeng. Namun dalam pergaulan sehari-hari mejeng diartikan sebagai nampang atau menampilkan diri untuk mencari-cari perhatian orang lain. Karena itu mejeng dianggap berkaitan dengan pencarian identitas diri, sebagaimana sering terjadi pada diri anak-anak baru gede. Dalam konteks politik kata mejeng juga bisa digunakan, misalnya untuk memperkenalkan calon politisi yang ingin diorbitkan ke posisi tertentu.

Rakyat Merdeka, 6 September 2000

KAMUS POLITIK

Kecele. Ada yang menyebut kecele berasal dari bahasa Betawi. Artinya sama dengan kecewa atau dipermainkan. Orang yang dipermainkan bisa juga disebut kecele. Kecele bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Orang yang terlalu bernafsu atau berambisi konon akan mudah sekali merasa kecele.

Bangsa Biadab. Berkaitan dengan maraknya kerusuhan berdarah yang terjadi di tanah air akhir-akhir ini, dimana penuntasannya tidak kunjung selesai dan merupakan tanggungjawab pemerintah, maka muncul anggapan pemerintah tidak mampu memberikan jaminan keamanan kepada warga negaranya sendiri. Di sisi lain menyusul pula peristiwa pembunuhan di Atambua, NTT, yang menewaskan tiga staf Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR). Peristiwa ini mengundang kutukan dari berbagai kalangan, sekaligus mengundang anggapan dari sementara kalangan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa biadab. Ungkapan lain yang setara dengan ungkapan bangsa biadab, antara lain adalah bangsa barbar. Artinya kurang lebih sama, yakni tidak mempunyai adab atau peradaban sebagaimana lazimnya sebuah bangsa.

Rakyat Merdeka, 9 September 2000

KAMUS POLITIK

Kere. Kere berasal dari bahasa Jawa yang diartikan sebagai miskin atau orang yang tidak mampu secara ekonomi. Orang miskin atau kere biasanya sering dianggap sebagai pihak yang tidak berdaya. Seseorang atau pihak yang dianggap kere dalam strata masyarakat biasanya didudukkan di dalam status yang rendah atau cenderung direndahkan. Orang kere berarti orang miskin, orang yang tidak mampu. Dalam konteks berita misalnya ada imbauan, karena negara sedang kere, maka dipertanyakan apa urgensinya pemerintah membeli pesawat terbang jenis Boeing 737-800.

Nyicil. Nyicil adalah asal kata dari menyicil atau mengangsur. Kata menyicil biasanya digunakan untuk menyebut tindakan seseorang atau pihak tertentu dalam melunasi utang-piutang. Biasanya perbuatan nyicil-menyicil kurang disukai pihak yang memberikan utang, karena mengandung ketidakpastian. Apalagi kalau tindakan nyicil-menyicil tersebut tidak didasarkan pada surat perjanjian hitam di atas putih. Dalam urusan pemberitaan, kata nyicil misalnya digunakan berhubungan dengan rencana pemerintah RI menyicil pembelian pesawat terbang Boeing 737-900.

Rakyat Merdeka, 7 September 2000

KAMUS POLITIK

Pesawat Boeing 737-800. Hari-hari belakangan ini terbetik kabar bahwa pemerintah berniat membeli pesawat terbang jenis Boeing 737-800 dari pemerintah Amerika Serikat. Kabarnya pesawat tersebut kalau memang jadi dibeli akan digunakan sebagai pesawat kepresidenan atau bisa juga disebut akan dijadikan semacam air force one. Hampir semua negara maju di dunia memiliki air force one. Biasanya pesawat jenis ini selain menjadi kebanggaan negara yang memilikinya juga dianggap mencerminkan tingkat teknologi kedingintaraan. Air force one biasanya pula memiliki keistimewaan yang bersifat privacy. Sebut saja, melalui pesawat air force one seorang presiden bisa melakukan teleconference jarak jauh, memiliki fasilitas telepon yang bisa mengakses berbagai nomor telepon di berbagai negara, bahkan ada juga pesawat air force one yang tidak bisa dideteksi radar militer. Terlepas dari hal ini, rencana pemerintah RI membeli pesawat Boeing 737-800 seharga 50-60 juta dolar AS ternyata menimbulkan sikap pro dan kontra yang sangat tajam.

Dansa-dansi. Dansa-dansi dalam aktivitas politik sebenarnya adalah hal biasa, karena sering dianggap sebagai selingan bahkan dianggap sebagai bagian dari lobi. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno kegiatan dansa-dansi sangat populer dan sering dilakukan di istana. Saking populernya tradisi dansa-dansi, Presiden Soekarno dikenal sangat gemar pada tarian atau dansa lenso. Ini bisa dimaklumi karena Soekarno adalah pecinta seni. Dalam konteks kekinian kegiatan dansa-dansi juga masih muncul sebagai selingan atau lobi, misalnya Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Purnomo Yusgiantoro melakukan kegiatan dansa-dansi dengan sejumlah anggota Komisi VIII DPR berkaitan dengan rencana kenaikan tarif BBM. Meskipun akhirnya ada bantahan bahwa kegiatan tersebut bukan dansa-dansi melainkan hanya acara perkenalan biasa.

Rakyat Merdeka, 8 September 2000

KAMUS POLITIK

Dimonitor. Dimonitor sama dengan diawasi, dipantau atau terus menerus dalam kontrol. Sesuatu yang dirasakan perlu untuk dimonitor biasanya menyangkut ihwal penting atau urgent. Bisa juga karena ihwal tersebut dalam keadaan gawat, kritis atau darurat. Misalnya penyakit yang diidap oleh X terus menerus dimonitor oleh tim medis, atau kesehatan Soeharto seharusnya dimonitor oleh para jaksa penuntut umum. Memonitor juga bisa merupakan bagian dari aktivitas politik, misalnya seorang ketua umum partai memonitor kebijakan partainya, atau seorang pemimpin memonitor kinerja bawahannya. Dalam kaitan pemberitaan, penggunaan kata dimonitor misalnya para menteri yang baru dilantik merasa ketakutan karena ada rencana keuangan mereka dimonitor.

Kado. Kado adalah hadiah atau bingkisan atau persembahan yang diberikan kepada seseorang. Disebut sebagai kado karena hadiah, bingkisan atau persembahan tersebut dibungkus di dalam kertas yang secara umum dikenal sebagai kertas kado. Pada umumnya sesuatu yang dibungkus di dalam kertas kado disebut sebagai kado. Dalam konteks politik, penggunaan kata kado misalnya Presiden Gus Dur akan diberikan kado berupa RUU Kepresidenan.

Rakyat Merdeka, 10 September 2000

KAMUS POLITIK

Insiden Atambua. Atambua adalah nama sebuah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada pasca kemerdekaan Timor Timur yang kini memisahkan diri dari wilayah kesatuan RI, Atambua dijadikan daerah pengungsian oleh sebagian warga Timor Timur pro integrasi, termasuk para milisi pro integrasi. Karena merupakan basis pengungsian, badan pengungsi dunia yang bernaung di bawah PBB yakni *UNHCR* melakukan misi kemanusiaan disana. Namun pada tanggal 6-7 September 2000 terjadi peristiwa berdarah di Atambua, dimana kahtor *UNCHR* dirusak dan tiga stafnya tewas terbakar. Diduga pelakunya adalah para milisi. Insiden ini mengundang reaksi keras kalangan internasional, salah satu reaksi tersebut diperlihatkan para pemimpin negara yang menghadiri KTT Milenium di New York, Amerika Serikat.

Daftar Kekayaan Menteri. Ada penilaian bahwa pemerintahan Presiden Gus Dur tidak serius membasmu praktik KKN lama maupun baru, karena itu muncul desakan dari sejumlah kalangan, terutama kalangan LSM agar daftar kekayaan para menteri diperiksa sekaligus diumumkan secara terbuka kepada publik. Sayangnya tuntutan atau desakan ini masih disikapi secara dingin oleh pemerintahan Presiden Gus Dur. Padahal pemeriksaan daftar kekayaan para menteri dianggap penting dan perlu sebagai salah satu upaya untuk memonitor kemungkinan keterlibatan para menteri dalam praktik KKN. Para menteri dalam kabinet pemerintahan Gus Dur yang bersedia diperiksa daftar kekayaannya baru Menteri Pertahanan Mahfud MD dan Menteri Tenaga Kerja Alhailal Hamdi. Lainnya mungkin masih pikir-pikir.

Rakyat Merdeka, 11 September 2000

KAMUS POLITIK

Plesiran. Plesiran berarti pergi mencari hiburan, berpakansi, berekreasi atau bisa juga berpiknik ke suatu tempat untuk menghibur diri. Orang yang melakukan plesiran bisa diartikan melakukan perjalanan, misalnya pergi ke luar kota atau ke luar negeri. Aktivitas ini bisa disebut sebagai plesiran. Tujuan orang melakukan plesiran biasanya untuk melepaskan berbagai problema yang dianggap membebani. Kalau orang tersebut melakukan plesiran ditengah banyaknya persoalan, maka bisa-bisa orang tersebut dianggap melarikan diri dari tanggungjawab. Misalnya seperti rencana BP MPR membawa 90 anggota MPR untuk melakukan plesiran (baca: perjalanan dinas) ke luar negeri sehubungan dengan upaya mensosialisasikan hasil Sidang Tahunan MPR Agustus lalu. Rencana ini mengundang reaksi keras berbagai kalangan, karena situasi dan kondisi perekonomian di dalam negeri dalam keadaan kritis.

Berbelasungkawa. Berbelasungkawa artinya sama dengan berduka cita, atau turut menyatakan duka cita atas sesuatu musibah yang menimpa seseorang atau pihak tertentu. Tindakan turut berbelasungkawa merupakan perbuatan simpatik, karena orang atau pihak yang terkena musibah bisa menjadi terhibur atau merasa diperhatikan. Dalam konteks pemberitaan, kata berbelasungkawa misalnya hingga hari ini belum ada satu pun pejabat atau elit politik yang menyatakan turut berbelasungkawa atas korban-korban yang tewas maupun cidera akibat peledakan bom di Gedung BEJ Jakarta, Rabu (13/9/2000) sore lalu.

Rakyat Merdeka, 16 September 2000

KAMUS POLITIK

Nol Besar. Nol besar adalah ungkapan yang dipakai untuk menunjukkan ketidakberhasilan orang, kelompok atau pihak dalam menghadapi atau menyelesaikan sesuatu persoalan atau masalah. Biasanya persoalan atau masalah tersebut sangat dinanti-nantikan untuk diselesaikan oleh banyak pihak. Nol besar juga bisa dianggap sebagai nilai atau angka untuk seorang murid yang tidak mampu menyelesaikan materi pelajaran di sekolah. Murid yang memperoleh nilai nol besar umumnya dianggap bodoh atau tertinggal dibandingkan murid lainnya. Seseorang atau pihak yang dianggap hanya bisa menghasilkan nilai nol besar biasanya dalam posisi tercemoooh. Salah satu ungkapan kekecewaan yang menggunakan kata nol besar, misalnya terdapat pada judul berita *Rakyat Merdeka*, yakni: polisi nol besar. Ini berkaitan dengan belum ditemukannya pelaku sejumlah peledakan bom di sejumlah daerah oleh Polri.

Lelet. Lelet sama dengan lambat atau lamban atau tidak gesit. Sesuatu yang lambat, lelet dan tidak gesit biasanya mengandung risiko. Misalnya risiko ditinggal atau sulit mencapai target. Banyak hal yang menyebabkan seseorang atau pihak tertentu menjadi lelet, misalnya karena tidak menguasai informasi atau tidak memiliki keberanian menempuh risiko atas tugas yang diembannya. Sikap lelet biasanya mengundang cemoohan, apalagi jika sikap lelet itu melekat pada aparat negara yang bertugas melayani masyarakat, misalnya aparat kepolisian. Dalam hal ini sikap Polri dalam mengungkap pelaku sejumlah peristiwa pengeboman dianggap lelet. Karena masyarakat kian hari kian khawatir terhadap aksi teror berupa pengeboman tersebut.

Rakyat Merdeka, 17 September 2000

KAMUS POLITIK

CAKAR-CAKARAN. Perseteruan antarkelompok atau pemimpin elit politik kerap kali disebut cakar-cakaran. Biasanya akibat cakar-cakaran antarelit politik, yang jadi korban rakyat kecil. Tidak jarang untuk hal-hal yang sepele, para elit politik rela cakar-cakaran. Contoh, akibat cakar-cakaran antarelit yang paling memprihatinkan adalah kasus Aceh, Maluku dan Poso.

RAKYAT DIINJEK. Kata diinjek (asalny diinjak) di sini maksudnya ditelantarkan atau dipinggirkan. Bahkan, lebih ekstrim lagi, diinjek bisa berarti dianiaya. Pemerintah yang otoriter biasanya kerjanya menginjek-injek rakyat. Dan, kalau terus diinjek, tentu rakyat bisa bangkit melawan penguasa.

Rakyat Merdeka, 21 September 2000

KAMUS POLITIK

Gregetan. *Gregetan* sama dengan gemas. *Gregetan* berasal dari kata *greget*, yang artinya kira-kira sama dengan bersemangat. *Greget* memang menunjukkan vitalitas dan semangat. Dalam aktivitas sehari-hari kata *greget* sering dipergunakan misalnya dalam bidang olahraga atau berkesenian. Jika seorang atlet loyo atau kurang bergairah dalam bertanding misalnya ia bisa dikatakan sebagai kurang *greget*. Tapi sikap *greget* yang berlebihan juga bisa mengundang keheranan bahkan aneh. Dalam konteks pemberitaan misalnya cendekiawan muslim Cak Nur (Nurcholish Madjid) menilai bahwa TNI bisa bersikap *gregetan* lantaran terjadi pencopotan terhadap Wakil Panglima TNI.

Hukum Gulung Tikar. Gulung tikar adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan terjadinya kebangkrutan yang dialami seseorang atau pihak tertentu. Sebuah perusahaan yang gulung tikar berarti perusahaan tersebut bangkrut atau tidak lagi bisa menjalankan operasional perusahaan. Istilah gulung tikar sangat fleksibel, karena itu bisa digunakan oleh dan untuk semua aktivitas. Misalnya, republik ini bisa gulung tikar kalau para elit politik terus menerus berseteru, atau dalam konteks pemberitaan misalnya kalau Bob Hasan bebas, maka sama dengan hukum gulung tikar.

Rakyat Merdeka, 23 September 2000

KAMUS POLITIK

PANIK. Kata Panik bisa diartikan gugup, tergesa-gesa atau terburu-buru dalam mengambil keputusan. Para pejabat atau pemimpin politik kerap kali panik kalau menghadapi tantangan besar yang menyangkut orang banyak dan kontroversial. Karena panik kerap kali pula keputusan yang diambil tidak efektif atau bahkan salah. Dalam masa transisi, para pemimpin bangsa juga seringkali panik manakala harus mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan rakyat banyak.

LANGGAR TAP. Ketetapan (Tap) MPR adalah produk lembaga tertinggi negara (MPR) yang harus dipatuhi oleh bangsa Indonesia, terutama para pemimpinnya. Tap-Tap MPR itu dihasilkan melalui sidang umum MPR. Kalau Tap MPR itu dilanggar, tentu seorang pejabat negara akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam konstitusi, yang tertinggi adalah UUD, kemudian menyusul Tap MPR, lalu undang-undang.

Rakyat Merdeka, 20 September 2000

KAMUS POLITIK

Kuliti. Kuliti sama dengan menguliti. Menguliti adalah proses pekerjaan mengerikan, kecuali berhubungan dengan kerajinan tangan. Namun tetap bisa mengerikan. Misalnya, perajin X menguliti bulu kelinci untuk dibuat tas dan sandal. Atau contoh yang lebih mengerikan — pembunuh darah dingin itu menguliti korbannya. Contoh kalimat yang berhubungan dengan kata menguliti, yang termuat dalam pemberitaan *Rakyat Merdeka*, yakni *Kwik Ngotot Kuliti 20 Konglomerat Jahat*. Kwik dimaksud adalah Kwik Kian Gie bekas Menko Ekuin yang mengundurkan diri dari kabinet Presiden Gus Dur.

Aksi Tipu-tipu. Aksi tipu-tipu sama artinya dengan aksi tipu menipu atau aksi melakukan praktik penipuan. Tipu-tipu adalah ungkapan yang sering dipakai untuk menunjukkan kelakuan seseorang atau pihak tertentu yang sering membohongi, mengakali atau merugikan orang lain. Kegiatan tipu menipu pada tingkatan tertentu bisa dianggap melanggar hukum, karena ada pihak yang merasa dirugikan. Contoh: banyak kalangan menganggap pemeriksaan kesehatan Soeharto di RSCM adalah upaya untuk menghindar hadir dalam pengadilan. Upaya Soeharto itu disebut atau dianggap sebagai tipu-tipu.

Rakyat Merdeka, 24 September 2000

KAMUS POLITIK

Nginjek. *Nginjek* sama dengan menginjak atau injak. Kata injak hampir sama artinya dengan undas atau menindas. Seseorang atau pihak yang menginjak biasanya merasa mempunyai otoritas yang lebih atau bisa juga merasa mempunyai hak yang tidak dimiliki orang lain sehingga bisa menginjak. *Nginjek* biasanya menimbulkan perasaan korban pada subyek yang terkena injak. Dalam konteks kesewenangan *nginjek*, injak atau menginjak adalah hal biasa. Karena biasanya menginjak adalah bagian dari kesewenang-wenangan.

Yang menginjak biasanya yang punya kuasa. Dalam konteks politik, kata *nginjek* digunakan untuk menunjukkan sikap presiden terhadap MPR dalam masalah pencopotan Kapolri. Pencopotan tersebut seharusnya lebih dulu dikonsultasikan pada MPR dan DPR. Judul berita utama *Rakyat Merdeka*, berkaitan dengan hal tersebut: *Gus Dur Nginjek MPR*.

Tugas Utama. Tugas utama hampir sama pengertiannya dengan agenda prioritas atau hal yang didahulukan di dalam sebuah pekerjaan atau tugas. Kata tugas utama muncul berkaitan dengan naiknya Jenderal Bimantoro menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Rusdihardjo yang dicopot Presiden Gus Dur lantaran dianggap enggan menangkap Tommy Soeharto. Tugas utama bisa juga diartikan sebagai skala prioritas atau ini masalah yang harus dikerjakan atau diselesaikan. Dalam konteks pemberitaan *Rakyat Merdeka*, disebutkan bahwa tugas utama Kapolri baru Bimantoro ternyata bukan menangkap Tommy Soeharto.

Rakyat Merdeka, 25 September 2000

KAMUS POLITIK

Nangkap Teri. Nangkap Teri adalah ungkapan yang digunakan banyak pihak untuk menunjukkan pekerjaan sepele. Teri adalah jenis ikan kecil yang banyak sekali populasinya. Cara menangkapnya juga sangat mudah dan tidak berisiko tinggi. Lain halnya dengan menangkap ikan Kakap atau ikan Paus, yang mengandung banyak risiko, dan populasinya berada di laut lepas. Ikan Teri memang terlanjur dikonotasikan atau disimbolkan sebagai hal yang sepele, gampang, kecil dan sejenisnya. Dalam kaitan pembentahan *Rakyat Merdeka*, contoh judul yang menggunakan kata Nangkap Teri yakni *Lumayan Polisi Bisa Nangkap Teri*. Judul berita ini berkaitan dengan ditangkapnya 25 pria yang diduga pelaku pengeboman di sejumlah tempat di Jakarta. Polisi memang belum berhasil menangkap dalam pengeboman tersebut alias belum mampu menangkap kelas Kakapnya.

Kambing Hitam. Kambing Hitam adalah ungkapan atau istilah yang digunakan untuk menunjukkan adanya orang atau pihak yang dipersalahkan, dikorbankan, dituduh tanpa bukti, disangka tanpa fakta. Pihak atau orang yang menjadi Kambing Hitam biasanya dalam posisi tersudut, terpojok atau bahkan dipinggirkan. Orang atau pihak yang dijadikan Kambing Hitam biasanya belum tentu bersalah, karena itu cenderung dianggap sebagai yang dikorbankan. Contoh berita *Rakyat Merdeka* yang menggunakan kata kambing hitam misalnya judul yang mempertanyakan jangan-jangan 25 pria yang diduga sebagai pelaku pengeboman di sejumlah tempat di Jakarta hanyalah Kambing Hitam. Artinya 25 pria tersebut belum tentu bersalah.

Rakyat Merdeka, 26 September 2000

KAMUS POLITIK

Bencong. Bencong sama dengan waria sama dengan wadam. Orang atau pihak yang disebut atau disindir dengan sebutan bencong biasanya bisa tersinggung, terutama kalau yang bersangkutan memang bukan bencong. Sifat keperempuan memang sering dijadikan olok-olok untuk menunjukkan kelemahan, meski sebenarnya perempuan tidak lemah seperti yang disangka. Sebuah lembaga atau institusi dikatakan memiliki sifat bencong berarti lembaga atau institusi tersebut tidak dapat diharapkan, misalnya untuk bertindak tegas dan bersikap bijaksana. DPR bencong misalnya. Ini berarti DPR bertindak lamban, tidak ulet, tidak jelas sikapnya serta tidak bisa diharapkan terlalu banyak. Padahal DPR adalah lembaga yang mewakili suara rakyat.

Cuti. Istilah cuti ada di dalam bidang birokrasi maupun akademik. Misalnya cuti kerja, cuti tahunan atau cuti akademik. Dalam bidang militer juga dikenal cuti. Berkaitan dengan cuti di bidang militer ini *Rakyat Merdeka* menurunkan berita berjudul *Ada yang Cuti ke Aceh Lalu Hilang. Orang Kopassuskah yang Mengebom BEJ*. Dalam aktivitas politik kata cuti agak kurang populer.

Rakyat Merdeka, 27 September 2000

KAMUS POLITIK

Nangkap Teri. Nangkap Teri adalah ungkapan yang digunakan banyak pihak untuk menunjukkan pekerjaan sepele. Teri adalah jenis ikan kecil yang banyak sekali populasinya. Cara menangkapnya juga sangat mudah dan tidak berisiko tinggi. Lain halnya dengan menangkap ikan Kakap atau ikan Paus, yang mengandung banyak risiko, dan populasinya berada di laut lepas. Ikan Teri memang terlanjur dikonotasikan atau disimbolkan sebagai hal yang sepele, gampang, kecil dan sejenisnya. Dalam kaitan pemberitaan *Rakyat Merdeka*, contoh judul yang menggunakan kata *Nangkap Teri* yakni *Lumayan Polisi Bisa Nangkap Teri*. Judul berita ini berkaitan dengan ditangkapnya 25 pria yang diduga pelaku pengeboman di sejumlah tempat di Jakarta. Polisi memang belum berhasil menangkap dalang pengeboman tersebut alias belum mampu menangkap kelas Kakapnya.

Kambing Hitam. Kambing Hitam adalah ungkapan atau istilah yang digunakan untuk menunjukkan adanya orang atau pihak yang dipersalahkan, dikorbankan, dituduh tanpa bukti, disangka tanpa fakta. Pihak atau orang yang menjadi Kambing Hitam biasanya dalam posisi tersudut, terpojok atau bahkan dipinggirkan. Orang atau pihak yang dijadikan Kambing Hitam biasanya belum tentu bersalah, karena itu cenderung dianggap sebagai yang dikorbankan. Contoh berita *Rakyat Merdeka* yang menggunakan kata kambing hitam misalnya judul yang mempertanyakan jangan-jangan 25 pria yang diduga sebagai pelaku pengeboman di sejumlah tempat di Jakarta hanyalah Kambing Hitam. Artinya 25 pria tersebut belum tentu bersalah.

Rakyat Merdeka, 26 September 2000

KAMUS POLITIK

Bencong. Bencong sama dengan waria sama dengan wadam. Orang atau pihak yang disebut atau disindir dengan sebutan bencong biasanya bisa tersinggung, terutama kalau yang bersangkutan memang bukan bencong. Sifat keperempuanan memang sering dijadikan olok-olok untuk menunjukkan kelemahan, meski sebenarnya perempuan tidak lemah seperti yang disangka. Sebuah lembaga atau institusi dikatakan memiliki sifat bencong berarti lembaga atau institusi tersebut tidak dapat diharapkan, misalnya untuk bertindak tegas dan bersikap bijaksana. DPR bencong misalnya. Ini berarti DPR bertindak lamban, tidak ulet, tidak jelas sikapnya serta tidak bisa diharapkan terlalu banyak. Padahal DPR adalah lembaga yang mewakili suara rakyat.

Cuti. Istilah cuti ada di dalam bidang birokrasi maupun akademik. Misalnya cuti kerja, cuti tahunan atau cuti akademik. Dalam bidang militer juga dikenal cuti. Berkaitan dengan cuti di bidang militer ini *Rakyat Merdeka* menurunkan berita berjudul *Ada yang Cuti ke Aceh Lalu Hilang. Orang Kopassuskah yang Mengebom BEJ*. Dalam aktivitas politik kata cuti agak kurang populer.

Rakyat Merdeka, 27 September 2000

Bahasa Tarzan. Bahasa Tarzan adalah istilah atau ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan tidak nyambungannya sebuah proses komunikasi. Bahasa Tarzan bisa juga diartikan sebagai bahasa primitif, dimana sebuah komunikasi verbal tidak mengenal abjad atau huruf konvensional maupun vokal. Bahasa Tarzan bisa juga diartikan sebagai bahasa isyarat atau bahasa tubuh dengan menggunakan gerak-gerik anggota tubuh, seperti mimik, tangisan dan anggota badan lainnya. Bahasa Tarzan adalah bahasa yang tidak dikenal oleh manusia modern yang hidup di dalam suatu lingkungan peradaban tertentu. Salah satu contoh ungkapan kekecewaan yang menggunakan kata bahasa Tarzan yakni adanya usulan supaya proses pengadilan Soeharto sebaiknya menggunakan bahasa Tarzan. Karena Soeharto selalu berbalas sakti supaya tidak sampai ke meja hijau. Ini artinya sebuah ingot, sebuah simisme atau kata lain dari ketidakpercayaan rakyat terhadap institusi hukum yang bernama pengadilan.

Top Four. Top four artinya adalah empat besar. Empat besar disini adalah empat orang tokoh pemimpin bangsa, yakni Abdurrahman Wahid (Presiden RI), Megawati (Wakil Presiden RI), Amien Rais (Ketua MPR dan Alim Ulama), dan (Ketua DPR). Empat tokoh tersebut adalah pemimpin di lembaga eksekutif dan legislatif. Itulah empat besar ini berlaku umum, karena setiap negara yang menganut asas politika besar mengenal lembaga kepresidenan, wakil presiden, Ketua MPR maupun DPR. Negara monarkhi—kecuali monarkhi parlementer seperti Inggris—biasanya tidak mengenal empat besar lembaga dinkasud.

KAMUS POLITIK

Insiden Pengeboman BRT. Ini adalah salah satu peristiwa mengesankan sekaligus bukti ketidakpercayaan pemerintah terhadap gerakan teror yang muncul pasca Jengser-nya Soeharto. Peristiwa pengeboman Gedung BRT (Busa Ekspres Jakarta) yang terjadi pada hari Rabu Sore 13 September 2000 adalah salah satu dari sekian banyak peristiwa teror yang dialami bangsa Indonesia saat ini. Dalam insiden pengeboman Gedung BRT tercatat 15 warga sipil tewas, Miterka terdiri dari orang-orang biasa, yakni para sopir, Satpam dan mahasiswa. Sebetulnya terjadi beberapa pengeboman lain, di antaranya pengeboman Gedung Kejaksaan Agung, Kedutaan Besar Filipina, Kedutaan Malaysia serta beberapa pengeboman lain sepanjang tahun 2000. Aparat keamanan masih belum mampu mengemukakan bukti-bukti kuat dan akurat yang dapat mengarahkan penyelidikan berkaitan dengan pelaku pengeboman.

Antek. Kata antek punya konotasi sangat tajam, dan bukan tidak mungkin bisa menyebabkan ketegangan orang atau pihak yang disebut sebagai antek. Pada masa Orde Lama kata antek pernah sangat populer sebagai bagian dari jargon politik, misalnya pernah ada istilah berburu antek Neokolin (Neokolinialis Impenalis), antek Peking dan sebagainya. Menasuki era Orde Baru, kata antek cenderung tidak populer seiring dengan menurunnya suhu politik di tanah air. Antek sebenarnya mengandung pengertian yang sama dengan kroni, koros atau bahkan anak buah yang loyal. Seseorang yang disebut sebagai antek biasanya mengabdikan diri pada figur yang dipandang panutan. Sebagai konsekuensi keuletan, yang bersangkutan biasanya mendapatkan jaminan atau perlindungan dalam segala hal. Dengan demikian sebagai antek yang bersangkutan menjadi terikat baik lahir maupun batin.

KAMUS POLITIK

KAMUS POLITIK

Masuk Bui. Masuk bui sama artinya dengan masuk tahanan, masuk penjara atau dikerangkeng oleh pihak yang berwajib. Kata dibui punya konotasi klasik, karena kata bui pernah sangat populer pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa itu seorang tokoh politik atau tokoh pergerakan yang dimasukkan ke dalam tahanan biasanya disebut masuk bui. Salah satu bui (penjara) legendaris antara lain penjara Sukamiskin, Cipinang sampai Kalisosok. Contoh kalimat yang menggunakan kata bui yang terdapat dalam berita utama *Rakyat Merdeka* ialah Tommy Masuk Bui.

Dibocorkan. Dibocorkan berarti sama dengan digagalkan. Sesuatu yang dibocorkan biasanya menyangkut informasi, baik informasi lisan maupun tulisan seperti dokumen atau surat rahasia. Pelaku pembocoran atau pembocor biasanya dianggap pengkhianat, karena merugikan atau menggagalkan sebuah rencana atau strategi yang seharusnya dijalankan untuk tujuan kemenangan. Kegiatan bocor membocorkan dalam aktivitas politik cenderung dianggap sebagai hal lumrah, karena pembocoran merupakan bagian dari intrik. Misalnya vonis penjara Tommy Soeharto selama 1,5 tahun dibocorkan orang dalam. Ini adalah salah satu judul berita *Rakyat Merdeka*.

Rakyat Merdeka, 28 September 2000

KAMUS POLITIK

Gombal. Gombal adalah sobekan kain bekas yang kumal dan kusam serta tidak bisa dipakai lagi. Karena keadaan fisiknya demikian maka kata gombal sering dipakai untuk menunjukkan adanya sikap atau kelakuan yang tidak menyenangkan, misalnya membohongi seseorang, mengingkari janji atau menipu. Sikap merugikan tersebut bisa dikatakan sebagai gombal. Dalam aktivitas sehari-hari kata gombal sering digunakan tidak hanya sebagai lelucon, melainkan juga bisa dipakai dalam konteks serius. Contohnya DPR menilai keputusan hakim membebaskan Soeharto dari jerat hukum sama dengan gombal, padahal tuduhan praktik KKN yang dituduhkan kepada Soeharto bisa dibuktikan secara hukum.

Barter. Barter sama dengan imbal beli. Dimana biasanya kedua belah pihak terlibat dalam transaksi perdagangan tanpa menggunakan uang sebagai alat tukar. Dalam pola ekonomi tradisional atau primitif praktik dagang atau bisnis dengan memberlakukan cara barter hingga kini masih terus digunakan. Dalam konteks pemberitaan *Rakyat Merdeka* kata barter muncul untuk menggambarkan ironi, yakni sementara Soeharto dibebaskan dari jerat hukum oleh pihak hakim di pengadilan —Tommy Soeharto, sang anak, divonis 1,5 tahun penjara. Bukankah cara penghukuman seperti ini mirip dengan barter. Padahal rakyat ingin keluarga Cendana terkena proses hukum secara adil dan jujur.

Rakyat Merdeka, 30 September 2000

KAMUS POLITIK

Rapat Mendadak. Rapat mendadak adalah istilah yang sering muncul dalam aktivitas politik maupun organisasi. Rapat mendadak mengkonotasikan adanya sesuatu hal penting yang mesti segera dirapatkan, dibahas, didiskusikan, disimpulkan atau dicarikan jalan keluar. Sifatnya sangat darurat serta urgent. Rapat mendadak bisa saja tidak memenuhi quorum, karena dari segi waktu pelaksanaannya memang mendadak atau tiba-tiba. Dalam situasi krisis biasanya rapat mendadak menjadi hal lumrah. Rapat mendadak biasanya pula dilakukan untuk merespon suatu peristiwa yang tiba-tiba muncul atau terjadi secara mendadak. Momentum yang berkaitan dengan rapat mendadak misalnya, beberapa jam setelah mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma dari kunjungan ke KTT Milenium di New York Amerika Serikat, Presiden Gus Dur langsung melakukan rapat mendadak sehubungan dengan insiden berdarah di Atambua, NTT yang menewaskan tiga staf sipil UNHCR PBB.

Diimpor. Diimpor berarti didatangkan dari luar negeri. Kata impor sebenarnya milik khasanah perbendaharaan kata bidang ekonomi. Sesuatu yang diimpor biasanya dianggap istimewa, karena berkaitan dengan kualitas atau mutu. Sebuah produk impor biasanya pula amat digemari, bahkan dicari-cari meskipun harganya mahal. Sebuah berita yang berkaitan dengan kata impor misalnya: dokter yang akan memeriksa penyakit Soeharto adalah dokter impor. Artinya, dokter tersebut didatangkan dari luar negeri.

Rakyat Merdeka, 12 September 2000

KAMUS EKONOMI

Kredit Korporasi

ISTILAH kredit korporasi artinya kredit yang diberikan oleh suatu bank kepada sejumlah perusahaan. Berkaitan dengan BRI, selama hampir dua dasawarsa ini, BRI telah memberikan sejumlah kredit ke perusahaan-perusahaan konglomerat. Kebijakan ini secara tidak langsung menghilangkan ciri khas BRI, yang lebih memfokuskan pada kredit-kredit usaha kecil atau agribisnis.

Business Plan

ISTILAH Business Plan artinya adalah rencana kerja. Istilah ini digunakan terhadap bank-bank swasta atau pemerintah seperti BNI, BRI, atau Bank Bali yang ingin mendapatkan dana rekapitalisasi perbankan. Rencana kerja ini biasanya disusun dalam jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan indikator-indikator makroekonomi seperti inflasi dan suku bunga perbankan.

Rakyat Merdeka, 13 September 2000

KAMUS POLITIK

Pasukan Berani Mati. Semua pasukan, selama pasukan tersebut adalah pasukan militer, sudah tentu berani mati. Soalnya doktrin kejuangan militer adalah membunuh atau terbunuh. Jadi, kalau ada pasukan tidak berani mati, maka namanya bukan pasukan, melainkan group ludruk atau lenong yang tugasnya menghibur atau pura-pura mati. Dalam perkembangannya kemudian, kata atau istilah pasukan berani mati digunakan dalam kebutuhan sehari-hari. Misalnya untuk menggambarkan sebuah tim yang solid dan kuat dalam pertandingan olahraga atau untuk menggambarkan sikap patriot atau gagah berani. Dalam konteks pemberitaan Tommy Soeharto kata atau istilah pasukan berani mati muncul dan digunakan. Judul tersebut adalah *rumah Tommy Soeharto dijaga pasukan berani mati*. Pasukan berani mati disini adalah sekelompok orang penjaga Tommy Soeharto. Konon orang-orang tersebut terlatih secara militer. Dulu pernah ada sebuah film berjudul *pasukan berani mati*.

Jurus Rahasia. Jurus rahasia adalah ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan adanya rencana yang disembunyikan atau strategi yang disusun secara hati-hati serta tidak diketahui umum atau pihak lain. Jurus rahasia sama dengan strategi rahasia atau rencana rahasia. Dalam kaitan pemberitaan disebutkan bahwa pengacara Tommy Soeharto —yang akan dipenjarakan 1,5 tahun— sudah menyiapkan jurus rahasia untuk membela putra kesayangan Soeharto itu. Soalnya dikabarkan Tommy bakal segera meringkuk di penjara Cipinang.

Rakyat Merdeka, 29 September 2000

KAMUS EKONOMI

HPH

ISTILAH HPH merupakan kependekan dari Hak Penguasaan Hutan. HPH merupakan salah satu fasilitas yang diberikan pemerintahan Soeharto untuk mengelola sejumlah wilayah kehutanan. Namun dalam prakteknya para pengusaha yang memegang HPH ini sering menyalahgunakannya, dengan cara tidak menyeter sejumlah pajak dari penebangan pohon, termasuk juga merusak konservasi hutan.

Cut Loss

KATA cut loss adalah salah satu istilah pasar modal yang artinya adalah tindakan untuk mengurangi kerugian. Biasanya tindakan ini dilakukan ketika sang investor memegang saham cukup banyak, namun kondisi pasar melemah. Jika sang investor ini tetap memegang sahamnya, maka kerugiannya akan cukup besar. Salah satu cara menguranginya dengan cut loss.

Rakyat Merdeka, 23 September 2000

KAMUS EKONOMI**Objek Pajak**

INDIVIDU atau perusahaan yang wajib dikenakan pajak. Menurut catatan kantor pajak, saat ini ada sekitar 130 juta objek pajak. Sedangkan dari jumlah tersebut hanya sekitar 70 persen atau sekitar 91 juta orang, yang kewajiban pajaknya bisa ditarik pemerintah, sisanya masih nunggak.

Rasio Pajak Atau Tax Ratio

Isitilah Rasio Pajak artinya perbandingan antara penerimaan pajak dan pendapatan domestik bruto (PDB). Semakin besar rasio pajak maka semakin besar peran sektor pajak dalam anggaran. Demikian pula sebaliknya. Tahun 2001, rasio pajak yang ditargetkan pihak Ditjen Pajak sebesar 12,7 persen.

Rakyat Merdeka, 25 September 2000

KAMUS EKONOMI**Embargo**

Isitilah embargo artinya diboikot. Istilah ini digunakan berkaitan dengan dukungan internasional atau negara. Biasanya berkaitan dengan masalah keuangan atau kebutuhan rakyat. Kondisi inilah yang kini mengancam Indonesia menyusul tragedi Atambua. Dimana Menhan Amerika William Cohen mengancam akan mengembargo Indonesia jika kasus Tintim tak tuntas.

Rakyat Merdeka, 20 September 2000

KAMUS EKONOMI**Moral Hazard**

Istilah moral hazard ini artinya kecenderungan bankir atau pelaku ekonomi untuk menyalahgunakan uang negara. Moral hazard inilah yang selama ini diuding sebagai salah satu biang kerok kehancuran perbankan nasional. Contoh paling nyata pada penyelewengan dana BLBI senilai Rp 138,5 triliun.

Rakyat Merdeka, 29 September 2000

KAMUS EKONOMI**LPS**

Istilah LPS merupakan kependekan dari Lembaga Penjaminan Simpanan. Lembaga ini merupakan salah satu bentuk asuransi deposito yang diselenggarakan BI. Dalam perkembangannya nanti LPS akan menjadi sebuah badan tersendiri seperti BPPN, namun berbagai pihak masih meragukan kerja lembaga ini.

Rakyat Merdeka, 30 September 2000

KAMUS EKONOMI**Good Corporate Governance**

Istilah good corporate governance artinya adalah pengelolaan negara dan perusahaan secara transparan, termasuk juga bersih dari KKN. Istilah ini digunakan oleh negara-negara donor, bila ingin memberikan bantuan terhadap Indonesia. Mereka selalu meminta jaminan terhadap Indonesia agar selalu mendorong good corporate governance dalam setiap kebijakan-kebijakannya.

Rakyat Merdeka, 28 September 2000

KAMUS EKONOMI**Foreign Exchange Control**

Istilah Foreign Exchange Control atau pengawasan lalulintas devisa adalah suatu peraturan yang memungkinkan pemerintah bertindak sebagai satu-satunya badan yang berhak menjual, membeli, memiliki dan menyimpan alat-alat pembayaran luar negeri (devisa).

Rakyat Merdeka, 5 September 2000

KAMUS EKONOMI**Holding Company**

Istilah holding company artinya adalah perusahaan induk yang memiliki beberapa anak perusahaan. Dalam operasionalnya, anak perusahaan itulah yang ditugaskan untuk mencetak laba. Contohnya holding company Salim Group—PT Holdiko Perkasa—, yang kini utangnya direstrukturisasi oleh BPPN. Dalam kasus ini Holdiko memiliki 31 anak perusahaan.

Initial Public Offering (IPO)

Istilah IPO artinya langkah pertama dalam proses penjualan saham perusahaan ke masyarakat, sebelum perusahaan itu masuk ke lantai bursa. Dalam IPO ini masyarakat bisa membeli langsung saham tersebut ke agen-agen yang telah disediakan.

Rakyat Merdeka, 26 September 2000

KAMUS EKONOMI**Kredit Ekspor**

ISTILAH kredit ekspor atau trade financing adalah kredit yang diberikan pemerintah kepada para pengusaha. Tujuan pengucuran ini untuk mendorong kinerja ekspor dalam negeri. Rencananya pemerintah lewat Deperindag akan mengucurkan kredit ini senilai 1 miliar dolar, lewat kerjasamanya dengan sindikasi bank asing.

Rakyat Merdeka, 27 September 2000

KAMUS EKONOMI**Volume Saham**

Istilah volume saham ini artinya jumlah saham yang diperdagangkan di lantai bursa. Besar kecilnya volume saham yang ditransaksikan di BEJ menandakan baik buruknya Indeks bursa saat itu. Biasanya jika volume perdagangan saham meningkat maka indeks pun akan meningkat pula. Begitu pula sebaliknya.

Rakyat Merdeka, 6 September 2000

KAMUS EKONOMI**Cash Transfer**

ISTILAH cash transfer ini artinya adalah transfer uang tunai. Mekanisme transfer ini digunakan dalam model pemberian subsidi bagi masyarakat miskin. Dengan model ini setiap KK (Kepala Keluarga) akan mendapatkan sejumlah uang untuk dibelikan BBM. Kebijakan ini nantinya akan dikoordinasikan oleh Bappenas.

Rakyat Merdeka, 7 September 2000

KAMUS EKONOMI**Sabotase Ekonomi**

Istilah sabotase ekonomi ini artinya proses penghancuran terhadap lembaga-lembaga yang menguasai urat nadi perekonomian. Kasus peledakan BEJ menjadi salah satu contohnya, sebab, BEJ menjadi salah satu indikator kepercayaan investor asing terhadap Indonesia. Selain itu BEJ telah menjadi pintu keluar masuk modal asing.

Rakyat Merdeka, 15 September 2000

KAMUS EKONOMI**RAPBN**

Istilah ini kependekan dari Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Istilah ini berkaitan dengan pemasukan negara dan pengeluaran biaya pembangunan. Saat ini penyusunan RAPBN digunakan selama sembilan bulan, dengan tahun anggaran mulai 1 Januari. Menurut bekas Menkeu Bambang Sudibyo, kemungkinan ada revisi dalam APBN 2000, akibat gagalnya target pemasukan dari BUMN dan BPPN.

Rakyat Merdeka, 11 September 2000

KAMUS EKONOMI**Non Performing Loan (NPL)**

ISTILAH NPL artinya kredit yang bermasalah. Bila seorang debitur sampai mempunyai kredit bermasalah, bisa disebabkan karena kondisi krisis ekonomi seperti anjloknya Rupiah. Namun yang sering menyebabkan kredit bermasalah ini adalah debitur sendiri alias tidak menyalurkan kredit secara semestinya. Semakin besar NPL semakin buruk kondisi perbankan.

Rakyat Merdeka, 14 September 2000

KAMUS EKONOMI**Defisit**

Istilah defisit artinya adalah ketimpangan antara penerimaan dan pengeluaran anggaran. Kondisi inilah yang kini terjadi di RAPBN 2001. Dimana antara penerimaan negara dan pengeluaran pembangunan negara tidak seimbang.

Rakyat Merdeka, 7 September 2000

KAMUS EKONOMI**Disaster System Recovery (DSR)**

Istilah DSR merupakan kependekan dari sistem cadangan perdagangan BEJ. Sistem ini akan berfungsi jika perdagangan di Bursa Efek Jakarta mengalami gangguan seperti peledakan bom pada Rabu (13), listrik padam atau terjadinya sabotase oleh kalangan pialang. Saat ini BEJ memiliki dua cadangan, yang pertama di BEJ. Sedang yang ke-dua terletak di luar BEJ.

Rakyat Merdeka, 16 September 2000

KAMUS EKONOMI**Pengoplosan**

Istilah pengoplosan bisa diartikan pencampuran. Berkaitan dengan BBM, istilah ini sering digunakan terhadap tindakan-tindakan seseorang yang mencampurkan beberapa jenis BBM. Tujuan pengoplosan ini untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Misalkan pengoplosan solar dengan minyak tanah.

Rakyat Merdeka, 21 September 2000

GLOSARIUM EKBIS 'KR'

- **Open Inflation** = Inflasi terbuka. Suatu keadaan atau tanpa adanya pengendalian harga tetapi ada permintaan uang yang bertambah. Kekurangan disesuaikan dengan kenaikan harga-harga.
 - **Opening Prices** = Harga pengenalan. Harga-harga yang ditentukan pada saat usaha dimulai pada saat barang mulai masuk pasar.
 - **Optimal Plant Size** = Optimum perusahaan, dicapai pada *bezetting* perusahaan, dimana biaya produksi rata-rata adalah terendah. Setiap produk dihasilkan lebih (produk batas, produksi lebih, produk marginal), akan menjadi lebih mahal (biaya tambahan, biaya batas, biaya marginal).
- (Bahan: dari berbagai sumber)

Kedaulatan Rakyat, 15 September 2000

GLOSARIUM EKBIS 'KR'

- **Production Orientation** = Orientasi produksi. Orientasi pengusaha yang dalam menentukan kebijaksanaannya mengutamakan masalah produksi barang/jasa.
- **Production Unit Method of Depreciation** = Metode penyusutan berdasarkan kesatuan produk. Metode penghitungan penyusutan mesin yang didasarkan pada jumlah produk yang dihasilkan selama umur teknisnya, sehingga penyusutan (biaya) per unit produk menjadi tetap.
- **WTDR** = World Traders Data Report

Kedaulatan Rakyat, 5 September 2000

GLOSARIUM EKBIS 'KR'

- **Product Attributes** = Atribut produk. Alat-alat untuk memberi pembedaan pada produk, seperti merk, kemasan, label.
- **Product Design** = Rancangan produk. Rancangan terhadap produk untuk memberikan/ menambahkan citra produksi.
- **Product Apporach** = Pendekatan produk. Dalam pemasaran, pendekatan yang dilakukan pramuniaga terhadap calon pelanggan dengan menunjukkan produk yang ditawarkan untuk membangkitkan kesadarannya terhadap produk.
- **WTO** - World Trade Organization

Kedaulatan Rakyat, 12 September 2000

KOSAKATA HARI INI

legal: resmi, sesuai dengan undang-undang atau hukum

dilegalkan: dibuat menjadi legal

dideteksi: ditemukan atau ditentukan keberadaannya, dilacak

Contoh: Kalau *dilegalkan* bakal mengundang protes keras, sedangkan jika tidak, dampak negatifnya sulit *dideteksi* (dalam Masalah Kita, halaman 8) (KR)

Kedaulatan Rakyat, 2 September 2000

KOSAKATA HARI INI

kasus: soal, perkara, keadaan yang berhubungan dengan seseorang

isu: masalah yang dikedepankan, kabar yang tak jelas asal usulnya dan tidak terjamin kebenarannya, kabar angin, desas-desus

Contoh: Dalam *kasus* berita dan foto yang menyangkut *isu* seputar hubungan Aryanti-Presiden Abdurrahman Wahid (dalam tajuk rencana, halaman 6) (KR)

Kedaulatan Rakyat, 6 September 2000

KOSAKATA HARI INI

dikonsumsi: dipakai, menjadi hal yang memenuhi kebutuhan kita

Contoh: Semakin banyaknya siaran yang bisa *dikonsumsi*, menyebabkan semakin banyak pula kebiasaan membaca buku itu ditinggalkan (dalam tajuk, halaman 6)

semarak: meriah, ramai

Contoh: Orang yang datang ke perpustakaan, tidak lagi *semarak* (dalam tajuk, halaman 6) (KR)-c

Kedaulatan Rakyat, 21 September 2000

KOSAKATA HARI INI

instalasi: perangkat teknis beserta perlengkapannya, yang siap dipergunakan

Contoh: PDAM mewarisi *instalasi* air yang ditanam sebelum zaman reformasi ... (dalam Masalah Kita, halaman 6)

tandon: persediaan

Contoh: ... PDAM mengeluarkan himbauan untuk hemat air, atau menyediakan *tandon* saat air mengalir (dalam Masalah Kita, halaman 6) (KR)-c

Kedaulatan Rakyat, 22 September 2000

KOSAKATA HARI INI

aparatus: badan pemerintah, instansi pemerintah

Contoh: Pernyataan itu sebuah perintah kepada *aparatus* kepolisian ... (dalam tajuk, halaman 8)

berspekulasi: menduga-duga, memperkirakan

Contoh: ... agar masyarakat menjadi tidak *berspekulasi* lagi? (dalam tajuk, halaman 8) (KR)-o

Kedaulatan Rakyat, 18 September 2000

KOSAKATA HARI INI

diplomasi: urusan kepentingan sebuah negara dan negara lain

Contoh: Tentunya, harus mengambil langkah *diplomasi* (dalam Tajuk Rencana, halaman 6)

insiden: kejadian, peristiwa

Contoh: Hanya kebetulan *insiden* Atambua yang menelan tiga korban jiwa ... (dalam Tajuk Rencana, halaman 6) (KR)-o

Kedaulatan Rakyat, 14 September 2000

KOSAKATA HARI INI

mensinyalir: memperingatkan, memberitahukan, agar memperhatikan atau berawas-awas terhadap

oknum: orang seorang, orang atau anasir

Contoh: Kalaupun ada yang *mensinyalir*, bahwa meningkatnya aksi curanmor itu karena *oknum* aparat yang bertindak sebagai pelindung (dalam Masalah Kita, halaman 8) (KR)-o

Kedaulatan Rakyat, 16 September 2000

Ensiklopedi Sunda Diluncurkan

Jakarta, Kompas

Masyarakat Indonesia masih banyak yang belum sadar tentang arti pentingnya dokumentasi. Akibatnya, sulit sekali mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk sebuah penulisan karya tulis.

Hal ini diungkapkan sastrawan Ajip Rosidi dalam acara Dialog Interaktif dan Peluncuran Ensiklopedi Sunda di Jakarta, Rabu (6/9). Dialog yang dipandu Ebet Kadarusman itu juga menghadirkan Prof Dr Taufik Abdullah sebagai pembicara.

"Kesulitan sumber-sumber dokumentasi inilah yang seringkali kita hadapi ketika menyusun Ensiklopedi Sunda, terutama dokumentasi yang berkaitan dengan musik daerah Sunda. Kalau tentang sastra, buku-bu-

kunya masih bisa dilacak sampai ke luar negeri," kata Ajip.

Menurut Ajip, dibutuhkan waktu sepuluh tahun untuk bisa menyelesaikan ensiklopedi ini dari rencana semula lima tahun. Dan, untuk penyelesaiannya, sebagian terbesar mendapat dukungan dari Toyota Foundation. "Akan tetapi, kata orang menyusun ensiklopedi memang tidak pernah *on time*, bisa molor beberapa tahun," ujarnya.

Ajip mengaku, pendorong utama untuk turut dalam penyusunan Ensiklopedi Sunda berawal dari keprihatinan dirinya terhadap kondisi kebudayaan dan kesenian daerah. Menurut Ajip, yang pertama kali perlu dilakukan untuk menyelamatkan kebudayaan dan kesenian daerah adalah melakukan in-

ventarisasi tentang kebudayaan-kebudayaan daerah.

"Inventarisasi ini penting bukan saja untuk kepentingan orang-orang dari luar daerah budaya, tetapi juga penting bagi anggota masyarakat pemilik budaya itu sendiri," katanya.

Senada dengan Ajip, Taufik mengatakan bahwa inventarisasi budaya daerah yang ada itu juga penting untuk melakukan pewarisan keterampilan berkesenian maupun penanaman apresiasi terhadap berbagai jenis kesenian. "Ensiklopedi Sunda dapat dijadikan sebagai sumber informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan budaya Sunda. Kita bisa melihat apa yang sudah hilang dan apa yang masih dapat diselamatkan," katanya. (mam)

Kompas, 7 September 2000

ULASAN BAHASA

Istilah 'Ombudsman', 'Impeachment', dan Lainnya

Sdr Ign Nyoman Wiradana menyoal istilah asing yang akhir-akhir ini bermunculan di media massa, misalnya: *an sich*, *deadlock*, *impeachment*, *ombudsman*, *ad hoc*, *dirgahayu*, *walk-out*, *status quo*, dll. Mengapa istilah-istilah itu banyak dipakai dan amat populer, padahal dalam bahasa kita ada istilah yang tepat? Minta penjelasan asal-usul dan arti asli *an sich*, *ombudsman*, dan *ad hoc*.

Sdr Yahya, pemerhati perkembangan bahasa Indonesia, menanyakan hal-hal berikut. Apa kata dasar asli kata *importir*, *direktur*, *inspektur*, *direktoris*, *aktris*? Apakah *-ur*, *-ir*, *-ris* adalah akhiran baku? Seandainya baku, apakah ada aturan pemakaiannya?

Pertama, pengasuh ingin menegaskan bahwa istilah-istilah yang muncul akhir-akhir ini bukanlah kata baru. Hanya, karena istilah itu jarang digunakan, lalu sepertinya menjadi kata yang terlahir baru.

Bahaya pemakaian istilah asing yang berlebihan dapat memunculkan gejala verbalisme. Mak-sudnya, orang menjadi lebih suka memakai istilah asing padahal ada bentuk bahasa Indonesia yang lebih tepat.

Bentuk *deadlock*, *impeachment*, *walk-out* merupakan istilah bahasa Inggris. Arti istilah *deadlock* adalah keadaan macet karena pihak-pihak yang terlibat dalam rapat atau perundingan tidak mau berkompromi. Contoh, *Setelah deadlock beberapa jam, rapat yang menegangkan itu dimulai lagi*.

Kata *impeachment* memiliki bentuk dasar *impeach*, artinya menuntut pimpinan atau pejabat ke hadapan dewan atau mahkamah karena dianggap menyalahgunakan wewenang. Contoh, *Presiden terancam kena impeachment kalau ketidakberasan itu tetap dibiarkan berlanjut*.

Bentuk *walk-out* artinya keluar. Dalam konteks politik *walk-out* berarti meninggalkan rapat atau perundingan karena tidak setuju dengan forum. Lazimnya, *walk-out* merupakan penanda protes bagi yang bersangkutan. Contoh, *Anggota-anggota Dewan dari Aceh itu berbicara keras, lalu walk-out satu demi satu*.

Kata *ombudsman* berasal dari bahasa Denmark dan atau Swedia. Artinya, petugas atau tim penerima aduan dan pencari pemecahan untuk masalah

yang diadakan itu. Petugas atau tim *ombudsman* tidak saja terdapat dalam lingkup pemerintahan, namun juga pada institusi, instansi, perusahaan, yang memberikan pelayanan umum. Contohnya, *Tim ombudsman perusahaan penerbitan harus diadakan kalau perusahaan itu ingin maju*.

Bentuk *an sich* berasal dari bahasa Jerman. Artinya, lepas dari hal-hal tertentu; tersendiri; itu sendiri. Contoh, *Tulisan ilmiah dosen muda itu an sich baik, namun lepas dari ketentuan yang telah ditetapkan bersama*.

Bentuk *ad hoc* artinya tim atau panitia yang dibentuk sementara untuk menangani masalah tertentu. Setelah penanganan masalah selesai, tim atau panitia *ad hoc* itu biasanya juga selesai. Contoh, *Untuk menangani masalah keuangan mahasiswa baru, perlu dibentuk panitia ad hoc per fakultas*. Istilah *ad hoc* berasal dari bahasa Latin.

Kata *dirgahayu* berasal dari bahasa Kawi atau Jawa Kuno. Artinya, panjang umur. Lazimnya, kata *dirgahayu* dipakai untuk memberikan ucapan kepada negara, institusi, instansi, yang sedang memperingati hari jadinya. Misalnya, *Dirgahayu Republik Indonesia*.

Istilah *status quo* berasal dari bahasa Latin. Artinya, keadaan tetap atau tidak berubah. Lazimnya, istilah itu digunakan untuk menyebut kelompok sosial politik tertentu yang tidak ingin berubah. Mereka ingin bertahan pada keadaan yang ada karena dianggapnya telah mapan. Contohnya, *Kelompok pro-status quo itu sulit sekali berkompromi dengan kelompok reformis*.

Selanjutnya, bentuk *importir*, *direktur*, *inspektur*, *direktoris*, *aktris* merupakan serapan kata bahasa Inggris. Bentuk dasar aslinya, *import*, *direct*, *inspect*, *act*. Melalui proses penyerapan, bentuk-bentuk tersebut disesuaikan dengan cara pelafalan dan penulisan bahasa Indonesia.

Akhiran *-ur*, *-ir*, *-ris* pada kata-kata di atas bukan akhiran asli bahasa Indonesia. Bersama akhiran *-itas*, *-isme*, *-logi*, *-asi*, *-ar*, dll, seperti pada *kreativitas*, *profesionalisme*, *sosiologi*, *harmonisasi*, *poler*, imbuhan-imbuhan itu merupakan bentuk terikat asing. Aturan baku pemakaiannya memang sepertinya tidak ada, namun pedoman umum pelafalan dan penulisannya cukup jelas.

Nomina Turunan

RUBRIK BAHASA

PEPATAH kita mengatakan, "Bahasa menunjukkan bangsa." Kesantunan, perilaku, bahkan tingkat kemajuan kehidupan atau peradaban suatu bangsa terlihat dari bahasanya. Kekayaan kosakata (termasuk istilah) suatu bahasa memperlihatkan kemajuan peradaban bangsa pemiliknya. Sementara itu, keteraturan dan ketaatan kaidah bahasa mencerminkan ketertiban perilaku kehidupan bangsa pemiliknya.

Dalam kaitan dengan keteraturan dan ketaatan kaidah bahasa itu, tulisan ini mengemukakan persoalan kaidah pembentukan nomina (kata benda) turunan yang menyatakan orang yang bekerja sebagai atau mempunyai profesi sebagai apa yang disebutkan pada verbanya. Dalam dunia pengajaran bahasa Indonesia, pembentukan nomina turunan tersebut dijelaskan sebagai penambahan prefiks (awalan) *pe-* pada verba asal, seperti contoh berikut.

pe + tulis menjadi *penulis*

pe + didik menjadi *pendidik*

Penjelasan ini memang lebih sederhana dan mudah dipahami, tetapi kita akan menemui kesulitan ketika dihadapkan pada bentuk-bentuk kata "baru" dalam bidang olahraga, seperti kata *terjun*, *tembak*, *panah*, *golf* yang akan menjadi: *penerjun* atau *peterjun*; *penembak* atau *petembak*; *pemanah* atau *pepanah*; *petenis* atau *pegolf*.

Pemahaman terhadap kaidah pembentukan nomina turunan tersebut perlu dikaitkan dengan bentuk verba yang menurunkan nomina tersebut. Apakah verba yang menurunkan nomina itu merupakan verba berprefiks (*me-*) atau berprefiks *ber-*? Untuk itu, amati contoh berikut.

• *tulis* → *menulis* → *penulisan*
tulisan → *penulis*

• *didik* → *mendidik* → *pendidikan* → *didikan* → *pendidik*

• *periksa* → *memeriksa* → *pemeriksaan* → *periksaan* → *pemeriksaan*

• *kutip* → *mengutip* → *pengutipan* → *kutipan* → *pengutip*

• *serang* → *menyerang* → *penyerangan* → *serangan* → *penyerang*

• *cat* → *mengecat* → *pengecatan* → *catan* → *pengecat*

Dari contoh-contoh di atas kita dapat mengenali satu kaidah pembentukan nomina orang yang mengerjakan atau memiliki profesi di bidang yang dinyatakan pada verba *menulis*, *mendidik*, *memeriksa*, *mengutip*, *menyerang*, dan *mengecat*.

Semua verba berafiks *men-* (*men-*, *mem-*, *meng-*, *meny-*, dan *menge-*) menurunkan nomina berprefiks *peng-* (*pen-*, *pem-*, *peng-* *peny-*, dan *penge-*). Semua prefiks pembentukan nomina dari berprefiks *meng-* (nasal) tersebut mengalami penasalan karena kata asal pembentuk verba tersebut diawali dengan fonem (huruf) *t* (*tulis*), *d* (*didik*), *j* (*ajah*), *p* (*eriksa*), *k* (*utip*), *s* (*erang*), dan *c* (*at*). Berbeda halnya dengan kata asal yang diawali dengan fonem *l*, *r*, *w*, seperti pada contoh berikut.

• *lukis* → *melukis* → *pelukisan*

→ *lukisan* → *pelukis*

• *rakit* → *merakit* → *perakitan*

→ *rakitan* → *perakit*

• *waris* → *mewariskan* → *pewarisan* → *warisan* → *pewaris*

Sekalipun verba yang menurunkan nomina *pelukis*, *perakit*, dan *pewaris* itu berprefiks *me-* (*melukis*, *merakit*, *mewariskan*),

nomina bentuk tersebut tidak mengalami penasalan seperti nomina pada deret *penulis* dan sebagainya di atas. Kaidah yang perlu dicatat ialah bahwa afiks *pe-* tidak mengalami penasalan jika verba yang menurunkannya tidak mengalami penasalan.

◆◆◆

SELAIN dibentuk dari verba berafiks *men-*, nomina yang menyatakan orang yang bekerja sebagai sesuatu yang memiliki profesi sebagai apa yang disebutkan pada verbanya juga dibentuk dari verba berafiks *ber-*. Amati contoh berikut.

• *tani* → *bertani* → *pertanian*
petani

• *ternak* → *beternak* → *peterernakan* → *peternak*

• *dagang* → *berdagang* → *perdagangan* → *pedagang*

Kata *tani* menjadi verba perbuatan *bertani*, dari verba itu terbentuk nomina *pertanian* yang bermakna 'hal, cara, perbuatan bertani'. Dari verba *bertani* pula dapat dibentuk nomina *petani* yang bermakna 'orang yang bekerja sebagai atau memiliki profesi sebagai petani'. Cara kerja pembentukan kata seperti itu terjadi juga pada kata *ternak* dan *dagang*.

Dari contoh-contoh itu kita dapat mengenali kaidah bahwa verba berafiks *ber-* menurunkan nomina berafiks *pe-* (tanpa nasal). Hal ini sering terlupakan dalam dunia pengajaran di sekolah. Orang biasanya hanya menyebutkan bahwa *petani* itu dibentuk dari kata asal *tani* dan prefiks *pe-* tanpa menjelaskan proses pembentukan verba dan nomina lainnya yang memiliki hubungan atau korespondensi.

Masih berkaitan dengan nomina yang menyatakan orang yang memiliki profesi sebagai

apa yang disebutkan pada verbanya, khususnya dalam bidang olahraga, di bawah ini ada contoh nomina tersebut yang disertai dengan deretan bentuk yang memiliki hubungan makna (paradigma).

- *tinju* → *bertinju* → *pertinjuan*
petinju
- *lari* → *berlari* → *perlarian*
pelari

Dari kata *tinju* terbentuk verba perbuatan *bertinju* dan nomina *pertinjuan* yang bermakna 'hal, cara, perbuatan bertinju' serta nomina *petinju* yang bermakna orang yang mempunyai profesi sebagai 'petinju'. Dari contoh itu dapat dikenali kaidah bahwa nomina yang menyatakan orang yang memiliki profesi sebagai apa yang disebutkan pada verbanya dibentuk dari verba yang berafiks *ber-* (bukan *meng-*). Dari kaidah itu orang membentuk kata baru, seperti *golf-bergolf-pergolfan-pegolf*; *boling-berboling-perbolingan-peboling*; *terjun-(payung)-beterjun-peterjunan-peterjun*. Bentuk ini dapat diterima (betul) selama bentuk verba yang menurunkan nomina itu berafiks *ber-* (*ber-golf, ber-boling, be-terjun*).

Bagaimana dengan nomina dari *anggar, sepak bola, dan voli*? Untuk mengetahui itu, kita perlu menampilkan deretan bentuk *main, bermain, permainan, dan pemain*. Perhatikan deretan bentuk berikut. (*Main*) *anggar-bermain anggar-permainan anggar-pemain anggar; sepak bola-bermain sepak bola-permainan sepak bola-pemain se-*

pak bola; dan voli-bermain voli-permainan voli-pemain voli.

Tampaknya pada jenis olahraga anggar, sepak bola, voli (juga bulu tangkis dan basket) orang lebih memilih bentuk *pemain + nama olahraga* daripada mengatakan *peanggar* atau *pesepak bola*. Persoalan timbul pada penyebutan pemain olahraga *menembak* dan *memanah* (*panahan*). Amati contoh berikut.

- *tembak* → *menembak* → *penembakan* → *penembak* atau *petembak*
- *panah* → *memanah* → *pemanahan* → *pemanah* atau *pepanah*

Kaidah yang berlaku menuntut kita pada pembentukan kata *penembak* dan *pemanah* karena berfiks *meng-* (*men, mem*). Namun, orang ingin membedakan *penembak* yang berarti pelaku penembakan (kejahatan) dengan *penembak* dalam arti pemain olahraga menembak dan *pemanah* dalam arti pemain olahraga panahan. Untuk itu, orang menggunakan bentuk *petembak*.

Ikhwal pembentukan kata perlu dicermati lagi sekalipun masalah bentuk kata bahasa Indonesia dianggap sudah mantap jika dibandingkan dengan kalimat. Cara penjelasan bentuk-bentuk seperti itu perlu mendapat perhatian, di samping dalam dunia pembelajaran bahasa Indonesia, juga dalam penyusunan kamus Bahasa Indonesia demi ketaatan asas kaidah, sebagaimana kita harapkan keteraturan Bahasa Indonesia sebagai cermin ketertiban perilaku bangsa Indonesia.

* Dr Dendy Sugono, Pengurus Himpunan Pembina Bahasa Indonesia.

ULASAN BAHASA

Patriarki, Kyriarki, dan Istilah Lain

Oleh
Dr. R. Kunjana
Rahardi M.Hum.

SAYA sering membaca tulisan Bapak tentang masalah sosial-budaya dan pendidikan di harian *Media Indonesia*. Saya juga senang dan terus mengikuti tulisan-tulisan di rubrik Ulasan Bahasa karena saya seorang mahasiswa S-2 Linguistik.

Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak: (1) Apakah maksud sebenarnya istilah budaya patriarki dan budaya *kyriarki* dalam wacana feminisme? (2) Dalam wacana feminisme ada ungkapan Jawa *swarga nunut, neraka katut*. Tolong Bapak jelaskan maksud istilah dan ungkapan di atas, baik dari perspektif linguistik maupun budaya!

Lalu, bagaimana ceritanya Bapak menekuni bidang-bidang lain di luar bahasa sedangkan Bapak sendiri pakar bahasa? Maaf, pertanyaan terakhir ini agak pribadi sifatnya.

Sebelum pengasuh jelaskan panjang lebar menyangkut istilah dan ungkapan yang Saudara tanyakan, pengasuh terlebih dahulu ingin menjawab pertanyaan terakhir. Sebenarnya ceritanya sederhana saja. Karena pengasuh secara akademis menekuni bidang bahasa sedangkan bahasa bersatu padu dengan budaya, maka keduanya pengasuh beri perhatian yang cukup.

Tulisan-tulisan yang muncul merupakan bagian dari tanggung jawab akademis dan konsekuensi logis bagi pengasuh yang telah memutuskan untuk menekuni kedua bidang itu. Tulisan pendidikan juga menjadi konsekuensi logis profesi kedosenan pengasuh. Tentu hal ini sama sekali bukan sebuah keistimewaan atau keanehan. Saudara pun bisa melakukan hal serupa kalau memang berminat dan tekun.

Dalam wacana feminisme, memang ada istilah budaya patriarki, budaya *kyriarki*, dan ungkapan klise *swarga nunut, neraka katut*. Ketika hal tersebut berdekatan dan berkaitan erat satu dengan lain. Begitu pun ungkapan klise bahasa Jawa *wanodya namung konco wingking*

juga tidak dapat dipisahkan dari istilah dan ungkapan itu.

Secara linguistik, istilah patriarki dapat dijelaskan asal-usul dan maknanya. Istilah itu berasal dari kata bahasa Latin. *Pater* artinya bapak dan *arche* artinya kekuasaan. Jadi, patriarki artinya kekuasaan bapak, kekuasaan lelaki atas kaum

perempuan. Dalam kekuasaan patriarkis, lelaki tidak hanya mendominasi, namun juga mengebawahkan, dan memarginalkan perempuan.

Dalam berbagai bidang kehidupan, lelaki dapat diibaratkan penjajah dan penjarah perempuan, baik dari sisi peran, status, seksualitas, dll. Kenyataan itu berlangsung lama, sepertinya telah terbakukan dalam masyarakat. Realitas itu membentuk budaya yang terpatikan dalam hidup keseharian masyarakat. Maka, budaya semacam itu dinamakan budaya patriarki atau budaya patriarkal.

Secara linguistik, *kyriarki* juga berasal dari bahasa Latin *kyrios* berarti tuan dan *arche* bermakna kekuasaan. Latar belakang istilah itu merupakan kelanjutan dari apa yang telah digambarkan di depan.

Dalam hidup bermasyarakat pun, seorang penguasa wilayah, pembesar daerah, perangkat desa, majikan rumah, pemimpin kelompok, yang umumnya diperankan kaum lelaki, juga cenderung mendominasi, memarginalkan, dan mengebawahkan perempuan. Budaya demikian disebut budaya *kyriarki* atau *kyriarkal*. Sebenarnya, pihak yang

menindas maupun pihak yang ditindas dalam budaya *kyriarkis* sama-sama tidak diuntungkan. Kedua belah pihak sering dianggap *the brother in the same misfortune*. Artinya, kedua belah pihak ibarat saudara-saudara yang sama-sama dirugikan.

Lalu, dalam budaya Jawa, realitas itu sejak zaman dahulu sangat kentara. Hal itu dekat dengan konsep kekuasaan *ke-agungbinatara-an* raja Jawa. Sang raja lazimnya adalah kaum le-

laki. Perempuan hampir-hampir tidak mendapatkan tempat dan peran yang wajar dalam masyarakat.

Ibaratnya perempuan masuk surga maupun neraka, lelaki lah penentunya. Ungkapan Jawa *swarga nunut, neraka katut*. Bertalian erat dengan hal itu adalah ungkapan *wanodya namung konco wingking*. Kodrat perempuan hanyalah teman belakang bagi lelaki. Tugas perempuan adalah memasak di dapur. Semua kenyataan patriarkis dan *kyriarkis* itulah yang didobrak gerakan feminisme yang mula pertamanya dirintis Raden Ajeng Kartini pada tahun 1899. ***

Media Indonesia, 4 September 2000

Pusat Bahasa Sebaiknya Jadi Lembaga Independen

Jakarta, Kompas

Pada masa mendatang masalah kebahasaan di Indonesia akan makin melibatkan kalangan masyarakat yang lebih luas dan dengan implikasi yang lebih kompleks. Oleh karena itu, posisi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Pusat Bahasa) sebaiknya menjadi lembaga nondepartemen yang independen, langsung berada di bawah Presiden.

Mantan Kepala Pusat Bahasa Prof Dr Amran Halim mengungkapkan hal ini ketika dihubungi *Kompas* di Palembang, Selasa (5/9). Ia dimintai pendapat sehubungan isu akan diintegrasikannya Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan yang selama ini berada di Departemen Pendidikan Nasional ke Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

Gagasan serupa juga datang dari Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI). Bahkan hari Selasa kemarin, Pengurus Pusat HPBI melayangkan surat kepada Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (Menneg-PAN) Ryaas Rasyid, berisikan harapan agar secara kelembagaan posisi Pusat Bahasa ditingkatkan statusnya menjadi lembaga nondepartemen guna mewujudkan peran sentral bahasa dalam pembangunan bangsa.

"Apabila Pusat Bahasa dipan-

dang belum waktunya untuk ditingkatkan statusnya, kami mohon agar lembaga yang menangani masalah kebahasaan tersebut tetap berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional," demikian antara lain bunyi surat Pengurus Pusat HPBI yang ditandatangani ketua umumnya Andi Mappi Sameng.

Menurut mantan Dirjen Pariwisata ini, usulan ini adalah suara para pakar, pemerhati, pencinta, dan masyarakat peminat bahasa dan sastra yang termuat dalam putusan Kongres Bahasa Indonesia (1993) maupun dalam putusan Seminar Politik Bahasa (1999). Usulan tersebut berupa permintaan agar Pusat Bahasa ditingkatkan statusnya menjadi lembaga nondepartemen dan langsung di bawah presiden.

Ketua Harian HPBI Dr Dendy Sugono yang dihubungi Selasa malam mengatakan, peran uta-

ma bahasa (Indonesia) pada hakikatnya sangat terkait dengan kehidupan dan kegiatan pendidikan serta upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan peran sentral itu, penanganannya perlu dilakukan secara lintas sektoral. "Oleh karena itu, sudah selayaknya bila Pusat Bahasa sebagai lembaga yang dibebani tugas menangani masalah kebahasaan di Tanah Air tidak lagi ditempatkan di bawah suatu departemen tertentu," kata Dendy Sugono.

Lincih bergerak

Menurut Amran Halim, posisi independen Pusat Bahasa itu penting bukan hanya berkaitan dengan kebijakan yang dibuatnya, tetapi juga menyangkut wewenang dan daya jangkauan yang lebih luas serta dapat meliputi semua departemen. "Pusat Bahasa akan lebih lincih bergerak jika menjadi lembaga yang nondepartemen, seperti LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia—Red) dan Perpustakaan Nasional. Selain itu, kalau berhubungan dengan suatu departemen dalam rangka pembinaan bahasa tidak harus membawa nama sebuah departemen," tambahnya.

Menurut Amran, saat ini yang harus dilakukan oleh Pusat

Bahasa adalah mempertegas dulu di mana posisinya, apakah bisa menjadi lembaga yang independen atau tetap di bawah sebuah departemen. Kalau Pusat Bahasa berada di bawah sebuah departemen, maka implikasinya adalah bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh Pusat Bahasa menjadi kebijakan departemen tersebut.

Kalau memang pilihannya harus berada di bawah sebuah departemen, tambah Amran, maka lebih baik Pusat Bahasa berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional daripada berada di bawah Departemen Pariwisata. Alasan Amran, pembinaan bahasa lebih terkait dengan masalah pendidikan yang memiliki masyarakat persekolahan. Selain itu, sumber daya manusia Departemen Pendidikan Nasional dinilai lebih mempunyai kedekatan dengan pembinaan bahasa.

Majelis pertimbangan

Langkah penting lain yang harus dilakukan oleh Pusat Bahasa adalah perbaikan intern organisasi. Menurut dia, Pusat Bahasa dapat membentuk sebuah badan semacam majelis pertimbangan bahasa. Anggota majelis ini harus mengikutsertakan orang-orang dari tokoh

media massa, tokoh agama, tokoh masyarakat, sosiolog, psikolog dan sebagainya.

"Kalau Pusat Bahasa membuat keputusan yang berkaitan dengan masalah bahasa di media massa, misalnya, maka Pusat Bahasa sudah mempunyai orang di bidang tersebut, sehingga Pusat Bahasa tidak bertindak seenaknya saja dalam menentukan bahasa yang akan digunakan," ujar Amran.

Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Amran mengharapkan agar Pusat Bahasa dapat memberikan sebagian kewenangannya ke daerah. Sebagai sebuah lembaga nasional, Pusat Bahasa dapat saja mempunyai jaringan di daerah yang tetap mempunyai hubungan koordinasi. Kalau tidak, dikhawatirkan muncul bahasa Indonesia versi DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera dan sebagainya.

"Katakanlah dalam kurikulum nasional untuk pelajaran Bahasa Indonesia, daerah dapat diberi kewenangan untuk memperluasnya. Kewenangan ini dapat saja berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung kebutuhan dan tingkat penguasaan bahasa Indonesia di suatu daerah," jelas Amran. (mam/ken)

ULASAN BAHASA

Oleh
Dr. R. Kunjana
Rahardi M.Hum.

Menyoal Kata Berafiks *PeN-* dan *Pe-*

Saudari Ermelinda Wea, Jakarta, lewat *e-mail* pengasuh menyoal kata-kata berikut: *perokok*, *pewaris*, *pelukis*, *petani*, *petinju*, *pejuang*. Kata-kata tersebut sebenarnya memiliki prefiks *pe-* ataukah *peN-*? Bagaimanakah caranya membedakan prefiks *pe-* dengan *peN-* jika keduanya sama-sama telah bergabung dengan bentuk dasar? Lalu, tolong dijelaskan perbedaan makna kata pada pasangan-pasangan berikut: *pesuruh-penyuruh*, *penatar-petatar*, *peninju-petinju*, *penugas-petugas*. Betulkah kalau saya mengatakan bahwa *pe-* dan *peN-* itu merupakan prefiks pembentuk benda?

Sdri Febrian Lumintang menyampaikan masalah yang serupa dengan pertanyaan terakhir. Kata *pesuruh* itu merujuk pada orang yang disuruh ataukah orang yang menyuruh? Tampaknya kata tersebut merujuk pada orang yang disuruh. Mohon penjelasan! Lalu, bahasa Latin dengan bahasa Yunani itu lebih tua yang mana? Apakah keduanya memang saling mempengaruhi?

Afiks *pe-* memang kadangkala membingungkan dan sulit dibedakan dengan afiks *peN-*. Sekilas, kata *pelukis* dan *pewarta* adalah kata-kata yang berafiks *pe-* dengan bentuk dasar *lukis* dan *warta*. Demikian pula kata *perokok*, *pewaris*, *pelamar*, *pewarta* seperti halnya semua berafiks *pe-*.

Ada dua pegangan yang sebenarnya dapat digunakan manakala kita ingin memastikan apakah sebuah kata berafiks *pe-* ataukah *peN-*. Pertama, adanya kenyataan linguistik bahwa *N-* pada afiks *peN-* lenyap apabila bergabung dengan bentuk dasar berfonem awal /l, r, y, w/ seperti pada *pelapor*, *pewaris*, *pewarta*, *peyakin*. Jadi, kendati seolah-olah berafiks *pe-*, kata-kata itu sebenarnya berafiks *peN-*.

Kedua, munculnya kenyataan linguistik bahwa kata berafiks *peN-* memiliki pertalian erat dengan kata kerja berafiks *meN-*, sedangkan kata berafiks *pe-* bertalian erat dengan verba berafiks *ber-*. Jadi, kata-kata tersebut bisa dicoba satu demi satu untuk memastikan apakah berdekatan dengan kata kerja berafiks *meN-* ataukah *ber-*.

Kata *perokok* bertalian erat dengan verba *merokok* dan sama sekali tidak berdekatan dengan kata

berokok (kalau ada). Kata *pejuang* bertalian dengan kata kerja *berjuang* dan tidak bertalian dengan kata *mejuang* (kalau ada). Jadi, jelas, kata *perokok* dan kata *pejuang*, sekalipun tampaknya sama karena sama-sama berunsur *pe-* di bagian awalnya, sebenarnya tidaklah sama. Kata *perokok* jelas berafiks *peN-*, sedangkan kata *pejuang* berafiks *pe-*.

Dengan menerapkan kedua pedoman tadi, dengan gampang Saudari akan dapat menentukan apakah kata *pewaris*, *pelukis*, *petani*, *petinju* berafiks *peN-* ataukah *pe-*. Memang ada sementara linguis yang tidak sependapat dengan cara ini namun, menurut pengasuh, pegangan-pegangan itu praktis sekaligus bisa dipertanggungjawabkan secara linguistik.

Lalu, pasangan-pasangan kata yang Saudari sampaikan di atas memang berbeda maknanya. Kata *pesuruh* menunjuk kepada orang yang disuruh. Kata *penyuruh* menunjuk pada orang yang menyuruh atau orang yang pekerjaannya menyuruh. Kata *penatar* menunjuk pada orang yang menatar atau orang yang pekerjaannya menatar, sedangkan *petatar* artinya orang yang ditatar. Kata *peninju* artinya orang yang meninju, sedangkan *petinju* artinya orang yang bertinju atau orang yang pekerjaannya bertinju.

Dengan cara yang sama silakan Saudari bedakan makna *penugas* dan *petugas*. Agar lebih paham, silakan dicari pasangan-pasangan kata yang lain terus bedakan maknanya dengan cara yang sama. Uraian ini juga sekaligus dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan Saudari Febrian Lumintang. Saudari sudah betul mengatakan bahwa kata *pesuruh* lebih merujuk pada orang yang disuruh, bukan pada orang yang menyuruh.

Pengasuh juga sependapat dengan Saudari Ermelinda Wea yang berpendapat bahwa fungsi afiks *pe-* dan *peN-* adalah pembentuk benda. Namun di samping pembentuk nomina, afiks *pe-* dan *peN-* juga berfungsi sebagai pembentuk ajektiva. Untuk yang terakhir ini jumlahnya memang sangat terbatas, misalnya kata *pendiam* dalam kalimat *Mahasiswi itu cantik namun pendiam*.

Kata *pemalas* dalam kalimat *Anaknya tidak lulus ujian masuk PTN karena ia pemalas*.

Lalu, bahasa Yunani dan bahasa Latin memang keduanya saling mempengaruhi. Sebab keduanya berada pada rumpun bahasa yang sama, Indo-Eropa atau Indo-German. Namun cukup sulit diketahui bahasa mana yang lebih tua karena bahasa Yunani terbagi dalam tiga kelompok perkembangan, yakni Kuno, Pertengahan, dan Modern.

Bahasa Latin sebagian dari kelompok bahasa-bahasa Italia yang kini sudah tidak dipakai lagi. Secara umum dan gampang bahasa Yunani memang dianggap lebih tua daripada bahasa Latin. Namun, sebuah kata mesti dicermati dahulu dari kelompok perkembangan bahasa Yunani atau bahasa Latin yang mana asal-usulnya. Dan, untuk masalah yang seperti itu penelitian berancangan linguistik historis-komparatif akan dapat menemukan jawabnya yang pasti.

Media Indonesia, 23 September 2000

BAHASA

Presiden Ber-"Saya" atau Ber-"Kami"?

SAMPAI saat Marsillam Si-manjuntak membacakan jawaban Presiden atas pertanyaan fraksi-fraksi MPR di dalam sidang hari Rabu, 9 Agustus 2000, Presiden Abdurrahman Wahid banyak menggunakan persona "saya". Ada kesan penggunaan kata ganti orang pertama tunggal ini menunjukkan diri Presiden sebagai penguasa tunggal negeri ini.

Secara logika memang bisa dipahami kenyataan bahwa Presiden adalah orang yang menyampaikan tanggung jawab dirinya sebagai kepala pemerintahan. Akan tetapi, harus diingat bahwa ia melaksanakan tugasnya tidak sendirian. Di samping adanya Wakil Presiden, di bawahnya ada sejumlah menteri yang melaksanakan pemerintahan.

Sebagai pribadi yang tunggal ia pantas-pantas saja menggunakan persona "saya" atau bahkan "aku", lebih-lebih di dalam situasi tidak formal. Akan tetapi, di dalam forum resmi seperti sidang-sidang DPR atau MPR penggunaan kata ganti orang pertama tunggal "saya" dan "aku" tidaklah tepat. Sebagai pribadi yang mewakili dirinya dan orang-orang yang menjalankan roda pemerintahan seyogianya ia menggunakan kata ganti "kami".

BAHASA Indonesia mengenal apa yang disebut *pluralis majestatis*, yakni penggunaan kata ganti orang pertama jamak "kami" untuk orang pertama tunggal. Lalu, siapa yang berhak menggunakannya? Tentu saja tidak semua pemakai bahasa dapat memakainya dalam bertu-

ataupun menyampaikan gagasannya secara tertulis. Yang dapat menggunakannya ialah kepala negara (presiden atau raja) dan penulis/pengarang.

Penggunaan persona jamak "kami" oleh presiden dan raja dipandang sebagai kehormatan berhubung dengan kedudukannya sebagai kepala pemerintahan. Bagaimana halnya dengan seorang penulis? Terhadap penulis pun predikat kehormatan ini dapat diterapkan karena kemampuannya menulis yang tidak semua orang bisa melakukannya, yang menjadikannya memiliki kepribadian yang menonjol. Kepandaian merangkai kata untuk membentuk opini yang besar pengaruhnya ke-

pada pembentukan visi pembaca itulah yang menjadikan salah satu tolok ukur sehingga orang hormat kepadanya. Penggunaan "kami" untuk diri sang penulis dipandang sebagai kewajaran karena masyarakat pembaca merasa terwakili.

Berdasarkan kenyataan itu, jika seorang kepala negara dan seorang penulis menggunakan persona "saya", faktor masyarakat (rakyat, pembaca) cenderung dikesampingkan. Dengan

demikian, penggunaan "kami" oleh mereka bukan hanya sebagai pernyataan kehormatan, melainkan juga menyangkut fungsi yang bersangkutan sebagai "juru bicara" atau sebagai "penyambung lidah"—meminjam istilah yang dipakai Bung Karno—rakyat.

PENGUNAAN kata "kami" oleh Presiden di samping menunjukkan kehormatan pemimpin bangsa, juga melambangkan kedewitunggalannya dengan Wakil Presiden yang mendampingi di dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Betapa tidak? Karena apa yang diucapkan/ditulis di dalam pidatonya sekurang-kurangnya adalah hasil pemikiran keduanya.

Penggunaan kata "saya" ketika sekretaris kabinet membacakan pidato Presiden, yang ada kesan seolah-olah Wakil Presiden *ngambek*, sedikit banyak menunjukkan bahwa naskah pidato itu adalah garapan Presiden sendiri.*

♦ Dr Kunardi Hardjoprawiro, staf pengajar Fakultas Sastra Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo.

Kompas, 23 September 2000

ULASAN BAHASA

Ihwal Kata-kata Fatis

Oleh
Dr. R. Kunjana
Rahardi M.Hum.

Saudara Dede Krisnadeta, staf redaksi di sebuah media cetak, menyampaikan pertanyaan menyangkut kategorisasi kata. Menurutny, hampir semua ahli bahasa tidak (belum) pernah memperhatikan realitas pemakaian kata-kata seperti *kek, deh, dong, toh, sih, nah, ding, lho*, dll. yang berkembang dalam pemakaian bahasa keseharian. Buktinya, kata-kata itu tidak (belum) pernah dimasukkan dalam kategori kata. Bisakah kata-kata tersebut digolongkan ke dalam kategori kata tertentu? Kalau bisa, apakah dapat dijelaskan makna dan fungsi dari kata-kata di atas?

Pertama perlu pengasuh jelaskan dulu sejarahnya. Dalam linguistik, tercatat tidak kurang dari dua puluh ahli bahasa telah berusaha membuat pengelompokan kata dan boleh dikatakan berbeda-beda hasilnya. Pengelompokan yang dilakukan pada masa tertentu juga berbeda dengan masa yang lainnya. Jadi tidak benar kalau dikatakan para ahli bahasa tidak (belum) pernah memperhatikan pemakaian kata-kata tertentu.

Mungkin kata seperti *kek, deh, dong, toh, sih, nah, ding, lho* belum dicermati pada masa perkembangan tata bahasa pedagogis. Melayu, atau bahkan masa tata bahasa standar Indonesia-Malaysia sekalipun.

Ketika itu, para ahli bahasa cenderung masih mempelajari dan meneliti bahasa secara tradisional. Dasarancangan penelitian mereka pun masih tradisional. Sementara kata-kata yang Saudara sampaikan di atas cenderung muncul dalam konteks pragmatis yang baru muncut belakangan ini.

Kata-kata tersebut dapat dikelompokkan dalam kategori fatis. Konsep fatis itu sendiri sebenarnya juga masih relatif baru karena baru muncul pada tahun 1920-an, yakni setelah Malinowski menyampaikan konsep *phatic communion*.

Kata-kata fatis lazimnya digunakan dalam ragam lisan yang berciri nonstandar, yang muncul dalam dialek-dialek regional. Oleh karenanya kata fatis banyak ditemukan di dalam dialek regional

dan tuturan kedaerahan. Adapun fungsi utama kata-kata fatis adalah untuk memulai, mengukuhkan, dan memperlancar interaksi.

Kata fatis *kek* bisa berfungsi sebagai pemerinci informasi dan penegas perintah dalam komunikasi. Contoh, *Yang pergi gue kek apa elu kek tidak ada bedanya* dan dalam tuturan *Cepetan kek tilpunnya, ngomongin apa aja sih!*

Kata fatis *deh* dapat berfungsi sebagai pemberi tanda persetujuan dan penanda bujukan. Contoh, *Oke deh kalau kamu memang mau ikut ke Jakarta besok pagi* dan dalam tuturan *Minum deh obatnya biar lekas sembuh!*

Kata *dong* bisa berfungsi sebagai penegas maksud tuturan dan penghalus perintah. Contoh, *Ya jelas sekali dong kalau memang begitu* dan tuturan *Bagi-bagi dong duitnya!*

Kata fatis *toh* bisa berfungsi sebagai penguat maksud tuturan, seperti pada *Saya toh tidak ikut terlibat dalam korupsi uang proyek itu*. Kadangkala, kata fatis *toh* bisa disamakan dengan *tetapi* atau *namun*. Contoh, *Biarpun berkali-kali terjatuh toh petinju itu berusaha bangkit dan menerjang terus*.

Kata fatis *sih* dapat menegaskan maksud tuturan, seperti pada *Siapa sih namanya cewek yang ketawa-ketawa terus di halaman itu?* Kadangkala, kata fatis *sih* juga bisa menggantikan kata *memang*. Misalnya, *Cantik sih cantik, tetapi angkuhnya itu lho yang tidak ketulungan*.

Kata *nah* bisa berfungsi sebagai pengalih fokus pembicaraan dalam komunikasi. Misalnya, *Nah, sekarang kita lihat dulu gambar yang kedua ini!*

Kata fatis *ding* bisa berfungsi sebagai tanda penyangkalan maksud tuturan. Contoh, *Tidak ding, semua itu dilakukan atas perintah penjahat itu*. Kata fatis ini kadangkala digunakan untuk mengoreksi tuturan sebelumnya, misal *Ndak ding, yang mengambil uang itu bukan adik tetapi saya*.

Kata *fatis*/*ho* dapat berfungsi sebagai penanda kekaguman, misalnya *Lho, kamu kok sudah gede amat!*

Ungkapan *fatis* sebenarnya banyak sekali bisa ditemukan dalam bahasa keseharian. Kita sering menemukan *dengan hormat, wassalam, selamat jalan, sampai jumpa, hallo, apa kabar*, dll. Ungkapan itu semuanya berciri *fatis* yang lazim muncul dalam konteks interaksi atau komunikasi. Kadangkala ungkapan *fatis* maknanya tidak cukup jelas, namun fungsinya amat jelas. Ungkapan *fatis* berciri komunikatif, bukan berciri emotif. Ciri komunikatif itulah yang menjadi pembeda ungkapan *fatis* dengan ungkapan interjektif yang lazimnya berciri emotif itu.

Media Indonesia, 25 September 2000

Yahya A Muhaimin: Bahasa Menunjukkan Peradaban

Jakarta, Kompas

Penguasaan bahasa dapat menunjukkan tingkat peradaban dan tingkat budaya manusia. Sayangnya, bahasa Indonesia masih harus berjuang merebut hati para penuturnya sendiri.

"Apalagi para penutur bahasa Indonesia saat ini cenderung semakin hilang rasa kebanggaannya menggunakan bahasa Indonesia," kata Menteri Pendidikan Nasional Yahya A Muhaimin pada Seminar Nasional X Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI), di Jakarta, Rabu (27/9).

Kalau bahasa yang dipakai amburadul dan kasar, demikian Yahya, orang lain dapat menganggap si penuturnya sebagai orang yang tidak tahu *unggah-ungguh* (tata krama). "Labelisasi seperti ini merupakan sanksi sosial yang berat, terutama dalam masya-

rakat Jawa," tambahnya.

Menurut Yahya, peran bahasa yang paling penting adalah sebagai alat komunikasi. Dengan bahasa manusia akan mendapat kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Penguasaan bahasa yang baik akan membantu dalam mengungkapkan pikiran, sehingga maksudnya dapat dipahami.

Sayangnya, menurut Yahya, usaha Pusat Bahasa belum

maksimal dan jarang ada rekomendasi terhadap berbagai perkembangan bahasa. Padahal, perkembangan bahasa itu terjadi sangat cepat dan membutuhkan perhatian besar. "Salah satu kesedihan saya adalah perkembangan bahasa yang digunakan dalam tayangan televisi. Penggunaan bahasanya sering campur aduk dan jarang memperhatikan aturan dan rasa bahasa," ujarnya. (mam)

Kompas, 28 September 2000

Mutu Daya Ungkap Bahasa Indonesia Masih Harus Ditingkatkan

Jakarta, Kompas

Jika tidak ingin tenggelam atau bahkan digilas arus kehidupan global, bahasa Indonesia sebagai media ungkap bangsa Indonesia harus bisa mengembangkan diri. Namun, tantangan besar yang dihadapi justru adalah bagaimana menjadikan bahasa Indonesia memiliki kemampuan sebagai alat komunikasi dan ekspresi kehidupan modern.

"Ini berarti kita harus mampu meningkatkan mutu daya ungkap bahasa Indonesia," kata Dr Dendy Sugono, Ketua Pelaksana Harian Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI), dalam percakapan dengan *Kompas* di Jakarta, Selasa (26/9).

Ia dihubungi berkaitan penyelenggaraan Musyawarah dan Seminar Nasional X HPBI di Jakarta, 27-29 September 2000. Seminar yang antara lain menghadirkan Prof Dr Nurchohli Madjid itu dijadwalkan dibuka pagi ini oleh Menteri

Pendidikan Nasional Yahya A Muhaimin.

Dalam perbincangan sebelumnya Dendy berharap, jika era pasar bebas nanti benar-benar terjadi, idealnya bahasa Indonesia tetap memegang peran penting dalam kegiatan perdagangan di negeri ini. Akan tetapi harapan ini tampaknya menghadapi tantangan berat,

terutama dari bahasa Inggris yang diperkirakan akan mendominasi bahasa perdagangan internasional, termasuk di Indonesia.

Kosakata dan istilah

Baik secara pribadi maupun sebagai orang yang berkecimpung di bidang kebahasaan, Dendy mengaku cukup khawatir terhadap derasnya kosakata dan peristilahan asing yang masuk ke Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Di satu sisi kosakata dan istilah-istilah asing itu memang bisa dikatakan ikut memperkaya khazanah bahasa Indonesia. Akan tetapi, di sisi lain tidak sedikit yang sifatnya merusak, karena kosakata atau istilah asing itu diambil begitu saja tanpa proses penyesuaian dengan kaidah yang berlaku.

"Terhadap kosakata atau istilah yang berkaitan dengan

masalah iptek, mungkin masih bisa diterima karena untuk hal-hal tertentu kerap tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Namun, terhadap kosakata atau istilah-istilah bidang

sosial-budaya yang menyangkut kehidupan lokal, mengapa harus menggunakan istilah asing kalau ada padanannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah," kata Dendy mengungkapkan kegelisahan-nya.

Oleh karena itu, tugas berat yang dihadapi dalam kegiatan pengembangan bahasa Indonesia adalah percepatan pemerikayaan kosakata dan istilah. Dengan kata lain, mutu daya ungkap bahasa Indonesia seharusnya bisa mengikuti perkembangan kehidupan modern. Menghadapi tantangan besar ini, langkah konkret yang perlu segera dipacu tidak lain dengan memperkaya kosakata dan peristilahan bahasa Indonesia.

Dalam hal peristilahan—terutama di bidang ilmu—memang harus diakui jumlah istilah bahasa Indonesia masih sangat kurang, lebih-lebih bila

dibandingkan dengan bahasa Inggris. Upaya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa melibatkan para pakar dari berbagai disiplin ilmu hingga sejauh ini baru mengumpulkan sekitar 80.000 istilah. Dari yang sudah ada itu pun masih banyak yang belum dikenal oleh pakar-pakar di bidang ilmu bersangkutan, mengingat proses penerbitan dan penyebarluasannya masih dihadap berbagai kendala. Akibatnya, pakar di bidang ilmu bersangkutan lalu mengambilnya dari bahasa asing.

Proses adaptasi

Membanjirnya kosakata dan istilah asing di era pasar bebas nanti, demikian kepala Bidang Perkamus dan Peristilahan pada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ini, memang merupakan konsekuensi logis yang harus dihadapi oleh

bahasa Indonesia. Akan tetapi perlu diingat, masuknya kosakata dan istilah-istilah asing itu hendaknya tetap melalui proses penyesuaian.

Jika suatu istilah asing masuk, maka istilah itu mesti dicari padanan katanya dalam bahasa Nusantara (baca: bahasa-bahasa daerah). Jika dalam bahasa Nusantara ternyata tidak ditemukan padanannya, baru istilah asing itu dipungut dengan melalui tata cara pembentukan istilah dalam bahasa Indonesia.

"Kita bukan alergi terhadap kosakata atau istilah asing, tetapi kalau begitu banyak kosakata atau istilah dari bahasa asing masuk begitu saja tanpa proses adaptasi, bukan tidak mungkin suatu saat kelak bahasa Indonesia akan kehilangan perannya bagi bangsa ini. Lalu di mana lagi kebanggaan kita sebagai bangsa?" (mam/ken)

Kompas, 27 September 2000

Tinggal Bahasa Indonesia yang Tersisa Sebagai Perekat Bangsa

◆ Ragam Lisan Perlu Dibakukan

Jakarta, Kompas

Di tengah arus globalisasi saat ini, hanya bahasa Indonesia yang masih tersisa sebagai perekat bangsa. Sementara keutuhan satu nusa sekarang sedang digoyang, sedangkan satu bangsa mulai digugat kesahihannya dengan munculnya keinginan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal ini diungkapkan peminat dan pemerhati bahasa Indonesia Prof Dr Mien A Rifai dalam Seminar Nasional X Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI), di Jakarta, Rabu (27/9). Pada hari pertama seminar yang dibuka Menteri Pendidikan Nasional Yahya A Muhaimin itu juga tampil Kepala Pusat Bahasa Dr Hasan Alwi.

"Ketika terjadi kekacauan dan keguncangan seperti sekarang, ternyata 'satu bahasa' masih dapat dijadikan penyelamat kapal kita yang akan karam," kata Rifai yang sehari-hari bekerja pada Herbarium Bogoriense Pultitbang Biologi LIPI di Bogor.

Menurut Mien A Rifai, terjadinya globalisasi yang dialami Indonesia sebenarnya bersamaan waktunya dengan proses pelokalan. Proses pelokalan yang terjadi itu lebih menekankan pada rekontekstualisasi kesadaran kebangsaan yang sering dinyatakan dengan jargon dan ungkapan ideologi serta budaya setempat.

"Akibatnya, ketegangan sosial dan politik muncul di ma-

na-mana dan gagasan kemandirian daerah muncul lagi ke permukaan. Belum lagi didorong oleh berbagai ketidakpuasan di masa lalu," katanya.

Rifai menilai, pengintegrasian Indonesia dengan kegiatan internasional telah memunculkan kesadaran pencarian jati diri unsur-unsur etnik. Akan tetapi, perlu diwaspadai, dalam jangka panjang kesadaran pencarian jati diri ini justru dapat memperlemah kohesifan Republik Indonesia. "Kesadaran lokal seperti ini baik, tetapi jangan sampai kebablasan," katanya.

Pembakuan

Pada bagian lain Mien Rifai mengungkapkan, saat ini bahasa Indonesia perlu bebenah diri untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kalau selama ini perhatian upaya pembakuan baru ditekankan pada ragam bahasa Indonesia tulis, maka kini sudah waktunya untuk segera memikirkan pembakuan ragam bahasa Indonesia lisan. Gagasan ini dinilai semakin perlu diwujudkan,

terutama karena dari pemantauan sepintas terlihat bahwa bahasa yang dipakai dalam komunikasi Internet, meskipun bergaya lisan yang penuh canda, namun dianggap pemakainya sangat komunikatif.

Menurut Rifai, pembakuan ragam bahasa Indonesia lisan perlu dilakukan berkaitan dengan program peningkatan mutu dan daya ungkap bahasa Indonesia. Selama ini program tersebut dirasakan lebih mementingkan dorongan pasokan (*supply push*) saja karena belum memperhatikan pembinaan pengguna bahasa itu sendiri secara bersistem.

Meski ia tetap menghargai kebijakan Pusat Bahasa bersama mitra kerjanya untuk membakukan tata bahasa ragam bahasa Indonesia tulis, memekarkan kosakata, memperkaya peristilahan, menggalang kreativitas sastrawan dan kalangan pers—karena kebijakan ini diyakini akan mempunyai dampak yang meluas dalam jangka panjang—, namun kebijakan ini dinilai kurang dimengerti oleh masyarakat ramai. "Bahkan para penggaris kebijakan dan pengambil keputusan di Indonesia juga tidak mengerti, sehingga upaya peningkatan status pranata lembaga yang mengatur bahasa nasional itu tidak pernah ditanggapi secara sungguh-sungguh.

Dalam pandangan Rifai, para penutur bahasa Indonesia masih menampakkan kemen-

duaan antara perilaku dan ketidakfasihan sikap. Secara umum mereka terkesan sangat mengampangkan dan menyepelekan penguasaan bahasa Indonesia. Tidak heran kalau para penutur tidak mengetahui perbedaan antara ragam bahasa Indonesia lisan dan ragam bahasa Indonesia tulisan yang sebetulnya berbeda seperti langit dan bumi.

Di sisi lain, karena sejak semula tidak pernah "dipaksa" menulis, kebanyakan penutur itu lalu tidak merasa kekurangan pada bahasa Indonesia yang mereka coba kuasai. Tidak heran bila selama ini tidak pernah ada tuntutan dari mereka untuk menyempurnakan bahasa Indonesia. Rifai melihat, sifat permisif yang mengungkung itulah yang menyebabkan mereka memakai bahasa seenaknya, karena mungkin mereka berpikir, dengan menggunakan bahasa pasaran pun mereka sudah dapat maju.

"Orang lalu tidak pernah merasa malu berbicara kalau mereka salah dalam berbahasa Indonesia, karena memang tidak ada sanksi sosial atau hukuman untuk dosanya itu. Anehnya, pada saat yang sama mereka tidak berani alias mereka merasa malu berbicara bahasa Inggris jika penguasaan bahasa Inggrisnya lemah," ujarnya seraya mengingatkan, "Ketidakpedulian seperti inilah yang menjadi hambatan besar upaya untuk mencendekiakan bahasa Indonesia." (mam)

Kompas, 28 September 2000

Mendiknas Prihatinkan Kosakata Asing

"Penyerapan kosakata asing tanpa proses pengindonesiaan harus segera dikendalikan".

JAKARTA — Indonesia ternyata belum siap menyediakan kosakata bahasa Indonesia buat mengadaptasi kosakata asing yang masuk. Akibatnya, banyak kosakata asing yang diserap begitu saja oleh pengguna bahasa, yang memang mempunyai mental lebih suka menggunakan kosakata asing.

Karena itulah, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Yahya Muhaimin meminta perhatian kepada kalangan pembina bahasa, agar sesegera mungkin menyiapkan kosakata bahasa Indonesia sebagai padanan dari kosakata asing itu. Mendiknas mengutarakan pengharapannya itu ketika membuka "Seminar Nasional X Bahasa dan Sastra Indonesia dan Musyawarah Nasional VIII Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI)", di Pusat Bahasa di Rawamangun, Jakarta, Rabu (27/9).

Seminar dan Musyawarah akan berlangsung hingga 30 September. Menteri Yahya mengatakan bangsa Indonesia tak mungkin meninggalkan budaya dan bahasanya. Karena sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia selama ini terbukti sebagai bahasa pemersatu.

Ketua I Pengurus Pusat HPBI, Dr Dendy Sugono, mengakui, kekhawatiran Yahya merupakan kekhawatiran bersama. Karenanya, kata Dendy, seminar bahasa kali ini menitikberatkan pada dua persoalan, yaitu pengembangan kosakata dan tabiat masyarakat penutur/pengguna.

"Jika penyediaan kosakata Indonesia tidak dipercepat, kita akan kebanjiran kosakata asing yang dipakai begitu saja. Akibatnya, kita bisa kehilangan warna budaya kita sendiri, karena pemakaian kosakata asing itu tanpa melalui proses penyerapan ke bahasa Indonesia," ujar Dendy kepada *Republika*.

Pemerhati bahasa Indonesia, Mien A. Rivai dari Puslitbang Biologi-LIPI, menegaskan, penyerapan kosakata asing tanpa melalui proses pengindonesiaan harus segera dikendalikan. "Jika tidak, kita akan semakin kehilangan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia," tegas Rivai yang bicara di sesi pertama seminar bahasa itu.

Membanjirnya kosakata asing, kata Rivai, terjadi karena pesatnya perkembangan teknologi informasi. Rivai lantas menyebut beberapa kosakata yang dipakai begitu

saja tanpa proses pengindonesiaan. Ada *keyboard*, *mouse*, *down-load*, *up-load*, *ngehang*, *memory*, *play station*, *email*, *www*.

Dalam aktivitas *chatting* pun, masyarakat penutur mempunyai kebiasaan mengganggalkan penggunaan bahasa Indonesia.

"Mereka begitu mudah menggunakan bahasa Indonesia secara salah. Mereka tak malu-malu lagi melakukan hal itu. Padahal, mereka begitu malu jika salah menggunakan bahasa Inggris," tukas Rivai.

Kebiasaan bertutur secara salah dalam menggunakan bahasa Indonesia, kata Rivai, terjadi karena tiadanya pelajaran mengarang selama ini. Yang ada sering sekali berupa kegiatan pembuatan laporan dalam penataran P4 dengan petunjuk pelaksanaan begitu kaku.

Akibatnya hal ini mempengaruhi pola pikir sejak di se-

kolah menengah hingga tingkat doktoral. "Pola pikirnya terstruktur secara hitam-putih, sehingga penggunaan bahasa begitu kaku. Karena itu diperlukan lagi pelajaran mengarang, sehingga seseorang mempunyai alternatif cara pengungkapan melalui bahasa," ujar Rivai. Depdiknas sendiri, kata Mendiknas, mulai tahun ajaran 2001/2002, akan memberlakukan kembali kegiatan mengarang pada mata pelajaran bahasa di sekolah-sekolah.

Dalam hal ini, kata Rivai, upaya pengembangan bahasa Indonesia juga harus mencakup bahasa tulis dan lisan. Selama ini, pembakuan baru ada pada bahasa tulis, karenanya, pembakuan pada bahasa lisan juga perlu segera dilakukan. ■ pry

Republika, 28 September 2000

Upaya Mengangkat Harkat Bahasa Indonesia Masih Bukan Pekerjaan Mudah

Kegelisahan tentang perkembangan bahasa Indonesia tampaknya hanya milik para pembina Bahasa Indonesia saja. Sebab, kelatihan menggunakan bahasa Indonesia secara serampangan tetap terus berlangsung, kendati para pembina bahasa terus berupaya membakukan ragam Bahasa Indonesia tulis.

Tampaknya pembakuan pada ragam bahasa tulis tak menyentuh ragam bahasa lisan. Karenanya, masyarakat penutur pun tetap menggunakan Bahasa Indonesia Lisan secara serampangan.

Kegelisahan penggunaan bahasa serampangan ini telah muncul beberapa tahun lalu, ketika radio siaran swasta begitu getol menggunakan bahasa campuran. Demikian juga, ketika televisi swasta mulai marak, penggunaan bahasa oleh penyiar muda pun tak menunjukkan kebakuan. Kini, penggunaan Bahasa Indonesia semakin terkacaukan oleh kehadiran teknologi informasi.

Komunikasi melalui internet, kata pengamat Bahasa Indonesia Mien A. Rivali, dilakukan dengan tanpa rekaman tertulis, melainkan berupa rekaman elektronik, dan menggunakan bahasa tulis gaya lisan. Kegiatan bincang-bincang melalui internet (*chatting*), meski memakai bahasa tulis, toh bahasa yang digunakan adalah bahasa lisan. Meski kalimat yang disusun tak memenuhi kaidah Bahasa Indonesia, kata Rivali, banyak pengguna internet yang menganggap bahasa yang mereka gunakan begitu komunikatif.

Perkembangan teknologi informasi ini, kata Rivali yang peneliti di Puslit-

bang Biologi-LIPI ini, telah menyebar banyak kosakata asing yang belum dibuatkan padanannya dalam Bahasa Indonesia. Yang terjadi di lingkungan para pengguna teknologi ini — yang kemudian mengimbas kepada masyarakat luas — adalah pemakaian kosakata asli dari bahasa asing itu.

Meski di satu sisi, penggunaan kosakata asing itu dapat menolong pemakainya untuk kian terlatih mengucapkan kosakata asing, tapi di sisi lain, hal ini menunjukkan kerendah-dirian bangsa Indonesia. "Ini merupakan indikasi bangsa Indonesia masih terjajah secara budaya," ujar pakar komunikasi budaya Universitas Padjadjaran Bandung, Dr Deddy Mulyana, suatu ketika.

Dalam posisi seperti ini, kata Deddy, bahasa menjadi simbol kesewenang-wenangan. Jika pelanggaran penggunaan bahasa secara kacau itu terus dibiarkan, maka keadaannya akan terus berlanjut terus. Dalam bahasa Rivali, "Sifat *permissive* yang mengungkungnya menyebabkan mereka memakai bahasa seenaknya, sebab dengan menggunakan bahasa pasaran pun mereka merasa sudah dapat maju di dunia."

Akibatnya, kata Kepala Bidang Perkamusan dan Peristilahan, Pusat Bahasa, Depdiknas, Dendy Sugono, kebanggaan terhadap bahasa Indonesia kian terkikis. "Memang semuanya bergantung pada masyarakat penutur. Meski kosakata Bahasa Indonesia disediakan, sekalipun masyarakat penutur enggan memakainya, ya, kita mau apa lagi," tukas Dendy yang juga Ketua I Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI) itu.

Rivali melihat, lemahnya semangat

masyarakat penutur menggunakan kosakata Indonesia, terjadi karena kurangnya pembinaan terhadap masyarakat penutur. "Program peningkatan mutu dan daya ungkap Bahasa Indonesia yang dilakukan selama ini dirasakan lebih mementingkan dorongan pasokan (*supply push*) karena belum memperhatikan pembinaan pengguna bahasa itu sendiri secara bersistem," ujar Rivali.

Upaya para pembina bahasa dalam membuat kosakata, memekarkan kosakata, memperkaya peristilahan, dinilai Rivali belum dipahami, tak hanya oleh masyarakat penutur, tapi juga belum dipahami oleh pembuat kebijakan. Di Pusat Bahasa sendiri, kini tercatat ada 70 ribu istilah dan 150 ribu istilah teknis keilmuan — sebanyak 30 istilah teknis keilmuan sudah didefinisikan. Sehingga istilah yang sudah didefinisikan ada 100 istilah.

Masyarakat penutur, kata Rivali, memang tak mau peduli terhadap jerih payah para pembina bahasa. "Ketidakpedulian ini memang merupakan salah satu kendala besar yang dihadapi cendekiawan Bahasa Indonesia, sehingga setiap penyempurnaan yang dikeluarkan pihak berwenang sering dianggap mengada-ada, berlebihan, atau malahan dituduh sengaja mempersulit," kata Rivali. "tutunya."

Kondisi ini kian parah karena minimnya kegiatan *public relations* untuk mendifusikan, menyebarkan, memasyarakatkan, dan memasarkan pelbagai kemudahan yang telah disediakan dengan jerih payah dan biaya mahal tadi. Begitu menurut Rivali.

■ priyantono oemar

Bahasa Dapat Persatukan Bangsa

Sumpah Pemuda Jadi Bukti

JAKARTA (Media): Dalam kondisi negara yang sedang tidak menentu, ungkapan 'satu bahasa' dapat dijadikan *island of stability* untuk menyelamatkan kapal yang akan karam.

Ketua Herbarium Bogoriensis Puslitbang Biologi Prof Dr Mien A Rifai mengatakan sejarah masa lalu sudah membuktikan bahwa Bahasa Indonesia pernah menjadi pemersatu bangsa. "Sumpah Pemuda 1928 bukan ikrar yang hampa. Tapi akhir-akhir ini hakikat itu mulai memudar alias luntur karena kurang dihayati sebagai landasan falsafah," katanya dalam Seminar Nasional X Bahasa dan Sastra yang diadakan oleh Himpunan Pembina Bahasa Indonesia di Jakarta, 27-30 September 2000.

Rifai mengatakan jika makna tekad 'satu nusa' sedang digoyang, arti 'satu bangsa' tengah dipertanyakan, maka ungkapan 'satu bahasa' merupakan realitas yang masih hidup, makin kukuh, dan dapat terus dimapankan kemantapannya.

Bahasa Indonesia, lanjutnya, sebenarnya bisa lebih menguntungkan perkembangannya di masa depan dibandingkan dengan bahasa Inggris. Menurut mantan asisten menteri negara riset dan teknologi bidang riset dan pengembangan ini, bahasa Indonesia lebih mudah untuk di 'mesin' kan. Karena bahasa Indonesia tidak mengenal *irregular verbs* dan *tenses*. Hal itu memudahkan atau tidak akan memusingkan pembuat program komputer.

"Meski saya mengatakan demikian, tapi bukan berarti kelemahannya tidak ada. Sistem awalan, sisipan, dan akhiran bahasa Indonesia memang sukar dipahami orang," katanya.

Rifai juga mengatakan bahasa Indonesia tidak memiliki masalah mendasar tentang gender. Sebab ada bentuk wan/wati dan a/i yang masih subur untuk dikembangkan bila memang diperlukan. Ditambah lagi dengan keterbukaan bahasa Indonesia untuk menyerap kosakata asing secara terprogram. Hal itu merupakan keuntungan dalam menghadapi tantangan globalisasi.

"Buktinya, Kamus Umum Bahasa Indonesia sudah berhasil dimekarkan dari 20.000 *entry* menjadi 70.000 *entry* dalam kurun waktu 40 tahun. Di samping itu sudah tersedia lebih dari 150.000 istilah teknis keilmuan dalam bahasa Indonesia yang sudah disepakati oleh tiga negara," papar Rifai.

Oleh karena itu, katanya, saat ini bisa dikatakan tidak ada lagi disiplin ilmu, teknologi, dan pengetahuan budaya yang tidak dapat diko-

munikasikan secara tepat, jelas, dan lugas dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. "Tapi bagaimanapun kita tetap tidak boleh berdiam diri dan menepuk dada. Perlu dipikirkan langkah yang harus diambil untuk memperoleh dukungan luas karena banyak halangan yang akan dan sedang dihadapi," ujarnya.

Misalnya tentang perkembangan teknologi informasi. Perkembangan hariannya yang secepat kilat menyebabkan bahasa Inggris semakin merajalela di mana-mana. Ketidaksabaran pemakai dan kelambanan reaksi pihak yang berwenang menyebabkan kerancuan yang amat mengganggu. "Kata *keyboard, mouse, down-load, hang, memory, play station, e-mail*, dan *www* sudah mencemari bahasa Indonesia para pengguna komputer," paparnya.

Rifai juga memberi contoh pada kata *cyberspace* yang sering di-Indonesiakan menjadi dunia maya. Padahal, katanya, *kyberman* berarti mengendalikan atau memerintah. Dan *cybernation* berkaitan dengan pengendalian otomatis suatu operasi atau proses.

Sehubungan dengan hal itu, banyak sekali kegiatan berbenah diri yang perlu dilakukan. Menurut Rifai jika selama ini perhatian upaya pembakuan pada bahasa Indonesia tulis, maka sudah waktunya untuk memikirkan pembakuan pada bahasa Indonesia lisan. Sebab, bahasa yang dipakai dalam komunikasi internet adalah bahasa bergaya lisan yang penuh canda, namun dianggap pemakainya sangat komunikatif.

"Kebijakan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia untuk membakukan tata bahasa dan memekarkan kosakata sangatlah terpuji. Namun, kebijakan ini sepertinya kurang dipahami oleh masyarakat," ungkapinya. Mereka lanjut Rifai, sangat menggampangkan dan menyepelekan penguasaan bahasa Indonesia lisan. Padahal, bahasa Indonesia lisan dan tulisan berbeda seperti langit dan bumi. (CR-4/B-2)

Media Indonesia, 29 September 2000

Kembangkan Bahasa Indonesia dengan Teknologi Informasi

Jakarta, Kompas

Di era dunia tanpa batas, pengembangan Bahasa Indonesia dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bukanlah sesuatu yang mustahil. Secara teknis, pelaksanaannya dapat dilakukan dengan bertahap, melalui kerja sama berbagai institusi seperti lembaga pendidikan, penyedia jasa layanan internet, lembaga swasta, maupun lembaga nonprofut dan pemerintah.

Demikian pandangan Ir Sumitro Roestam, mantan Direktur PT Pos Indonesia, dalam sidang pleno terakhir pada Seminar Nasional X Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI) di Jakarta, Jumat (29/9). Seminar yang berlangsung 27-29 September ini bertujuan menggali berbagai gagasan pengembangan Bahasa Indonesia.

"Pusat Bahasa seharusnya dapat memanfaatkan peluang kemajuan teknologi informasi untuk mengembangkan Bahasa Indonesia. Tidak saja akan berguna untuk masyarakat Indonesia, tetapi juga bagi masyarakat dunia," ujar Sumitro.

Ia menilai, selama ini masih banyak fasilitas teknologi in-

formasi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, pemanfaatan komputer dan jaringan internet akan mempermudah akses seseorang untuk mendapatkan segala informasi yang berkaitan dengan perkembangan Bahasa Indonesia.

Sumitro berharap, Pusat Bahasa dapat mengembangkan situs web yang berisi berbagai informasi kebahasaan. Seperti, kamus bahasa, tata bahasa, ejaan bahasa, pengucapan bahasa, bahasa-bahasa daerah, dan sebagainya. "Saya bayangkan, semua orang di Indonesia dapat mengakses sebuah sumber yang sama, tanpa ada distorsi dari orang lain yang menjadi perantara informasi," katanya.

Untuk mengembangkan sebuah situs web Bahasa Indonesia yang lengkap, menurut Sumitro, dapat dimulai dengan melakukan kerja sama antarpustaka yang ada di Indonesia. Paling tidak, semua perpustakaan dapat terhubung dalam satu jaringan yang berbasis data.

Evaluasi bahasa

Sementara itu, dalam salah

satu sidang kelompok yang menampilkan Erizal Gani dari Universitas Negeri Padang, muncul pendapat, evaluasi bahasa harus mengacu pada tiga aspek, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

Dalam aspek pengetahuan, evaluasi yang dilakukan meliputi evaluasi kompetensi kebahasaan dan evaluasi kesastraan. Aspek sikap bertujuan untuk melihat pandangan, pikiran, dan perasaan siswa terhadap bahasa yang dipelajarinya. Karena itu, evaluasi yang dilakukan akan berkaitan dengan tingkat penerimaan, reaksi dan penilaian. Sedangkan dalam aspek keterampilan paling tidak ada enam aspek yang dapat dievaluasi, yaitu kemampuan menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan mengapresiasi sastra.

Menurut Erizal, evaluasi bahasa seperti ini akan menuntut guru bertindak dan bersikap teliti, kritis, dan apresiasif. Pada praktiknya, evaluasi ini tidak harus dilakukan dalam waktu khusus dan terencana, tetapi bisa saja dilakukan secara spontan. (mam)

Kompas, 30 September 2000

Bahasa Daerah Berpeluang Jadi Bahasa Pengantar di Sekolah

Mataram, Kompas

Peluang penggunaan bahasa daerah sebagai pengantar dalam pendidikan, setidaknya di sekolah dasar, terbuka pada saat otonomi daerah mulai dilaksanakan. Dengan demikian, sekaligus terbuka peluang meningkatkan kualitas pendidikan di luar perkotaan di mana bahasa ibu masih digunakan sebagai bahasa sehari-hari.

Hal itu dikemukakan Dr M Husni Mu'adz dari Pusat Penelitian Bahasa dan Kebudayaan Universitas Mataram (Unram) Lombok, pada diskusi Forum Konsultasi Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah di Mataram, pekan lalu. Dalam diskusi dibahas berbagai persoalan sosial dan budaya Lombok Tengah dalam menghadapi diberlakukannya otonomi daerah.

Husni Mu'adz mengakui, penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di sekolah memang terkesan mengada-ada, karena selama ini Bahasa Indonesia mendapat tempat dalam sistem pendidikan nasional. Selain itu, keluhan penggunaan bahasa Indonesia tidak muncul dari pendidik, anak didik, maupun masyarakat secara umum.

Kendati demikian, sekolah

dengan pengantar Bahasa Indonesia, tidak memiliki desain khusus untuk membekali anak-anak agar mampu memberikan apresiasi terhadap bahasa dan kultur mereka. Akibatnya, tanpa disadari sekolah membuat mereka menjadi semakin terisolasi dari lingkungan sosio-kulturalnya sendiri, maupun dari lingkungan *mainstream* kultur yang belum sepenuhnya mereka kuasai.

Melalui sekolah, anak-anak menjadi sadar bahwa bahasa dan kulturenya lebih inferior dan lebih rendah daripada bahasa nasional dan kultur modern yang didapatkan di bangku sekolah. Hampir semua komunikasi resmi menggunakan bahasa Indonesia, sebagai satu-satunya medium pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini berdampak negatif yang luas terhadap perkembangan bahasa daerah.

Akibat situasi ini fungsi bahasa daerah telah direduksi menjadi sekadar bahasa komunikasi anak di rumah. Akibat lebih lanjut, anak kurang menghargai bahasa ibunya. Dampak negatif ini juga terjadi pada bahasa Jawa yang penuturnya paling besar di Indonesia. (dth)

Kompas, 13 September 2000

Bahasa Daerah Mungkin, Sampai Kelas Tiga

JAKARTA (Media): Bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di sekolah dasar hanya mungkin sampai kelas tiga dan, setelah itu, diganti bahasa Indonesia karena mudah beradaptasi dengan ilmu pengetahuan.

Kepala Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra pada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Adi Sunaryo mengatakan hal itu kemarin. Ia menanggapi kemungkinan sikap daerah yang menginginkan bahasa ibunya sebagai bahasa utama di sekolah setelah desentralisasi berjalan.

Adi mengatakan ada kemungkinan daerah menuntut digunakannya bahasa lokal un-

tuk bahasa pengantar sekolah. Ini terjadi berkaitan dengan cara pemerintah daerah menerjemahkan desentralisasi pendidikan belum ada panduannya.

"Pusat bahasa sudah memikirkan hal itu," kata Adi. "Dan peluang bahasa daerah masih sulit mengambil alih peran bahasa Indonesia dalam khazanah pendidikan nasional."

Alasannya? Bahasa daerah akan kesulitan berkomunikasi dengan ilmu pengetahuan yang datang dari berbagai belahan dunia dibandingkan dengan bahasa Indonesia.

Adi mengatakan bahasa daerah bisa digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah dasar namun cukup sampai pada kelas tiga saja. "Tapi bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sampai pada kelas enam jika di-

dampingi dengan bahasa Indonesia," katanya.

Ia juga mengatakan dalam masalah adaptasi bahasa, bahasa Indonesia sudah membuktikan sebagai bahasa yang mudah mencerna pengetahuan dari dunia luar. "Selain itu katanya sebagian besar buku pelajaran menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan hasil dari ter-

jemaahan bahasa asing, terutama bahasa Inggris," tambahnya.

Adi juga mengatakan kurikulum 94, yang mengizinkan kemungkinan penggunaan bahasa daerah hanya sampai kelas tiga, sudah tepat untuk mendorong siswa mencintai budaya lokal. Meskipun ia mengakui, "Keadaan sesungguhnya pada tiap-tiap sekolah di daerah tidak ada jaminan siswanya berasal dari daerah setempat."

Ia memberi contoh Bekasi — yang penduduknya sangat heterogen dan sebagian besar sebagai pendatang — ditemukan banyak siswa pada tahap awal merasa kesulitan mencerna mata pelajaran bahasa Sunda daripada bahasa Indonesia.

Selain itu, bahasa Indonesia dan bahasa daerah secara kultural banyak digunakan dalam percakapan sehari-hari. Misalnya, di Riau banyak menggunakan bahasa Melayu Riau dan di Jawa Timur bahasa Indonesia banyak digunakan. Hal ini sebagai bukti bahasa Indo-

nesia sudah diterima keberadaannya tanpa mengikis budaya-budaya lokal.

Sementara itu, peneliti lain dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Dr Nafron Hasyim mengatakan bahwa tuntutan penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di kelas dengan alasan agar siswa memahami budaya lokalnya adalah hal yang sia-sia.

"Bahasa Indonesia sudah sejak lama mendukung perkembangan

ilmu pengetahuan dalam sistem pendidikan nasional dan keberadaannya tidak merusak budaya lokal," kata Nafron.

Alasan lainnya, keberadaan bahasa Indonesia ditujukan untuk memperlancar sistem pendidikan nasional.

Hasyim menjelaskan, diperkannya bahasa daerah sebagai bahasa pengantar sampai kelas tiga sebenarnya dimaksudkan untuk memperkenalkan bahasa Indonesia kepada siswa untuk dapat menelaah pelajaran selanjutnya.

"Walaupun bahasa daerah digunakan sebagai bahasa pengantar sampai kelas tiga, secara langsung siswa sudah dikenalkan dengan bahasa Indonesia, sebab ba-

nyak bahasa daerah yang pengertiannya sepadan dengan bahasa daerah," katanya.

Hasyim mengatakan, bahasa Indonesia harus dipahami sebagai bahasa *lingua franca* yang keberadaannya diterima di berbagai pelosok daerah di Indonesia. Peranan yang sangat strategis ini, lanjutnya, sangat sulit digantikan dengan bahasa daerah lainnya sekalipun bahasa Jawa sebagai suku terbesar di Tanah Air.

Hasyim menambahkan, arti strategisnya bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan nasional ini dapat dibuktikan dalam perbincangan ilmiah di berbagai forum, bahasa Indonesia mudah diterima daripada bahasa daerah. (Sto/B-3)

Sisi Lain Peluncuran Ensiklopedi Bahasa Sunda

Sunda pisah ranjang dari perkawinannya dengan Indonesia. Gurauan itu muncul dari sejumlah orang yang Rabu (6/9) lalu berkumpul di auditorium Perpustakaan Nasional Jakarta. Sejumlah tokoh, penulis prosa dan puisi yang memang orang Sunda berkumpul di tempat itu. Mereka hadir di tempat itu dalam rangka peluncuran *Ensiklopedi Sunda, Alam, Manusia dan Budaya* terbitan Pustaka Jaya. Sastrawan Ajip Rosidi bertindak sebagai pemimpin redaksi penerbitan ensiklopedi itu.

Gurauan yang mengatakan orang Sunda hanya *ngontrak* dari Jawa karena tak mempunyai pulau hingga selat Sunda sebagai satu-satunya milik orang Sunda yang tersisa, muncul di tengah perbincangan. Ada juga yang bergurau, Pulau Jawa dan sebagian pulau-pulau di Indonesia sebenarnya merupakan bagian dari wilayah Sunda Besar dan Kecil.

Makanan khas Jawa Barat, rangginang dan bajigur dan tegur sapa dalam bahasa Sunda dengan tata bahasa yang benar terdengar di semua pojok ruangan. Sejumlah wartawan yang memang beretnik Sunda dan tak mampu berbicara Sunda dengan baik dan benar hanya berkata, "kumaha damang" (apa kabar) dan kemudian mereka bergosip tentang sejumlah pejabat penting Sunda, eh, Indonesia, dalam bahasa Indonesia pula.

Kang Ebet Kadarusman yang menjadi moderator dalam acara itu mempunyai komentar lain. Dia mencoba membandingkan sikap orang Sunda dengan warga negara

Indonesia lainnya. "Jalan sendiri. Lihat Ali Sadikin. Dia berjuang tanpa dukungan orang Sunda. Tetapi coba perhatikan suku-suku lain. Jika seorang di antara mereka menjadi orang penting, semua lini penting hingga ke tukang sapu di tempat kerjanya berasal dari sukunya sendiri."

Pendapatnya agak berlebihan meski mungkin benar untuk kasus Ali Sadikin. Seorang peserta dialog menyebutkan contoh mantan Mendagri Yogie S Memet yang *men-Jabar-kan* dalam arti menempatkan sejumlah orang dari Jawa Barat di sejumlah posisi penting di lingkungan kerjanya.

Ada kisah lain. Masih tentang orang Sunda. Sejarah Komando Daerah Militer (Kodam) Siliwangi. Masyarakat Sunda sangat terbuka dan mencintai para panglima Siliwanginya yang bukan orang Sunda tetapi memang dikenal mencintai rakyatnya. Mau bukti. Baca sejarah mantan Panglima Tentara Teritorium III yang sekarang lebih dikenal dengan nama Kodam Siliwangi, almarhum Alex Kawilarang dan almarhum AH Nasution.

Barat

Kembali ke acara diskusi. Mungkin hanya satu orang non-Jawa Barat yang hadir dalam peluncuran ensiklopedi Sunda itu. Taufik Abdullah yang orang Sumatera Barat. Maaf, maaf, ada yang terlewat. Adi Sasono yang kalau tak salah bukan orang Sunda pun, hadir dan dapat sambutan hangat dari Ajip Rosidi. Ajip, penyair produktif yang tak pernah

...bangku SMA tetapi
...berbagai kalan-
...kalangan perguruan
...dan masih hingga kini tetap
...Universitas Osaka,
...mengang tuan rumah acara

Kembali tentang Taufik. Dia,
...atau tidak, hadir bukan sa-
...sebagai pembicara tetapi juga se-
...orang yang terlibat langsung
...dalam penyusunan ensiklopedi
...Sunda. "Kita sama-sama dari
...Barat. Anda semua orang Jawa
...Barat, saya dari Sumatera Barat,"
...sejarahwan berwibawa di
...negeri ini.

Ia tak hanya pandai bergarau.
Coba dengar komentarnya ten-
tang budaya Sunda:

"Kebudayaan Sunda dianak-
tirikan jika dibandingkan den-
gan kebudayaan Jawa, Bali dan
Aceh," ujarnya. Tanpa berniat
memancing sentimen kedaera-
han dia meminta peserta diskusi
untuk merenung apa yang telah
dilakukan pemerintah terhadap
perkembangan budaya Sunda
dibandingkan dengan perlakuan
terhadap budaya lainnya.

Tetapi ada rahmat terselubung
dari perlakuan itu. Diibaratkan se-
bagai seorang gadis, menurut dia,
Sunda jarang disentuh tangan-tan-
gan kotor dengan berbagai alasan.
Pariwisata misalnya. Pandangan i-

ni jelas merupakan isu menarik
yang bisa terus diperdebatkan di
kemudian hari.

Puncak

Lalu apa catatan penting Ajip
tentang budaya daerah ketika
berhadapan dengan budaya nasion-
al? Dia mengutip penjelasan Pasal
32 UUD '45 yang mengatakan, kebu-
dayaan lama dan asli yang terdapa-
at sebagai puncak-puncak kebu-
dayaan di daerah di seluruh

Indonesia terhitung kebudayaan
bangsa.

Lalu apa sih arti puncak-pun-
cak kebudayaan daerah itu? "Tak
jelas benar," kata Ajip yang sejak
remaja menjadi penulis di sejum-
lah media berwibawa masa itu,
seperti *Siasat*, *Zenith* dan *Mimbar
Indonesia*.

Namun yang pasti, masih kata
Ajip, puncak-puncak kebudayaan
di daerah-daerah itu memang di-
anggap sebagai kebudayaan bangsa
yang bisa jadi pula dianggap seba-
gai kebudayaan nasional. Namun
bagaimana hubungan dan interak-
si antara puncak-puncak kebu-
dayaan di daerah dengan kebu-
dayaan nasional, tak pernah dirin-
ci.

Selama 55 tahun republik ini
berdiri, pengembangan kebu-
dayaan daerah boleh dikatakan
sepenuhnya terserah kepada
masyarakat. Kepada penggiat bu-
daya di daerahnya masing-masing.
Pedoman yang jadi pegangan ialah
demi kemajuan kebudayaan atau
kesenian nasional.

Lalu bagaimana menghadapi
semua tantangan ini? *Ensiklopedi
Sunda, Alam, Manusia dan Budaya*
terbitan Pustaka Jaya sudah
barang tentu bukan satu-satunya
jalan keluar untuk memperta-
hankan, apalagi menumbuhkem-
bangkan budaya daerah. Tetapi k-
erja keras penyusunan buku tebal
yang dikerjakan selama 10 tahun i-
tu berisi informasi mulai dari *rang-
ginang* hingga *agama* Sunda den-
gan tokoh Mei Kartawinata dan
Pangeran Madraisnya. Tentu en-
siklopedi ini merupakan sejarah
penting bukan hanya untuk orang
Sunda, tetapi mungkin juga untuk
semua pihak yang mencintai atau
setidak-tidaknya ingin mengetahui
budaya Sunda.

- PEMBARUAN/AA SUDIRMAN

Media Indonesia, 19 September
2000

Bahasa Inggris buat SDM Tersisih

Masih Dianggap Bahasa Asing, bukan Bahasa Kedua

JAKARTA (Media): SDM asal Indonesia tersisih dibanding sejumlah negara lain karena bahasa Inggris masih dianggap sebagai bahasa asing, bukan bahasa kedua.

Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA) Qomari Anwar mengatakan hal itu, Sabtu.

"Tersisihnya SDM Indonesia pada umumnya disebabkan oleh sangat rendahnya kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris," kata Qomari. "Sehingga terkesan bahwa SDM kita ini berkualitas rendah."

Qomari mengatakan, negara-negara yang menempuh jenjang pendidikan dengan memperdalam bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris, mampu menyisihkan SDM Indonesia.

Negara itu —seperti Filipina, India, Malaysia, dan Singapura— memosisikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua setelah bahasa nasionalnya.

"Sebaliknya di Indonesia masih memosisikan bahasa Inggris sebagai bahasa asing," kata Qomari. "Sehingga tidak ada panggilan yang kuat untuk mempelajari

nya."

Pendidikan dan pelatihan berbahasa Inggris di negara-negara yang memosisikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua memiliki tujuan yang sangat jelas dan konstan, yaitu komunikasi.

Untuk menghadapi persaingan di era globalisasi, seluruh lembaga pendidikan seharusnya menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Sehingga, kata Qomari, "SDM yang dilahirkan-nya mampu menghadapi tantangan global yang mau tidak mau harus dihadapi."

Ia mengatakan saat ini SDM Indonesia relatif dikalahkan oleh SDM dari luar di bidang seperti ekonomi atau perbankan, manajemen, dan teknologi.

"Ini disebabkan institusi-institusi pendidikan di negeri ini belum mampu mempersiapkan SDM yang mampu berkompetisi di dunia kerja, yang memiliki tuntutan berkomunikasi dengan bahasa

internasional," katanya. "Itu tidak bisa ditawar-tawar lagi."

Keinginan agar bahasa Inggris dipandang bahasa kedua, bukan bahasa asing, disosialisasikan oleh Qomari. "Ini akan kita sosialisasikan terus ke seluruh perguruan yang ada di Indonesia. Walaupun secara resmi belum ada pembicaraan dengan pemerintah," katanya.

Meski demikian, dia berharap agar pemerintah tanggap dan

proaktif dengan masalah bahasa

yang menjadi tolok ukur peningkatan SDM di Tanah Air.

"Kami harap, pemerintah mau menangkap masalah ini," kata Qomari. "Ide ini akan kami tindak lanjuti secara internal dan terus menyebar sampai ke eksternal."

Buka kelas Inggris

Sementara itu Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang, sudah akan meluluskan sarjana ekonomi yang fasih berbahasa Inggris lewat program *English Class*—kuliah berbahasa Inggris bagi mahasiswa reguler.

"Insya Allah, dalam setahun sampai dua tahun mendatang mereka bisa menamatkan studinya

dan siap diterjunkan ke tengah-tengah masyarakat, bahkan siap bersaing dalam pasar global," ujar Dr Elfindri, Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Unand, kemarin.

Kelas berbahasa Inggris ini telah dibuka sejak tiga tahun silam. Elfindri mengatakan bahwa program ini bertujuan menghasilkan sarjana yang selain menguasai ilmu ekonomi secara mendalam, mampu berinteraksi dengan masyarakat internasional. Program ini juga untukantisipasi berbagai peluang dunia global yang ditandai pasar bebas Asia 2003 nanti.

Tidak semua mahasiswa mengikuti kelas berbahasa Inggris. Tahun ini diikuti oleh 60 maha-

siswa. "Ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 40 orang," kata Elfindri.

Ia juga menjelaskan, bila memungkinkan, akan dilakukan penambahan kelas berbahasa Inggris sehingga setiap jurusan memiliki kelas berbahasa Inggris. "Jurusan yang paling diminati mahasiswa untuk program kelas berbahasa Inggris adalah akutansi," kata Qomari.

Kelas berbahasa Inggris ini, mulai tahun ajaran 2000/2001, dibiayai bantuan luar negeri atau proyek QUE. Sedangkan untuk mengatasi kekurangan dosen, ditutupi dosen tamu asing yang sudah mengabdikan di FE Unand.

(Sht/Ant/B-3)

Media Indonesia, 11 September 2000

Cerpen Punya Martabat Sastra

YOGYA (KR) - Karya cerita pendek (cerpen) kini sudah dianggap sebagai genre sastra. Padahal dulu yang dianggap sastrawan adalah penyair. Sementara penulis cerpen tidak masuk dalam kategori itu, sebab karya cerpen dinilai tidak punya pertarungan dalam bahasa.

Kenapa dikatakan demikian, menurut cerpenis Agus Noor, dalam sastra, bahasa tidak semata-mata sebagai alat komunikasi, tapi juga alat ekspresi. Jadi itu yang membedakan bahasa sastrawan dengan wartawan.

Tapi sekarang, lanjut Agus, cerpen diyakini sebagai suatu

sastra Horison.

Mengenai tema cerpen sekarang, Agus menilai, nyaris seragam tapi cara bercerita dan cara pandangnya berbeda. Sehingga ada pengkayaan pengalaman dalam membaca. "Kita juga bisa melihat kemungkinan-kemungkinan lain dari persoalan itu," kata cerpenis kelahiran Tegal, yang cerpennya banyak dimuat di berbagai media cetak.

"Ini indikasi bagus untuk perkembangan cerpen kita, sehingga karya cerpen lebih beragam, lebih dalam dan lebih dahsyat," katanya.

Cerpenis yang sudah meluncurkan buku kumpulan cerpen

ini menilai, dari keberagaman karya cerpen, jika disimak sesungguhnya ada satu arus utama yang kemudian dijadikan tema cerpen di Indonesia. Ada individu yang mengangkat tema perubahan sosial yang mengakibatkan kegagapan sosial, kebisingan.

Ada juga yang menggarap tema cerpen yang membenturkan nilai-nilai tradisional dengan nilai moderen. Misalnya, ketoprak dikofrontir dengan bioskop.

Tantangan bagi cerpenis adalah bagaimana mengeksplorasi tema, cara bercerita sehingga cerpen punya martabat sastra, kata Agus pula. (Wan)-o

wacana yang kuat untuk melihat persoalan secara khas.

Pengakuan terhadap karya cerpen mulai tampak di tahun 1990-an, ketika muncul penghargaan terhadap cerpen terbaik dengan hadiah uang yang cukup besar untuk ukuran Indonesia. Penghargaan itu dimulai dari media cetak yang kemudian diikuti oleh sejumlah lembaga.

Dampak dari pengakuan terhadap karya cerpen sebagai genre sastra ini besar sekali. "Itu membuat publik cerpen menjadi makin luas, selain juga munculnya penulis-penulis muda," kata Agus yang belum lama ini cerpennya berjudul 'Para Pemburu', masuk dalam 10 Cerpen Terbaik 1990-2000 majalah

Kedaulatan Rakyat, 9 September 2000

Eksistensi Cerpen Tergantung Koran

YOGYA (KR) - Pertumbuhan sastra Indonesia, khususnya cerita pendek (cerpen) sering dipersoalkan. Terutama menyangkut pencapaian-pencapaian estetik, gugatan terhadap realitas, persoalan tematik, sampai kepada wadah sosialisasinya. Hingga sekarang masih berlaku pandangan, eksistensi cerpen Indonesia tergantung media massa, khususnya koran.

Demikian ditegaskan Joni Ariadinata, cerpenis-Ketua Kongres Cerpen, berkaitan dengan Kongres Cerpen Indonesia I di Parangkusumo, Kamis (21/9). Kongres Cerpen yang merupakan rangkaian Kemah Budaya 2000 tersebut, hingga Rabu (20/9) sore, akan diikuti kurang

lebih 100 cerpenis ternama dari kota-kota besar seluruh Indonesia.

Dikatakan Joni, adanya gugatan atau harapan di atas, tetaplah diperhatikan dan diakomodasikan. "Setidaknya dari pandangan yang terakomodasi akan bisa menjawab berbagai polemik yang belakangan ini mencapai titik eksistensi cerpen kaitannya dengan koran," katanya di Sekretariat Kemah Budaya, Jl Gayam 16, Rabu (20/9).

Beberapa kalangan berpendapat, soal pemiskinan pencapaian estetik yang melatarbelakangi penciptaan cerpen dipicu oleh kedangkalan para penulis cerpen itu sendiri dalam mereduksi bacaan ataupun fenomena yang akan

memperkaya wilayah kreatifnya.

Apapun alasannya, kata Joni, pertumbuhan cerpen, haruslah dipetakan. Cerpen sebagai *genre* sastra, belakangan ini lahir dan tumbuh dengan fenomena yang unik. "Saya melihat ada pencapaian-pencapaian simultan dari generasi ke generasi. Setiap angkatan hadir dengan ciri khas masing-masing, dari yang liris sampai eksperimental," kata penulis antologi cerpen 'Kastil Angin Menderu'.

Menurut Joni, sosialisasi cerpen cukup menarik sesuai zamannya. Pada setiap zaman, sosialisasi cerpen dapat dilihat dan tergantung pada media massa/penerbit. Dari 'cerpen majalah', 'cerpen koran', dan sekarang muncul fenom-

ena 'cerpen buku', bahkan 'cerpen cyber'. Masing-masing penamaan itu dengan sendirinya mewakili media itu sendiri.

Untuk itulah, kata Joni, maka kondisi cerpen yang 'terkotak-kotak' tersebut perlu ditengok kembali, untuk mencairkan batas/sekat yang memungkinkan terjadi polarisasi, misalnya menganggap lemah pencapaian estetik pada zaman atau media tertentu, sambil mengagungkan yang lain. "Kesemuanya itu, pastilah menjauhkan dari sikap objektif," kata penulis antologi cerpen 'Aceh Mendesah dalam Nafasku'. Joni berharap dengan Kongres Cerpen Indonesia akan terjadi dialog, interaksi, apresiasi atas semua kreator cerpen dan publiknya. (Tim KR)-o

Kedaulatan Rakyat, 21 September 2000

Kongres Cerpen di Pantai Parangtritis

Pertumbuhan cerita pendek (cerpen) di Indonesia merupakan sebuah fenomena yang khas. Cerpen tumbuh seiring dengan maraknya media massa (koran) dengan rubrik budayanya. Cerpen menjadi salah satu andalan yang selalu hadir.

Pada masa Orde Baru, cerpen kerap digunakan oleh pengarang sebagai kendaraan yang paling efektif untuk menumpahkan kegelisahan dan perasaan tertekan akibat represifitas penguasa. Maka adagium "ketika pers dibungkam, sastra bicara" yang digelindingkan Seno Gumira Ajidarma seperti mendapat pengabsahan yang kuat.

Barangkali karena sifatnya yang prosais, naratif dan tematis itulah maka cerpen lebih mudah diterima khalayak dan mampu menembus kalangan pembaca yang lebih luas. Terbukti ketika buku-buku kumpulan cerpen bermunculan terbit, buku jenis ini menempati *rating* yang cukup tinggi sebagai buku-buku laris.

Seperti *Derabat*, kumpulan cerpen pilihan *Kompas*, tercatat mengalami delapan kali cetak ulang dalam waktu yang singkat. Buku ini menggeser buku-buku politik seperti *Kastil Angin Menderu* (Joni Ariadinata) dan *Memorabilia* (Agus Noor) yang dalam waktu satu bulan setelah terbit mengalami cetak ulang kedua. Kemudian *Dongeng Untuk Seorang Wanita* (Bre Redana), *Orang-orang Kotagede* (Darwis Chudori), *Orang Sakit* (Hudan Hidayat) serta buku-buku

kumpulan cerpen Seno Gumira Ajidarma yang menurut kalangan distributor laris seperti kacang goreng.

Menurut Joni Ariadinata, penanggung jawab Kongres ini, fenomena tersebut tentu saja menggembirakan bagi dunia sastra. Larisnya buku-buku sastra, terutama cerpen, telah menjadi indikator semakin diterimanya karya sastra di kalangan pembaca. Akan tetapi, seiring dengan kegemilangan bangkitnya pasar sastra yang berarti juga kemungkinan bangkitnya kesejahteraan para pengarang, muncul pula gugatan tentang kualitas cerpen yang muncul di koran yang kemudian diterbitkan dalam sebuah buku kumpulan cerpen. Gugatan itu menyatakan, tema cerpen itu dangkal.

Menurut para kritikus, cerpen yang dimuat di surat kabar tak memiliki visi yang jelas. Hal ini karena kooptasi media massa yang mementingkan aktualitas, pembatasan halaman, fungsi komunikasi dan mengutamakan berita, di samping kualitas redaktur sastra media massa yang bersangkutan.

Meskipun tercatat beberapa diantara kreator semacam Budi Darma, Kuntowijoyo, Bakdi Soemanto, mengadakan pembelaan dengan mengatakan, upaya pembatasan akan tetap melahirkan kreativitas, pro dan kontra tetap berlangsung hingga hari ini.

Untuk mengetahui perkembangan kualitas cerpen di tanah air, pada tanggal 21 hingga 22

September mendatang di pantai Parangtritis, Yogyakarta akan digelar sebuah diskusi besar bertajuk *Kongres Cerita Pendek*

Indonesia 1. Sebuah acara yang diselenggarakan di bawah perhelatan Kemah Budaya 2000 dari tanggal 20 hingga 25 September 2000 dengan menghadirkan berbagai kesenian mulai dari tradisional hingga modern, dari mulai sastra, seni rupa, teater, musik tari hingga upacara-upacara tradisional yang menyertakan keterlibatan masyarakat secara luas.

Acara ini merupakan upaya merajut dan mengumpulkan sejumlah pemikiran seputar perkembangan serta nasib cerpen di masa depan. Semua pengarang cerpen Indonesia dapat berkumpul dan berdiskusi dalam acara ini. Suatu hal yang belum pernah terjadi dalam sejarah kesusastraan Indonesia.

Kongres ini menghadirkan dua puluh penulis makalah dan enam narasumber, seperti Nirwan Ahmad Arsuka, Nenden Lilis A, Prof Dr Sri Rahayi Prihatni, Ahmad Tohari, Hasif Amini dan Jamal D Rahman. Diharapkan kongres ini tidak akan terjebak menjadi sebuah acara seremonial. (132)

Suara Pembaruan, 19 September 2000

KONGRES CERPEN INDONESIA

Lakukan Pemetaan Karya Fiksi

YOGYA (KR) - Pertumbuhan cerita pendek (cerpen) di Indonesia semakin baik. Secara estetik maupun tema sosiologis dan politis. Untuk itu secepatnya perlu dilakukan pemetaan, sehingga merangkum dinamika dunia fiksi sesungguhnya. Hal ini penting untuk perkembangan cerpen maupun dunia pengajaran di Indonesia, sekarang maupun di masa datang.

Ketua Kongres Cerpen Indonesia I, Joni Ariadinata mengungkapkan hal tersebut berkaitan dengan 'Kongres Cerpen Indonesia I' bertema 'Menjelajah Kemungkinan Masa Depan Cerita Indonesia' dalam Kemah Budaya 2000 di Parangkusumo-Parangtritis, 21 September mendatang.

Didampingi Satmoko Budi

Santoso, Joni mengatakan, cerpen sebagai *genre* sastra, baik awal pertumbuhan maupun sekarang mengalami dinamikanya sendiri. Cerpen tahun-tahun belakangan ini, selain menjadi media ekspresi juga sekaligus dapat merangkum berbagai realitas kehidupan yang tak terungkap. "Fiksi secara tidak langsung bisa mengungkapkan ekspresi kehidupan," ujarnya sambil menyebutkan berbagai dinamika kehidupan sosial. "Bahkan, politik yang berkembang, atau realitas apapun," katanya di Sekretariat Kemah Budaya, Jl Gayam 16, Kamis (14/9).

Dijelaskan Joni, Kongres Cerpen Indonesia dalam pertumbuhan sastra di Indonesia memang baru pertama kali ini

diselenggarakan. Sepintas ada kesan aneh, tetapi sastra pun memiliki peran penting, terutama menyangkut ekspresi reali-

tas zamannya. "Kami berharap, kongres nanti dapat menjadi media untuk menjelajah segala kemungkinan masa depan cerpen Indonesia," kata penulis cerpen 'Lampor'.

Menurut Joni, di tengah pertumbuhan cerpen yang iklimnya semakin baik ini, rasanya memang penting untuk melihat perkembangan, perubahan atau pergeseran dinamika cerpen di Indonesia, baik dari estetika maupun tema dan gaya penulisannya.

Untuk lebih objektif, dalam kongres akan menghadirkan narasumber dosen-pengamat sastra Prof Dr Budi Darma, Ir Nirwan Ahmad Arsuka, Hasif Hamini, Maman S Mahayana, Nenden Lilis A, dipandu moderator Jamal D Rahman. (Jay)-o

Kedaulatan Rakyat, 15 September 2000

BelajardariGorki

Resensi: Kumpulan cerpen sastra kiri Maxim Gorki. Contoh terbaik karya sastra aliran realisme sosialis?

Maxim Gorki bukan nama asing dalam wacana sastra Indonesia. Sebagai penggagas aliran realisme sosialis, yang berusaha mengangkat kenyataan dialektik ke dalam "isi" sastra, serta menolak kecenderungan untuk hanya terpaku pada hal-hal formal dan teknis, Gorki cukup dikenal di Indonesia. Bukan saja karena pemikiran dan karya-karyanya banyak dikagumi, melainkan juga karena pada dekade 1960-an, aliran yang dilahirkannya itu pernah dipakai Lekra untuk menghantam sejumlah seniman yang dianggap kontra-revolusi.

Seperti ditulis Raman Selden (*A Reader Guide to Contemporary Literary Theory*, 1985), memang, ada satu masa ketika kritik sastra Marxis yang pernah ditulis di negara-negara Barat sering sangat berani dan segar. Tapi, menurut Selden, sebagai metode artistik, aliran realisme sosialis tampak tak begitu menarik dan memedihkan mata banyak pembaca Barat.

Padahal, saat realisme sosialis diperkenalkan Gorki beberapa tahun sebelum Revolusi Oktober (1917) pecah di Rusia, aliran ini memperoleh sambutan hangat di kalangan sastra Rusia dan dunia. Sejumlah karya realisme sosialis yang lahir pada masa itu—semisal novel *Ibunda* dan drama *Lembah Dalam* dari Gorky, atau novel *Membangunkan Hari Kedua* dari Ilya Ehrenberg—telah muncul menjadi karya-karya mengesankan. Sebagaimana sajak-sajak Mayakovsky atau lakon-lakon Bertolt Brecht, karya-karya tersebut memancarkan semangat pembebasan dan menampilkan pengaruh stimulus kreatif dari suasana revolusioner yang saat itu berlangsung.

Namun, setelah rangkaian disiplin dan peraturan atas nama semangat revolusioner dibuat oleh pemerintah komunis, serta setelah Persatuan Penulis Sovyet antara 1932-1934 menguraikan doktrin-doktrin kesusastran yang tak

jauh berbeda dengan kodifikasi statemen-statemen Lenin, aliran ini pun seperti menggali kuburan kreativitasnya sendiri. Keberadaannya tak hanya gagal melahirkan karya-karya otentik, tetapi juga sering dijadikan jubah bagi karya-karya yang hanya bisa meneriakkan propaganda.

Buku kumpulan cerpen karya Maxim Gorki ini merupakan salah satu contoh yang baik dari apa yang disebut sebagai karya sastra realisme sosialis. Buku ini diterjemahkan dari *Tales of Italy*, yang ditulis Gorki saat menjalani pembuangan politik di Chapri, Italia, pada 1906, setelah diusir dari Rusia karena keterlibatannya dalam Revolusi Rusia (1905).

Meski berkisah tentang rakyat miskin, dan padat dengan muatan-muatan ideologis, cerpen-cerpen dalam buku ini jauh dari kesan propaganda. Sebab, meski sangat dekat dengan pemikiran-pemikiran kiri (Gorki adalah kawan dekat Lenin), sastra bernaam asli Alexeie Maximovich Peskhov ini juga sangat mengagumi Anton Chekov dan bersahabat baik dengan Tolstoy. Karena itu, walau cerpen-cerpennya selalu berusaha melukiskan



realita objektif masyarakat yang diasingkan oleh sistem kapitalisme yang menindas, Gorki tetap memiliki kepekaan estetik yang baik.

Ia bahkan sering hanya menuangkan gaya realisme sosialisnya dalam deskripsi yang dibuat sangat rinci dan pada alur cerita. Ini misalnya tampak dalam cerpen bertajuk "Pemogokan", yang dipilih penerbit sebagai judul buku ini (mungkin karena sangat provokatif). Dalam cerpen ini kita nyaris tak bisa menemukan alur cerita atau tokoh, karena Gorki hanya membuat pelukisan yang realis, namun agak romantik, atas suasana pemogokan buruh transportasi di Naples, Italia. Kecenderungan romantik ini bisa jadi tak disadari Gorki karena gaya ini, celakanya, memang sangat ampuh untuk mempengaruhi pembaca.

Pada banyak cerpen lain, yang memiliki tokoh dan alur cerita, Gorki juga tetap menampilkan kekuatannya sebagai pencerita yang lembut, dengan penguasaan

keterampilan bahasa yang luar biasa. Jadi meski cerpen-cerpennya bertaburan dengan ungkapan-ungkapan kiri (salah satunya berjudul "Bagaimana Giovanni Menjadi Seorang Sosialis"), kita takkan merasa sedang dijejali slogan-slogan murahan.

Gorki adalah satu-satunya sastrawan Rusia yang berasal dari kalangan proletar dan pernah bertahun-tahun menjadi kuli kapal, pekerja serabutan, serta gelandangan. Kata "Gorki" yang berarti pukulan sengaja diletakkan dalam namanya. Karena, ketika menjadi kuli ia kerap menerima pukulan dari majikannya. Dengan masa lalu yang dimilikinya inilah Gorki bisa melukiskan perasaan dan kehidupan masyarakat bawah dengan sangat baik. ■

MAS'AD T.

Panji, 6 September 2000
No.20/IV

Soal Pengajaran Mengarang

Guru Butuh Waktu dan Bekal Keterampilan Mengarang

Jakarta, Kompas

Para guru membutuhkan waktu dan bekal keterampilan untuk pelaksanaan pelajaran dan latihan mengarang sebagaimana diinstruksikan Menteri Pendidikan Nasional Yahya A Muhaimin. Di sisi lain, pemerintah juga harus memberikan pembekalan keterampilan dan buku-buku kepada para guru dan murid.

Demikian kesimpulan yang bisa ditarik dari perbincangan *Kompas* dengan sejumlah guru Bahasa Indonesia pada beberapa sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan sekolah menengah umum (SMU) di Jakarta yang dibebani tugas mengajar mengarang. Selasa (12/9). Mereka dimintai pendapat berkaitan dengan dihidupkannya kembali pelajaran mengarang di sekolah, minimal sekali dalam dua minggu, mulai tahun ajaran 2000/2001.

Meski sejak beberapa tahun lalu sejumlah guru telah menerapkan pelajaran mengarang sebagai satu kesatuan dengan pelajaran Bahasa Indonesia, namun guru-guru tetap kecewa atas hasil karangan murid-muridnya. Penyebabnya, antara lain, karena waktu yang disediakan sangat sempit. Sementara di sisi lain, bila anak diberi keleluasaan mengungkapkan gagasannya secara utuh dan menuliskan karangannya di kertas hingga berlembar-lembar, guru harus menyediakan waktu khusus agar bisa memeriksa satu per satu.

"Sebagai guru, kami harus

menyesuaikan program ini dengan target kurikulum setiap caturwulan. Akibatnya, hasil karangan hanya dapat mencapai tiga sampai lima paragraf," kata Desy Triana (39), guru SLTP Negeri 19, Jakarta Selatan.

Keterbatasan waktu

Kebutuhan akan waktu ekstra untuk memeriksa karangan siswa ini membuat para guru merasa kehilangan waktu bersama keluarga di rumah. Padahal, mereka juga masih dituntut untuk mempersiapkan materi pelajaran buat esok harinya.

"Program ini sangat idealis, tetapi penerapannya membutuhkan banyak waktu. Sementara bagi murid-murid, penerapan program ini juga mereka rasakan sangat menjenuhkan," kata A Sukarno (51), guru SMU Negeri 70 di kawasan Blok M, Jakarta. "Lagi-lagi mengarang, lagi-lagi mengarang," kata Soekarno menirukan celoteh murid-muridnya.

Menurut guru SMU Kolese Aloysius Gonzaga, Christina Purwanti (48), waktu ekstra tersebut meliputi bagaimana mem-

persiapkan materi pengajaran di rumah, mengajarkannya di kelas, serta memeriksa kembali hasil karangan itu di rumah.

Kendala waktu juga berkaitan dengan rasio perbandingan antara jumlah murid dan guru. Kalau seorang guru harus memeriksa sekitar 30 hasil karangan dikalikan kelas paralelnya, misalnya A sampai D, maka berarti guru tersebut harus memeriksa 120 buah karangan. Akibatnya, target ketepatan berbahasa sulit tercapai. "Paling hanya dikoreksi secara massal, tidak sampai pada analisis yang tepat sebagaimana yang diharapkan," kata Agustinus Awal, guru SLTP Katolik Ricci II di kawasan Bintaro, Tangerang.

Bagi Nila, Nadya dan Jafrida, tiga orang guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 8 Jakarta, dihidupkannya kembali pelajaran dan latihan mengarang di sekolah merupakan beban sekaligus tantangan. Menurut Nadya, pelajaran mengarang sebenarnya bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa dan berpikir kreatif pada siswa, terutama di tengah keprihatinan merosotnya kemampuan berbahasa anak-anak saat ini.

Dalam pandangan Nila, guru Bahasa Indonesia tidak akan mengalami banyak kesulitan jika harus mengajarkan kembali pelajaran dan latihan mengarang di sekolah. Selain sudah

memiliki bekal pengetahuan, banyak guru yang juga sudah memiliki pengalaman mengajar mengarang sebelum pelajaran itu dihapus pada tahun 1994.

Kesulitan yang mungkin dihadapi guru, kata Nila, adalah minat membaca murid yang rendah. Akibatnya, penguasaan perbendaharaan kata-katanya masih sedikit. Selain itu, buku-buku sastra di perpustakaan sekolah pun tidak tersedia dalam jumlah yang cukup.

Bekal keterampilan

Bekal keterampilan mengarang yang baik juga harus diusahakan pemerintah maupun sekolah. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan pengetahuan guru-guru Bahasa Indonesia. Sebaliknya, para guru juga tidak

bisa hanya berharap pada bantuan pemerintah. "Kalau guru mau membuat muridnya pandai, guru juga harus pandai-pandai membekali dirinya sendiri dengan banyak membaca dan bergaul," kata Ishak Idrus (48), guru SLTP Negeri 11 Jakarta.

Pengadaan buku-buku di perpustakaan juga sangat diharapkan oleh sebagian besar guru, sebab buku-buku itu pada akhirnya akan mampu menambah wawasan para murid. "Efeknya, dalam menyusun karangan para murid tidak akan mengulang-ulang kosakata," kata Dhani (28), guru SLTP Katolik Ricci II. (p27/mam)

Kompas, 13 September 2000

Murid Menyambut Positif Kehadiran Pelajaran Mengarang

Jakarta, Kompas

Upaya pemerintah menghidupkan kembali pelajaran dan latihan mengarang di sekolah ternyata mendapat tanggapan positif dari peserta didik. Meski tetap dianggap sebagai tambahan beban, namun sejumlah murid menyambut kebijakan ini dengan antusias. Hanya saja, para guru yang mengasuh pelajaran ini dituntut mampu menciptakan suasana belajar yang jauh dari kesan membosankan serta tidak terlalu terpaku pada penggunaan tata bahasa baku.

Demikian rekaman pendapat yang dihimpun *Kompas* dari sejumlah murid sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan sekolah menengah umum (SMU) di beberapa wilayah di DKI Jakarta, Rabu (13/9). Mereka dimintai pendapat, sekaligus apresiasinya, terhadap pelajaran mengarang yang mulai tahun ajaran 2000/2001 dihidupkan kembali sesuai instruksi Menteri Pendidikan Nasional Yahya A Muhaimin.

Alfin Aries Putera (12), siswa SLTP Negeri 216 Jakarta Pusat, berpendapat bahwa membuat karangan bebas itu adalah pe-

kerjaan yang menyenangkan. Karangan bebas yang ia maksudkan adalah bebas dalam memilih topik dan tidak terlalu terikat pada kaidah tata bahasa baku. Akan tetapi, tambahnya, kalau murid harus mengarang secara runtun dan sepenuhnya disesuaikan dengan tata bahasa yang baik justru menjadi tidak menarik.

Hal senada juga diutarakan Aris, temannya. "Guru memang banya menyuruh membuat satu lembar, tetapi kalau harus sesuai seperti kemauannya, pelajaran ini malah jadi bikin pusing,"

ujarnya.

Bagi tiga murid SLTP Katolik Budi Mulia (juga di Jakarta Pusat) seperti Sri, Novi, dan Uli, mengarang itu benar-benar sesuatu yang menyenangkan. "Sebab, dengan mengarang kita bisa menuangkan gagasan pikiran ke secarik kertas, kemudian dipamerkan di majalah dinding," kata Novi mewakili teman-temannya. "Murid dapat menuangkan imajinasi pikirannya ke dalam tulisan," kata Uli menimpali.

Harus fleksibel

Akan tetapi, dalam pandangan Francesca, siswa SLTP Katolik Budi Mulia lainnya, dalam menyusun karangan terkadang ada guru yang selalu memikirkan mana bahasa baku dan mana yang tidak. Akibatnya, karangan tersebut tidak mudah untuk ditampilkan di majalah dinding. "Guru itu selalu bilang, karangan ini masih harus diper-timbangkan segi bahasanya," kata Francesca menirukan pen-

dapat gurunya.

Terlepas dari itu semua, pelajaran mengarang juga dinilai dapat memunculkan beban baru bagi peserta didik. Tuntutan bidang studi di kelas akhir—baik SLTP maupun SMU—sangat besar, sehingga waktu belajar mereka lebih terarah pada upaya menyiapkan diri untuk ujian-ujian yang sifatnya pilihan ganda. "Jika harus mengembangkan kemampuan mengarang, bukankah ini berarti pemerintah menambah beban lagi kepada kami," kata Francesca.

Pendapat serupa juga diungkapkan Iwan, murid SMU Negeri 28 Jakarta Selatan. Menurut dia, kehadiran pelajaran mengarang jelas akan menjadi beban tambahan bagi siswa. "Sekarang saja beban pelajaran sudah banyak, apalagi nanti kalau ditambah tugas mengarang," ujarnya.

Lain lagi pendapat Felix Wimonono Putera (17), murid SMU Kolese Aloysius Gonzaga. Ia menilai pelajaran mengarang ma-

lah bisa menjadi mubazir kalau guru yang mengajar tidak memiliki bekal keterampilan mengarang. Apalagi ada yang mengatakan bahwa mengarang itu berkaitan dengan bakat. "Artinya, tidak semua murid suka mengarang," kilahnya.

Oleh karena itu, demikian Felix, model guru yang bisa mendampingi murid-murid dalam mengarang adalah guru bisa bersikap fleksibel dalam memberikan topik dan mampu memberikan referensi yang sesuai dengan situasi kehidupan murid-muridnya. "Ini penting, karena yang dihadapi bukan anak kecil lagi," katanya.

Kehidupan sehari-hari

Seorang murid SLTP Bina Pangudi Luhur (BPL) Jakarta Timur, Siti Aisah (16), berpendapat bahwa latihan mengarang itu akhirnya sekadar untuk mengisi nilai di rapor untuk tiap catur wulan. Tentang sisi lain pelajaran ini, ia mengatakan, pelajaran mengarang baru da-

pat menjadi pelajaran yang menyenangkan kalau para murid tidak disuruh membuatnya dalam topik yang jauh dari kehidupannya sendiri.

"Murid akan senang kalau disuruh mengarang dari pengalaman hidup sehari-hari, seperti pengalaman liburan sekolah dan membantu orangtua," katanya.

Sedangkan bagi Bunga, siswa SLTP Negeri 216 Jakarta Pusat, meski pelajaran mengarang tidak akan menjadi beban tambahan, namun guru tidak sepatutnya menentukan topik—apalagi judul—karangan secara spesifik yang akan dibuat. "Kalau kita diberi kebebasan, saya yakin bisa mengarang," katanya. Hal senada juga dikemukakan Nurlela, siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) BPL. Nurlela yang mengaku menyukai latihan mengarang sejak SLTP berpendapat, karangan akan lebih hidup jika para murid tetap dibiarkan mencari sendiri topik bahasannya. (p27/mam)

Pelajaran Mengarang Tumbuhkan Rasa Percaya Diri Anak

Surabaya, Kompas

Pelajaran mengarang sudah harus diterapkan sejak anak usia dini, sebab proses pembelajaran mengarang yang mengedepankan pada orisinalitas ide atau gagasan anak bakal menumbuhkan kepercayaan diri sekaligus kepekaan anak didik pada lingkungannya.

"Manfaat pelajaran mengarang itu sangat besar, bukan saja pada kreativitas anak, melainkan juga dapat menggairahkan gemar membaca dan berke-mampuan berbahasa lebih baik," ujar Dra Endang Ariadi Suwarno dari Universitas Ne-

geri Surabaya (Unesa) kepada *Kompas*, Minggu (17/9).

Menurut Endang, pelajaran mengarang pada anak didik sudah harus dimulai sejak anak usia sekolah dasar kelas satu. Dalam proses pembelajaran mengarang pada jenjang anak usia dini, ukuran hasil bukan pada baik-benarnya penulisan maupun struktur bahasanya, melainkan pada keberanian anak didik menuangkan ide maupun gagasan orisinalitasnya.

"Selama iri anak didik kami sudah kami perkenalkan sekaligus kami ajari mengarang sesuai ide ataupun gagasan mere-

ka sendiri. Mereka pun kami beri kebebasan penuh untuk menuangkan cerita bergambar atau tulisan," ujar Endang yang juga adalah Kepala Sekolah Dasar Laboratorium Unesa (dulu IKIP Negeri Surabaya—Red).

Dikatakan, persoalan mengarang dalam pendidikan nasional sesungguhnya bukan karena anak didik tidak memiliki kemampuan untuk menuangkan ide atau gagasan dalam bentuk tulisan atau karangan ilmiah, namun lebih disebabkan karena anak didik tidak dibiasakan menulis dalam proses belajar di sekolah.

"Di Australia anak didik kelas satu sekolah dasar setiap akhir tahun sudah diwajibkan membuat tulisan pendek, sementara di negara kita kebiasaan menulis tidak dibiasakan sejak usia dini," ujar Endang. Dikatakan, pelajaran mengarang dalam pendidikan nasional kita sebenarnya pernah diterapkan pada kisaran tahun 1960-an. "Sewaktu saya sekolah rakyat, pelajaran mengarang ada. Namun, sejak tahun 1960-an, setelah adanya perubahan-perubahan kurikulum, pelajaran mengarang tidak lagi diajarkan pada anak didik," ujarnya. (tif)

Kompas, 20 September 2000

Sistem Pengajaran Sastra Perlu Diubah

Jakarta, Kompas

Sistem atau pola pengajaran sastra secara "tradisional" seperti yang selama ini dilakukan, perlu segera diubah. Di era kesejagatan, sistem pengajaran yang dituntut harus lebih menekankan pada aspek bimbingan kritik dan apresiasi sastra.

Demikian pandangan Puji Santoso, peneliti di Pusat Bahasa, dalam salah satu sidang kelompok pada Seminar Nasional X Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI), 27-29 September 2000, di Jakarta. Dr Hafid Abbas (Universitas Negeri Jakarta) dan Prof Dr Nurcholish Madjid (Universitas Paramadina Mulya) yang semula dijadwalkan hadir pada sidang pleno, ternyata berhalangan sehingga sidang pleno kemarin hanya diisi Dr Acep Hidayat dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

Dalam pola pengajaran sastra yang selama ini banyak dianut, kata Puji, siswa lebih banyak dicekoki kegiatan menghafal nama-nama pengarang, ringkasan isi cerita, konsep-konsep syair, pantun, dan gurindam saja. Tak heran bila banyak orang menci-

bir pola pengajaran sastra di sekolah, lebih-lebih melihat kenyataan betapa kurang profesionalnya guru sastra dalam menangani bidang garapannya.

Menghadapi kenyataan ini, Puji menyarankan pola "baru" yang ia sebut dengan "bimbingan kritik dan apresiasi sastra". Pola ini bertujuan melatih siswa agar memiliki kepekaan sosial, bisa mencerap nilai-nilai keindahan yang terkandung dalam karya sastra sebagai pesan moral, filsafat hidup, dan mampu merasakan keartistikan bahasa yang digunakan dalam karya sastra tersebut.

"Bimbingan dilakukan tidak hanya sepihak—hanya siswa yang kreatif sedangkan gurunya tidak—tetapi hendaklah bersa-

ma-sama dalam proses belajar-mengajar di kelas," kata Puji.

Menurut dia, salah satu metode yang dapat dilakukan untuk membantu pencapaian tujuan tersebut adalah dengan menerapkan apa yang ia sebut jalur 5-M, yaitu menyimak, membaca, melisankan, menulis, dan menjawab semua persoalan. Pada permulaan pelaksanaannya memang guru yang terlihat aktif, akan tetapi selanjutnya justru siswa yang harus aktif dan kreatif mengikuti pelajaran apresiasi sastra. Adapun peran guru hanya bertindak selaku perangsang, pendorong, pembimbing, dan fasilitator bagi siswa.

"Sudah barang tentu, untuk bisa bertindak seperti itu diperlukan seorang guru sastra yang menguasai materi pelajaran, bertindak adil dan bijaksana, berwawasan luas, sabar, dan penuh kasih dalam membimbing siswanya belajar mandiri," tutur Puji.

Tes bahasa Indonesia

Sementara pada sidang pleno yang menghadirkan Dr Acep Hidayat dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, persoalan penguasaan bahasa Indonesia dan pasar kerja bagi tenaga

asing sempat menjadi topik hangat. Dalam kaitan keberadaan tenaga-tenaga asing itu, Acep berharap, Pusat Bahasa atau HPBI dapat menjadi lembaga kompetensi yang memberikan sertifikat penguasaan bahasa Indonesia bagi orang asing yang akan bekerja di Indonesia. Dengan begitu, ketika era pasar be-

bas datang, tenaga-tenaga asing yang masuk untuk bekerja di Indonesia bisa disaring.

"Persyaratan penguasaan bahasa Indonesia dalam *profesional requirement* dengan skor tertentu akan menyaring pekerja asing yang masuk ke Indonesia, sekaligus bisa meningkatkan apresiasi bahasa Indonesia," katanya.

Dalam era globalisasi dan pasar bebas, tenaga kerja Indonesia dipastikan akan mendapatkan pesaing dari tenaga kerja asing yang akan masuk ke Indonesia. Saat ini, masuknya tenaga kerja asing masih dapat diatur melalui keputusan Menteri Tenaga Kerja. Aturan itu menegaskan bahwa hanya jabatan-jabatan tertentu saja yang boleh dijabat tenaga kerja asing, se-

dangkan di tingkat bawahnya harus warga negara Indonesia.

Akan tetapi, situasi ini akan berubah jika pasar bebas yang tertuang dalam perjanjian AFTA dan WTO diberlakukan. Pemerintah tidak dapat lagi memberikan perlindungan yang bersifat diskriminasi. "Indonesia tidak bisa lagi membatasi hanya jabatan tertentu saja, akan tetapi harus memperbolehkan semua jabatan dalam semua sektor. Oleh karena itu, salah satu cara untuk membatasinya adalah melalui uji kompetensi penguasaan bahasa Indonesia.

Secara teknis, demikian Acep, standar baku tes penguasaan bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan mengacu seperti persyaratan *Test of English for International Communication* (TOEIC) untuk dipergunakan dalam dunia kerja. "Keuntungan lain yang langsung dapat diperoleh dari tes penguasaan bahasa Indonesia semacam ini adalah pemasukan devisa. Asalkan jangan sampai duit menjadi prioritas dan tujuan utamanya," ujar Acep Hidayat. (mam/ken)

Apresiasi

Imaji-imaji Surealistik Tjahjono Widarmanto

Oleh: Ahmadun Yosi Herfanda, wartawan Republika

Mungkin benar kata Sutardji Calzoum Bachri, era kepenyairan Indonesia 1980-an adalah *era pembebasan imaji*. Elaborasi terhadap kata-kata yang marak dilakukan para penyair di tahun 1970-an, dengan berbagai upaya pembebasan kata serta pemanfaatan musikalitas dan kandungan nuansa kata, menurutnya, telah berakhir pada awal 1980-an.

Upaya pembebasan imaji memang mulai menggejala pada karya-karya penyair generasi 1980-an, seperti Wahyu Prasetya, Afrizal Malna, dan Remy Novaris DM. Pada karya-karya banyak penyair generasi ini yang berkumpul dalam *Temu Penyair Indonesia (TPI) 1987* di Taman Ismail Marzuki, gejala itu juga sudah mulai tampak. Bersamaan dengan itu, mulai muncul pula gaya puisi surealis. Bahkan, beberapa penyair, seperti Soni Farid Maulana dan Bambang Widiatmoko, dalam sebuah pertemuan sastra di Yogyakarta pernah bersepakat untuk menggulirkan semacam 'gerakan surialisme' dalam perpuisian Indonesia.

Tetapi, karena isu yang banyak terangkat ke permukaan ketika itu adalah fenomena sastra sufistik, fenomena puisi surealis — juga pembebasan imaji — itu tidak begitu banyak mendapat sorotan dari para pengamat sastra. Sutardji sendiri yang saat itu membahas karya-karya peserta *TPI 1987* tidak mengupas fenomena tersebut, dan baru

tampak memperhatikannya belakangan ini.

Upaya pembebasan imaji — atau dapat disebut sebagai upaya dekonstruksi konsep pencitraan konvensional — itu sebenarnya membuka fenomena yang menarik dalam perpuisian Indonesia. Konsep-konsep pencitraan (pengimajian), terutama pencitraan visual seperti yang dianut penyair imajis Sapardi Djoko Damono, dan secara sempurna dirumuskan oleh Alton C Morris, mulai banyak ditinggalkan.

Imaji-imaji dibiarkan hadir dan tumbuh secara liar, dan membangun imaji sendiri, yang tidak lazim, yang aneh, di benak pembaca. Kadang-kadang imaji-imaji itu tampil secara surealistik mirip cerpen-cerpen surealis Putu Wijaya yang membongkar kelaziman logika, imaji-imaji hadir menjadi 'teror' di kepala pembaca. Tapi, kadang-kadang juga hadir sebagai 'rimba gelap' yang tanpa pintu bagi pencari makna, sekaligus bisa juga hadir sebagai sekadar mosaik benda-benda, atau deretan kata-kata tanpa makna, yang jungkir balik dan centang perenang logika pencitraannya.

Kecenderungan itu memuncak pada awal 1990-an yang mengental pada fenomena Afrizalian, dengan sederet pengikut. Sementara pengamat sastra menyebut gaya sajak-sajak Afrizal — dan beberapa pengikutnya — sebagai 'surealisme urban-industrial' karena banyak menampilkan benda-benda yang menjadi simbol kehidupan kaum urban. Yang sulit menemukan istilah yang tepat untuk sajak-sajak seperti itu lantas menyebutnya sebagai 'puisi gelap' — yang kemudian dikontrol dengan 'sajak terang'.

Titik arus balik kecenderungan itu adalah polemik tentang puisi gelap yang bergulir di harian ini (*Republika*), yang dipicu oleh tulisan hasil wawancara Yos Rizal Suriaji dengan Sutardji Calzoum Bachri, dan merambat ke beberapa media lain. Para penganut 'sajak terang' — yang masih meyakini pentingnya bangunan imaji yang utuh dalam puisi untuk mengantarkan makna kepada pembaca — pun mulai banyak melakukan *counter* terhadap kecenderungan sajak gelap itu. Hasilnya, seperti ditemukan Sutardji, kecenderungan 'sajak terang' yang meyakini peran puisi sebagai pembawa 'misi pencerahan' pun menguat kembali sampai sekarang.

Walaupun begitu, upaya penyair untuk membebaskan puisi dari konsep pencitraan konvensional tidak berakhir begitu saja. Banyak di antara mereka yang tetap berusaha keras mencari alternatif pencitraan baru. Salah satunya adalah mengalihkan konsep pencitraan konvensional itu ke pencitraan yang surealistik — yang gejalanya juga sudah

tampak pada awal 1980-an. Upaya itu, antara lain dilakukan oleh Tjahjono Widarmanto, penyair yang sajak-sajaknya kita apresiasi kali ini. Simak, misalnya, sajak *Riwayat* berikut ini.

*di kepalanya tiba-tiba mendekam
seekor ular
mendesis-desis. beranak pinak di
tiap sel kelenjar otak
(persis ulat-ulat yang menggero-
goti sebuah
apel di genggamannya)*

digedornya pintu langit

*bukankah telah kau tukar keaba-
dianmu
dengan secuil kelamin syahwat?*

*langit lantas menjulur sulur-
sulurnya
mulailah ia meluncur merambat-
inya
lantas, terperangkap dalam
selokan tua*

*mulailah perjalananmu.
mewaspada kebodohan sendiri,
sembari menguntit matahari!*

*riwayat itupun dimulai
sejarah kelak mencatatnya
sebagai
sebuah rindu yang sia-sia,
anak-anak akan menjadikannya
sebuah legenda sepetak kebun-
yang
hilang bersama segenap prasasti-
nya.*

*(ular-ular di kelenjar kepalanya
itu.*

Masih saja berdesis-desis)

Bait pertama sajak di atas hadir dengan imaji-imaji yang surealistik, aneh, tidak lazim, bernada 'teror' dan gelap maknanya. Bayangkan saja, di kepala seseorang tiba-tiba mendekam seekor ular yang mendesis-desis. Ular itu beranak-pinak di tiap sel kelenjar otaknya — persis ulat-ulat yang menggero-

goti apel di tangannya.

Dan, orang yang berkepala demikian itu menggedor pintu langit (?) sambil berteriak, "bukankah telah kau tukar keabadianmu dengan secuil kelamin syahwat?"

Meski hadir sebagai bangunan imaji yang surealistik, pembaca atau penganalisa karya di atas mungkin gampang menangkap gambaran visual yang dibangun penyair. Tapi, apakah makna imaji itu? Rasanya cenderung gelap. Pendekatan struktural — mengutip Culler (1977) — menyebutkan bahwa analisis sastra (puisi) adalah upaya untuk menangkap makna dan memberi makna kepada teks sastra. Sebab, karya sastra merupakan struktur makna atau struktur yang bermakna, karena karya sastra itu merupakan sistem tanda yang mempunyai makna.

Dengan pendekatan struktural saja kita tidak gampang mengupas makna sajak di atas, meskipun dibaca secara keseluruhan sebagai satu keutuhan karya. Membaca judulnya, orang mungkin akan teringat riwayat Adam AS, tetapi juga tidak tepat benar. Atau, itu adalah riwayat seseorang yang entah siapa. Barangkali diri penyair sendiri, atau seseorang yang dikenal penyair dan orang itu berotak jahat (penuh ular). Tapi, ini juga simbolisasi yang kurang lazim.

Pelekatan simbol ular pada manusia biasanya untuk melukiskan sosok yang munafik, licin, berbelit dan dan jahat (suka menyakiti orang lain). Tapi, biasanya cukup disimbolkan sebagai 'manusia berkepala ular' atau cukup menjulukinya 'ular beludak'. Barangkali, Tjahjono memang sengaja mendekonstruksi simbol-simbol yang lazim untuk melukiskan karakter manusia. Imaji-imaji ia biarkan hadir secara liar untuk mencari maknanya sendiri — yang berbeda-beda — di kepala tiap pembacanya.

Karena itu, makna sajak *Riwayat* di atas sulit dikupas dengan hanya menggunakan pendekatan struktural. Yang lebih tepat, mungkin, adalah pendekatan *resepsi* atau

estetika resepsi seperti yang dikembangkan oleh Hans Robert Jaus (1969). Dengan pendekatan yang didasarkan pada tanggapan-tanggapan atau resepsi-resepsi pembaca ini akan ditemukan makna atau citra keindahan yang berbeda-beda atas sajak di atas. Sajak menjadi *multi-interpretable*, memiliki banyak makna, atau menurut istilah Sutar-dji memiliki banyak pintu untuk menemukan makna-makna yang beragam. Tapi, bisa jadi orang tidak dapat menemukan pintu sama sekali, karena merasakan hanya ada kegelapan.

Citra surealistik yang cenderung gelap itu juga terasa pada sajak-sajak Tjahjono yang lain, seperti *Panorama Malam*, *Lukisan Retak* (1-3) dan *Peta-peta yang Terbakar di Bola Matamu*. Pada bait pertama sajak yang disebut terakhir itu ia menyusun citra surealistik begini:

*gerimis yang tumpah di kaki senja
ini*

*tiba-tiba menghadirkan bau ram-
butmu yang panjang terurai
melintasi puing-puing kota yang
tandus.*

*ada suara biola mengiris kaki
langit*

*saat bola matamu yang selalu
berkaca-kaca*

*pecah memuntahkan seribu peta
yang terbakar.*

Terasa sekali, penyair tidak begitu peduli, apakah bangunan imaji pada baris-baris sajak di atas logis atau tidak, lazim atau tidak. Ada gerimis yang tumpah di kaki senja, ada suara biola yang mengiris kaki langit, ada bola mata yang pecah memuntahkan seribu peta yang terbakar.

Benarlah kata pakar intertekstualitas Julia Christeva, selalu dibutuhkan teks lain untuk menafsirkan sebuah karya sastra. Karena itu, pembebasan imaji dipraktekkan sebagai 'pemutusan hubungan' teks sastra (puisi) baru dengan teks yang ada sebelumnya, ia akan cenderung hadir sebagai 'kegelapan' yang nyaris tidak menyediakan pintu untuk menemukan maknanya. ■

Romantisme dalam kesahajaan

Di belahan bumi mana-pun romantis-me umumnya selalu meng-ambil tempat di pojok-pojok ruangan yang sepi. Namun itu tidak berlaku bagi pengarang semacam Kurnia Usman.

Pengarang kelahiran Tanjung Serian, Palembang, pada 11 Agustus 1940, itu boleh dikatakan telah berhasil menempatkan romantisme bukan di pojok-pojok ruangan yang sepi, tetapi di tempat yang biasa dan datar-datar saja.

Itu setidaknya bisa dilihat dari *Surat Kepada Jenderal* yang memuat 13 cerpen terakhirnya ini. Dalam cerpen yang tertajuk *Romansa di*

Judul: *Surat Kepada Jenderal (kumpulan cerita pendek)*; **Penulis:** K. Usman; **Penerbit:** CV Fifamas; **Cetakan:** pertama, Juli 2000; **Tebal:** x + 172 halaman.

Kafe Mawar [hal. 1] atau *Edelweis yang Terbakar* [hal. 139], Usman ingin menunjukkan bahwa cerpen yang penuh romantisme tidak harus dikemas dengan tema yang serba hebat, tetapi cukup dengan tema keseharian yang wajar dan datar.

Karena itu tidak berlebihan jika Corry Layun Rampan, rekan pengarangnya, berko-mentar bahwa keunggulan romantisme cerpen K. Usman justru terletak pada kedatar-

annya, 'kebiasaannya' dan bukan pada hal-hal yang serba hebat.

Maklum, di mata Corry, Usman dikenal sebagai pe-

ngarang yang menganut ma-zab realis. Ia tidak bisa lepas dari tema-tema keseharian masyarakat yang sederhana dalam tulisan-tulisannya.

Namun bak seorang pema-hat ulung, Usman mampu menyulap tema-tema sederhana tersebut menjadi sesuatu yang luar biasa. Menjadi sesuatu yang sangat berharga. Itulah mengapa Corry sering mendudukkan Usman sebagai *story teller* sekelas Mo-tinggo Busye.

Tapi kedekatannya dengan realita tersebut ternyata menciptakan imbas tersendiri bagi Usman. Saking dekatnya dengan realita, cerpen-cerpen-nya sering tergelincir menja-di apa yang disebut 'jurnalisme fiksional' atau karya jurnalistik yang difiksikan. (psf)

Sastrawan Perlu Tradisi Perenungan

JAKARTA — Sastrawan Indonesia Indonesia belum memiliki tradisi perenungan. Akibatnya, kebiasaan para seniman melakukan perenungan terhadap pandangan-pandangan mendasar jadi kurang terlatih.

Begitu dikatakan pengamat sastra, Jakob Sumardjo, di Jakarta, kemarin. Ia menyatakkan hal itu sebagai jawaban atas pertanyaan *Republika*, tentang tiadanya karya sastra yang dapat memunculkan inspirasi gerakan sosial.

Kurangnya tinjauan filosofis dalam karya sastra Indonesia, tambah Jakob, pernah dipersoalkan Sutan Takdir Alisjahbana (STA) di era tahun 1930-an. Menurut STA, tiadanya karya sastra yang kurang tinjauan filosofisnya, menjadikan Indonesia belum mempunyai seniman sastra. Yang ada baru juru tulis cerita. "Karya-karya Pram (Pramoedya Ananta Toer — Red), sebenarnya juga sudah menggegerkan. Tapi, baru di forum diskusi-diskusi intelektual," ujar Jakob.

Lalu Jakob menjelaskan, seandainya sastrawan Indonesia mempunyai tradisi perenungan terhadap makna

mendasar, sastrawan Indonesia bisa melahirkan karya sastra yang bisa memberi inspirasi gerakan sosial. "Karya sastra yang bisa memberi inspirasi gerakan sosial, adalah karya sastra yang penuh perenungan filosofis, dan mempunyai stimulus konteks sosial yang berada pada situasi penuh krisis. Situasi itu akan mengundang tanda-tanya, situasi yang menantang."

Tantangan hebat, papar Jakob, sebenarnya sudah muncul di era tahun 1980-an sampai 1990-an. Di era itu bangsa Indonesia telah mengalami krisis kemanusiaan yang akut. Tapi yang terjadi, kata Jakob, hanyalah munculnya karya sastra yang kecil-kecil. "Sekadar ada," tandas Jakob. Tiadanya karya kebiasaan perenungan mendasar itu, terjadi karena tiadanya suasana bersaing dalam berkarya di kalangan sastrawan.

Penyair Danarto masih mengaku merasa gamang ketika mempersoalkan peranan sastrawan. Dalam sebuah diskusi kecil di Taman Ismail Marzuki pertengahan September lalu, Danarto bahkan melontarkan pernyataan naif, yakni, "Mengapa tak ada

kalangan ilmiah yang mengutip pendapat sastrawan yang tertuang dalam karya-karya mereka."

Bagi Danarto, meski karya sastra hanya berupa fiksi, sudah sepatutnya jika karya sastra itu juga mengandung kebenaran, meski itu bukan kebenaran agama. Tapi karena sastra tak dilirik, Danarto lantas merasa sanksi ada tiadanya kandungan kebenaran yang dimiliki karya sastra.

Tapi di mata pengamat sastra Tommy F Awuy, meski terhitung sedikit, ada karya sastra yang bisa memberi inspirasi bagi gerakan sosial. Cerpen-cerpen karya Taufik Ikram Jamil ataupun puisi karya Sutardji Calzoum Bachri, dipandang dosen filsafat Universitas Indonesia itu, bisa memberi inspirasi bagi masyarakat Riau menuntut kemerdekaan.

Lebih lanjut Tommy bercerita, Taufik Ikram berhasil membuat cerpen yang mengangkat kembali makna amuk, yang dulu pernah dilakukan oleh pahlawan Melayu, Hang Tuah. Sutardji, juga berhasil mengangkat makna amuk itu, untuk masyarakat Riau kini. ■ py

Republika, 27 September 2000

Sastrawan Harus Berani Tentukan Pilihan

YOGYA (KR) - Sebagai upaya mengembangkan potensi kreatif, seyogianya dalam berkarya sastrawan tidak menjelajahi semua kemungkinan bentuk sastra. Sastrawan harus berani menentukan pilihan apakah sebagai penyair, cerpenis, novelis, esais, atau kritikus.

Demikian dikatakan salah seorang pengurus Yayasan Ronggowarsito Yogya dan cerpenis Teguh Winarsho AS kepada *KR*, Minggu (24/9). Seorang sastrawan harus berani mengambil sikap kesastrawanan yang diikuti sebagai sebuah profesi, baik material maupun spiritual. Dengan sikap seperti itu, diharapkan sosok sastrawan akan senantiasa identik dengan karya-karya yang diciptakannya.

Dikatakan, berdasar pengalaman, kegagalan sastrawan (muda) untuk bisa bertahan selama ini salah satu penyebabnya adalah menjelajahi semua kemungkinan dalam berkarya. Seorang sastrawan mengembangkan naluri kesastrawanan dengan menulis tidak hanya pada satu *genre* karya saja,



KR-HARYADI

Teguh Winarsho AS

dan akhirnya akan kehabisan 'nafas'.

Hal itu disebabkan potensi yang ada dalam dirinya sebenarnya tidak memenuhi kualifikasi *generalis*. Pada akhirnya, menurut Teguh, sastrawan yang berkarya di semua *genre* sastra justru patah di tengah jalan. Hal itu disebabkan, bahwa sebenarnya tidak semua sastrawan punya kemampuan untuk masuk ke seluruh wilayah kreatif.

Teguh lalu menunjuk sastrawan seperti Goenawan Mohamad, Umar Kayam, Kuntowijoyo, Ahmad Tohari, Zawawi Imron, Afrizal Malna, Abdul Hadi WM, Taufiq Ismail, Ahmadun Yosi Herfanda, YB Mangunwijaya (alm), Linus Suryadi (alm), Agus Noor, Joni Ariadinata, Indra Tranggono dll, yang hanya berkarya di satu *genre* sastra sebagai sastrawan yang berhasil dan mampu bertahan.

Sedangkan sosok Rendra yang hingga kini dikenal sebagai penyair, pembaca puisi, prosais dan dramawan, menurut Teguh, ingin ditiru oleh sastrawan generasi setelah Rendra. Padahal, lahirnya Rendra dalam khasanah kesusastraan Indonesia, disebabkan oleh potensi diri sekaligus karena dukungan zaman yang mengiringi perjalanan kesastrawanan dan hidupnya. "Sulit rasanya menemukan sastrawan seperti Rendra yang mampu berkarya di semua *genre* sastra, yang semuanya tetap dengan kualitas memadai," katanya. (M-1)-m

Sastrawan Harus Mampu Membongkar Ketidakadilan

Jakarta, Kompas

Ketidakadilan terhadap perempuan dapat diperjuangkan lewat karya sastra. Dengan ketajaman pena dan gagasannya sendiri, seorang sastrawan harus mampu membongkar berbagai perlakuan tidak adil yang selama ini terjadi dan dianggap wajar oleh masyarakat.

Pendapat tersebut diungkapkan oleh sastrawan Indonesia NH Dini dalam diskusi buku karya NH Dini *Pada Sebuah Kapal* yang diselenggarakan oleh Fakultas Sastra Universitas Indonesia (FSUI) di Jakarta, Jumat (29/9).

Dalam kisah *Pada Sebuah Kapal*, Dini ingin menanggapi nasib empat perempuan bernama Sri. Keempat perempuan itu, katanya, sering datang menceritakan kisah-kisah hidup mereka. Perjumpaan dengan mereka ternyata menghasilkan ide perjuangan terhadap perempuan.

"Tentu, semua ini tidak terlepas dari pengalaman saya di masa kemerdekaan, terlebih pengalaman hidup bersama petani-petani pemetik dan pengangkut cabai," katanya.

Diskriminasi yang dilakukan pemilik lahan terhadap

para perempuan petani ternyata sangat menyentuh hati nurani Dini. Di masa lampau, paparnya, perempuan petani hanya mendapat upah Rp 750 per hari, sedangkan laki-laki mendapat Rp 1.250. Alasannya, perempuan tidak dapat mengangkut keranjang cabai, sedangkan pria mampu. Namun, ketika Dini menanyakan langsung kepada perempuan petani, ternyata perempuan-perempuan itu bersedia. Sayangnya, kata Dini, tekad itu ditandaskan oleh pemilik lahan dengan menyebutkan alasan yang tidak masuk akal.

Inti perjuangan

Karena pengalaman itulah, Dini terdorong menuliskan inti perjuangannya tentang peranan perempuan yang harus dihargai sederajat sebagai manusia. Bukan didiskriminasikan dan terus-menerus dianggap lemah. Dini menyayangkan kalau akhirnya para pembaca novel ini hanya memusatkan perhatian pada perempuan. "Sebenarnya, saya ingin menunjukkan kepada kaum lelaki bahwa begitulah perasaan perempuan," tambahnya.

Bermodal dari pengalaman,

pengamatan, membaca, dan mendengar, ia menuliskan gagasannya tentang perempuan pada novel tersebut. Menurut penuturannya, novel tersebut bukanlah kisah nyata dirinya. Novel tersebut hanya hasil rekaman dari kebebasan pikiran dan perasaannya.

Kesuksesan NH Dini dalam mengupas secara jeli perasaan-perasaan perempuan, juga diakui Prof Dr Sapardi Djoko Damono, kritikus sastra, penyair, dan guru besar FSUI. Sapardi mengatakan, sikap yang menonjol pada Dini justru terletak pada ungkapan perasaan perempuan yang lebih dari sekadar konsep-konsep.

Inilah yang membedakan karya NH Dini dengan karya-karya sastra pengarang laki-laki. Dini mampu mengisi kekurangan-kekurangan yang dilakukan sastrawan laki-laki, katanya.

"Sastrawan laki-laki, seperti Armijn Pane dan Mochtar Lubis, cenderung menunjukkan bahwa tokoh perempuan yang diciptakan laki-laki lebih merupakan konsep, yakni apa yang oleh laki-laki dianggap perempuan, sedangkan Dini sangat berbeda," tegasnya. (p27)

Kompas, 30 September 2000

Editing Karya Sastra masih Lemah

Lemahnya editing atas karya sastra dapat melemahkan pendidikan apresiasi sastra.

DEPOK — Hampir semua penerbit buku di Indonesia memiliki kelemahan di bidang penyuntingan (editing). Akibatnya, banyak buku berisi karya sastra yang penulisannya kurang sempurna dapat meluncur ke pasaran.

Menurut penyair Sapardi Djoko Damono, kelemahan editing memang mewarnai penerbitan buku-buku sastra di Tanah Air. "Akibatnya, banyak karya sastra yang ditulis asal-asalan oleh penulisnya, tapi tak dikoreksi oleh editornya, kemudian bisa terbit begitu saja," ujarnya dalam diskusi membahas karya-karya NH Dini, kemarin.

Diskusi membahas karya NH Dini sendiri merupakan bagian program *Sastrawan Bicara Mahasiswa Membaca*, yang digelar di Fakultas Sastra Universitas Indonesia (FSUI) Depok, Jawa Barat, Jumat (29/9). Program yang diadakan Yayasan Indonesia, Majalah Horison, FSUI, dan Ford Foundation itu menghadirkan sastrawan NH Dini sebagai narasumber dan Sapardi hadir sebagai pembahas.

Menurut Sapardi, lemahnya bidang editing di kalangan penerbit Indonesia bisa melemahkan pendidikan apresiasi sastra. Sapardi mengakui, saat ini banyak penulis muda yang mempunyai

kelemahan berupa keengganan mengedit ulang karya-karya mereka. Sekali tulis langsung jadi. Padahal, kata Sapardi, karya sekali-tulis-langsung-jadi itu belum tentu berkualitas baik.

Karena itu, ia menyarankan agar penulis muda selalu membaca ulang karya mereka, kemudian bersedia mengoreksinya sendiri, sehingga menemukan kualitas karya yang memadai. "NH Dini adalah salah satu sastrawan yang selalu membaca ulang karyanya, dan kemudian memperbaiki bagian-bagian yang dirasanya kurang sesuai, sehingga menjadi karya yang berkualitas," tutur Sapardi.

Kendati begitu, nasib buruk tetap saja menimpa NH Dini. Pernah terjadi, sebuah novel menjadi kacau-balau karena kelemahan editor dalam mengedit karyanya. Maka, Sapardi merasa perlu melontarkan kegalauannya itu, lantaran penerbit ternama pun juga melakukan kesalahan serupa di bidang editing, sehingga seorang NH Dini harus menahan marah karena novelnya diacak-acak editor penerbit ternama itu. "Seharusnya, editor yang bekerja di sebuah penerbitan, harus lebih pandai dari pengarang," tegas Sapardi.

Menurut Sapardi, adalah kewajiban editor mengedit tulisan siapa pun yang hendak diterbitkan, baik itu penulis kawakan ataupun pendatang baru. Di AS, kata Sapardi, seorang Hemingway, atau John Grisham pun mengalami pengeditan atas tulisan-tulisan mereka. "Grisham, misalnya novelnya diedit dari 750 halaman menjadi hanya 400 halaman," ujar Sapardi. Tapi kata Sapardi, editor yang mengeditnya tak merusak bahasa Grisham. Untuk mengedit dari 750 halaman menjadi hanya 400 halaman, tentu membutuhkan kepintaran yang luar biasa.

NH Dini sendiri mengakui, novelnya yang berjudul *Je-*

pun Negerinya Hiroko di-'ce-tak coba' oleh Penerbit Gramedia. Tapi editornya, menurut NH Dini membuat kesalahan dengan mengubah kalimat-kalimatnya. "Yang tadinya berupa kalimat pendek diubah menjadi kalimat yang sangat panjang. Sehingga dalam satu kalimat terdapat empat kata penghubung 'yang'. Dalam tiga kalimat berturut-turut, ada pengulangan kata yang sama di setiap kalimat," papar penulis novel *Pada Sebuah Kapal* itu.

NH Dini mengatakan, yang dilakukan editor bukannya menghemat kata-kata, melainkan malah menghambur-hamburkan kata. "Cara mengeditnya sangat tidak bijak."

Saya betul-betul marah karenanya," tegas penulis novel *Kemayoran* itu.

Selama dua hari, NH Dini mengaku tercenung melihat edisi 'cetak coba' itu. Kemudian ia menulis surat kepada Gramedia, menunjukkan hasil editing yang buruk itu, dan tentu saja menanyakan usia editornya. "Gramedia kemudian minta maaf dan mengatakan editornya adalah editor baru," jelas NH Dini.

NH Dini mengakui, selama ini, ia selalu berdebat dengan pihak penerbit untuk pilihan kata yang ia pakai dalam novelnya, termasuk dalam pemilihan kata untuk judul. Novel *Pada Sebuah Kapal*, misalnya, ia sengaja memilih 'Pada' daripada 'Di' yang diajukan oleh penerbit. "Saya memilih 'pada' karena pertimbangan keputisan dan lebih menarik perhatian," ujar NH Dini.

Ia mengaku sering berdebat dalam soal pemilihan kata dalam judul. Walau begitu, ia juga mengaku pernah puas dengan hasil suntingan editor penerbit. Editor yang ia maksud ialah Ajip Rosidi yang tahun 1973 menyunting novelnya yang diterbitkan Dunia Pustaka Jaya. ■ pry

Republika, 30 September 2000

Dari Perkampungan Penulis Rantau Melayu III *Menganyam Air Mata Sejarah*

BADAI turun dari laut seperti memburu sesuatu di daratan. Curahan air hujan membentuk suatu figura meliuk-liuk, mengepung tempat diskusi dalam kegiatan Perkampungan Penulis Rantau Melayu (PPRM) III yang tanpa dinding di sebuah puncak bukit di tepi pantai nan elok, Pulau Rempang, Batam. Namun, tempas air hujan tak mampu dielak sekitar 100 peserta acara yang diprakarsai Pusat Pengkajian Bahasa dan Kebudayaan Melayu (P2BKM) Universitas Riau dan Kekerabatan Keluarga Besar Melayu (KKBM) Batam tersebut.

Gurauan penyair Sutardji Calzoum Bachri yang selalu menghangatkan suasana tak terdengar. Tan Sri Ismail Hussein, Ketua Gabungan Penulis Nasional (Gapena) Malaysia, menunduk. Penyair dan pelukis Malaysia, Siti Zainon Ismail,

berkali-kali memandang laut, sedangkan dosen FSUI Maman S. Mahayana, *tepinge-pinge*—memandang ke sana ke sini dengan gelisah. Terdengar suara kayu berderak, orang berlari mencari perlindungan, bunyi pohon tumbang di jalan yang mulai menjadi bubur. Satu jam penuh teka-teki dan ancaman.

"Tak apalah... Keadaan macam ini selalu dirasakan orang-orang kampung, sedangkan kita?" tutur penyair dari Kelantan, Malaysia, Abdul Hadi. Tak ditanggapinya tentang beberapa penulis yang angkat kaki, lalu sungut panjang sejumlah peserta ketika acara dilanjutkan di bawah tenda yang lecak—tak lagi di tempat diskusi yang memang sudah porak-poranda.

Hadi mengaku masih bisa bertahan setelah panitia memindahkan kegiatan ke sebuah hotel di Batam karena melihat

Menganyam Air Mata Sejarah

sebagian besar tempat tidur basah, kuyup dan aliran listrik sempat putus. Belum lagi mengingat badai yang dapat datang setiap saat karena waktu itu memang musimnya. Angin bergerak dari barat, melintasi Selat Malaka.

Cuma saja, keadaan tempat PPRM III 3-7 September 2000 lalu itu jauh lebih memadai dari tempat acara serupa yang pertama, yakni di Tanjung Rhu, Rupert, Bengkalis, akhir tahun 1997, meskipun soal kenangan bisa macam-macam. Waktu itu, untuk mencapai dan meninggalkan kampung, peserta harus terjun dulu ke laut yang airnya sebatas pinggang sejauh 700 meter. Air busuk bercampur lumpur, itu pun harus berebutan.

♦♦♦

TENTU bukan hanya mencari sesuatu yang unik mengapa PPRM dilaksanakan di kampung-kampung, bahkan kadang-kadang sengaja membuat kampung. Kenyataannya seperti di Malaysia, Thailand, dan Filipina, di Riau juga orang-orang Melayu lebih banyak berada di kampung-kampung. Ketika dikunjungi, mereka setidak-tidaknya merasa tidak sendiri, sementara penulis dapat merasakan pahit-manis kehidupan di kampung. "Kami merasa bangga dan ternyata tidak ditinggalkan," ujar Pak Itam (60-an), tokoh masyarakat di sekitar arena PPRM III.

Agaknya, semangat serupa yang menyebabkan Ketua KKBM Batam Drs Nyat Kadir dan pengusaha Ahmad Mipon SE bertungkus lumus menyelenggarakan acara ini. Mipon, misalnya, dalam waktu lima minggu, membangun 37 rumah leng-

kap dengan segala keperluan perkampungan, seperti listrik, MCK, balai, dan kedai-kedai—termasuk jalan sepanjang 5 kilometer—untuk PPRM III ini. Ke depan, tempat itu dijadikannya Taman Khazanah Melayu. "Saya kagum, semoga rezeki Pak Mipon terus bertambah," kata Ketua Otorita Batam Drs Ismeth Abdullah sebagaimana juga diungkapkan Sutardji dan Ismail Hussein.

Ismeth sendiri merasa "berkepentingan" dengan kegiatan kebudayaan ini. Soalnya, kata Ismeth, Batam memang memerlukan roh yang dapat diposisikan oleh kesenian Melayu sebagai kebudayaan asli Batam. Tak mengherankan kalau Ismeth bersama istrinya, Aida, yang dijuluki sebagai kakak kandung seniman Riau, mendukung sebagai kegiatan budaya Melayu di Batam yang marak dilaksanakan dalam dua tahun terakhir.

Di balik semangat Pak Itam, Nyat Kadir, dan Ahmad Mipon, yang dibantu dukungan oleh Ismeth Abdullah itu—bahkan di balik serangan badai di atas—berbagai keadaan pahit dan harapan manis Melayu jelas terbacca dalam diskusi-diskusi maupun pembacaan karya sastra PPRM III. Melayu yang terpecah-pecah dalam geopolitik yang keras, yakni berada pada berbagai negara berdampingan, juga bagaimana wilayahnya "diserbu" para pendatang atas kepentingan ekonomi, merupakan tantangan sekaligus harapan penulis sebagai salah satu pilar kebudayaan.

♦♦♦

TAK bisa lain, sebagaimana diungkapkan Sutardji, harapan maupun tantangan penulis itu

haruslah diisi dengan upaya memberi makna masa lalu dan masa kini. "Melayu bukan dipandang dari sejarahnya saja, tetapi menggumulinya (sejarah—Red) dengan kekinian yang melahirkan Melayu baru sebagaimana disebutkan Ismeth Abdullah," ujar Sutardji yang membuka PPRM III, didampingi Wakil Gubernur Riau Rustam S. Abrus. Sebelumnya, Sutardji dipasangi tanjak (penutup kepala Melayu) oleh Pak Itam.

Memang, kesadaran terhadap sejarah sangat terasa pada PPRM, bahkan semakin mengental pada PPRM III yang diikuti penulis Riau, Malaysia, dan Singapura. Sebuah buku kumpulan cerpen dan sajak misalnya, sengaja diterbitkan untuk PPRM III, bertajuk *Air Mata 1824*. Tahun 1824, ditandatangani Traktat London yang memisahkan kawasan Selat Malaka bagian selatan di bawah pengaruh Belanda (Riau) dan

bagian Utara di tangan Inggris (Malaysia dan Singapura).

Bagi Riau, kata Wakil Ketua Panitia PPRM III Drs Sujianto MSI, peristiwa tersebut amat traumatik karena pusat Kemaharajaan Melayu waktu itu berada di Riau dengan wilayahnya mencapai sebagian Malaysia sekarang, termasuk Singapura. Belum lagi sejarah yang menyertainya, semisal perintah ganyang Malaysia oleh Soekarno yang justru berpangkalan di Riau. "Sejarah itu jelas berlumuran air mata. Tetapi mari kita anyam sejarah menjadi indah dalam hamparan kreativitas," ujar Sujianto.

Sejumlah sastrawan bahkan sudah melakukan apa yang dikatakan Sujianto itu setidaknya sejak tahun 1980-an. Sampai pada karya sastrawan baru seperti Syaukani Al-Karim, Hang Kafrawi, Murparsau-

lian, Samson Rambah Pasir, Hoesnizar Hood, dan Junewal Muchtar, sejarah menjadi masa kini—bukan semata-mata sebagai latar belakang—sehingga menampilkannya sebagai sesuatu dengan kepribadian terbalik.

"Dirimu yang sekarang bukan lagi sejarah yang kaubaca, ia membentuk diri dalam tanganmu sendiri," tulis Syaukani pada sajaknya *Membaca Diri* dalam buku *Air Mata 1824*. Juga dalam sajak *19.00 Wib; Membaca Jakarta* Hoesnizar Hood dalam buku serupa menyebutkan, *dari bulang/ tempat penjajah kami membakar melaka/kami membaca wajahmu di make-up molek/dari gemerlap pancar lampu tujuh pelangi//*. Dalam sajak *riau*, Hang Kafrawi berkata, *air mata disulingkan lewat pipa-pipa waktu ke tangki-tangki sejarah yang koyak... (ti)*

Kompas, 28 September 2000

Titis Basino Terbitkan Novel Baru

DUNIA karya sastra Indonesia, kembali diperkaya dengan hadirnya novel *Hari Yang Terbaik (HYT)* karya Titis Basino PI yang diluncurkan Selasa (26/9) di Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Depok.

Novel *HYT* merupakan lanjutan dari novel *Garis Lurus, Garis Lengkung (GLGL)* karya pengarang wanita asal Magelang tersebut. Namun sayang, dalam peluncuran buku itu, sang pengarang tidak dapat hadir. Menurut Koordinator Acara Maman S Mahayana, sejak Jumat (22/9) pagi, Titis harus dirawat di Rumah Sakit Jakarta karena menderita perdarahan otak.

Meskipun demikian, acara peluncuran dan bedah buku *HYT* tetap dilangsungkan. Pembahas terhadap buku *HYT* adalah Dr Riris K Toha Sarumpaet dengan moderator pengarang Korrie Layun Rampan. Novel *HYT* mengisahkan kelanjutan hidup Melati seorang wanita pelacur kelas atas yang akhirnya dipersunting seorang pria baik-baik.

"Meskipun ini merupakan lanjutan dari karya sebelumnya, pengarang menampilkan sisi lain dari kehidupan sang tokoh utama yang berbeda dari sebelumnya. Pembaca seakan digiring untuk meneruskan mempelajari watak dan karakter dari sang tokoh yang telah hidup baru itu," ungkap Riris.

Ia menjelaskan, pada novel, *GLGL* pengarang menampilkan sejumlah sisi gelap, sedih dari tokoh Melati dalam narasi keakuan. Selain itu, pengarang secara monoton membawa pembaca untuk berhubungan dengan tokoh Melati saja, tentang bagaimana kehidupan, cita-cita dan perasaan terhadap tokoh lain di sekelilingnya.

Tetapi sebaliknya dalam novel *HYT*, pengarang pada bagian awal menampilkan

sisi terang dari sang tokoh penuh harapan yang baik, damai dan menyenangkan. Selain itu penulis menggiring pembaca pada berbagai kemungkinan. "Dalam novel ini terasa atmosfer yang penuh gairah sambil mengantar pembaca untuk memahami karakter lain di luar tokoh utama," kata Riris.

Pengarang secara sengaja membuat alur cerita yang lebih lebar sehingga tiba-tiba dapat berubah dengan cepat. Selain itu, pengarang pandai menyisipkan nasehat dan pesan-pesan moral bagi pembacanya. Seperti "...*Aku akan meminta kepasrahan ini dengan memohon cintanya. Karena cinta tanpa landasan cinta ilahi akan sia-sia saja...*".

Namun, kelemahan dalam novel tersebut para tokoh yang ditampilkan pengarang memiliki karakter yang sangat lugu sehingga terkesan dipaksakan. Gaya bahasa dari sang pengarang sangat indah dan terasa manis sehingga meredam setiap kejutan dan letupan-letupan dalam bercerita. Selain itu, pengarang terkesan mengulur waktu dengan tiba-tiba menampilkan suasana mistis di tengah-tengah alur cerita.

"Terlepas dari semuanya itu, pengarang benar-benar menulis *HYT* dengan sungguh-sungguh. Ia mengolah berbagai pertanyaan tentang sukma dan jiwa dalam setiap narasinya sehingga mampu memainkan emosi pembaca," kata Riris.

Titis Basino tergolong pengarang wanita yang produktif. Wanita kelahiran 17 Januari 1939, telah menghasilkan puluhan karya novel dan cerpen. Dalam karya-karyanya, Titis selalu menampilkan kisah kehidupan dari tokoh-tokoh yang tidak diterima masyarakat umum dengan kelancaran bercerita yang menampilkan rasa puitis dan romantis. (WM/W-9)

Harus Ada Kritik Sastra untuk Karya Puisi

Kota, Warta Kota

Satu hal yang hingga kini belum terpenuhi dalam dunia perpuisian nasional adalah keberadaan pertanggungjawaban para pengamat sastra terhadap penilaian-penilaian atas karya puisi yang selama ini berlaku di masyarakat.

Hal itu ditegaskan penyair asal Denpasar, Oka Rusmini, saat dihubungi Warta Kota melalui telepon, Selasa (12/9) siang. "Selama ini belum pernah ada evaluasi atau kritik terhadap karya-karya puisi yang dilombakan atau yang dimuat di media cetak atau yang dibukukan. Padahal, kritik merupakan wujud dari pertanggungjawaban pengamat kepada masyarakat," ujarnya.

Hal senada dikatakan penyair Achmadun Yossy Herfanda. Redaktur salah satu harian nasional ini mengatakan, penyair Angkatan 1990-an bernasib kurang beruntung, karena tidak mempunyai kritikus sastra seperti HB Jassin, misalnya. "Sebagus apa pun karya seorang penyair,

tak akan pernah terangkat jika tidak pernah ada kritikus yang mengevaluasinya," katanya.

Jika suatu karya puisi dimuat di media cetak atau bisa menang dalam sebuah lomba, menurut Oka, ada sesuatu yang lebih pada karya tersebut dibandingkan karya-karya yang lain.

"Maka, kelebihan serta kekurangan itu harus disebutkan. Kalau perlu, karya yang jelek dibantai sekalian, agar gaungnya terdengar. Lebih dari itu, agar para penyair muda bisa memahami kekurangan mereka," papar penyair yang salah satu cerpennya terpilih sebagai 10 cerpen terbaik tahun 2000 pilihan Majalah *Horison* itu.

Oka maupun Achmadun berpendapat, kritik harus

ada demi menindaki lanjut kegiatan perpustakaan, termasuk terhadap kegiatan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) semacam program penghargaan atas kumpulan puisi terbaik 2000. Selain itu, lanjut mereka, hal ini bermanfaat untuk mengangakat karya-karya puisi yang muncul beragam di era 1990-an, sekaligus merupakan peluang bagi penyair untuk menguji karya sekaligus meningkatkan gairah menciptakan.

Kalau perlu, karya yang jelek dibantai sekalian, agar para penyair muda bisa memahami kekurangan mereka...

Pamor puisi

Lebih jauh, kedua penyair tersebut juga menolak anggapan bahwa pamor puisi kalah oleh karya sastra lainnya.

"Siapa bilang puisi telah mati? Pamor puisi justru paling tinggi. Setidaknya, ini jangan disetarakan dengan masalah laku atau tidaknya buku-buku puisi. Contohnya, puisi lebih sering dipanggungkan, di TIM misalnya. Dan bahkan sekarang ini semakin ba-

nyak media yang bersedia menerbitkannya," kata Achmadun.

Menurut Oka, justru novel yang tampak jarang disentuh oleh sastrawan.

"Masih lebih banyak yang memilih menulis puisi. Karena untuk membuat novel itu butuh data, harus melakukan penelitian, dan berbulan-bulan mengetik di depan komputer," katanya.

"Meski tidak bisa dibilang mudah, namun ada sesuatu yang indah yang di-

tangkap masyarakat dari suatu karya puisi," tambahnya.

Achmadun mengakui, dari segi bisnis, puisi kalah laku ketimbang novel. Pasalnya, pembaca puisi itu eksklusif. "Apresiasi masyarakat terhadap puisi masih kurang, dan hanya orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan untuk menafsirkan puisi, seperti kalangan pengamat karya sastra, misalnya," ujar Achmadun. (yus)

Warta Kota, 13 September 2000

Puisi Indonesia Masih Bergairah

Cikini, Warta Kota

Aktivitas cipta sastra, khususnya di bidang perpuisian, di Indonesia sesungguhnya terus bergerak dinamis. Tidak mandeg, apalagi semaput. Demikian kesimpulan dari pembicaraan Warta Kota dengan sejumlah pengamat sastra dan penyair pada beberapa hari terakhir ini.

Program Penghargaan Kumpulan Puisi Terbaik 1998-2000 yang diselenggarakan Pusat Kesenian Jakarta (PKJ), misalnya, mendapat respons cukup baik dari kalangan penyair. Hamsad Rangkuti, salah seorang anggota Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), menyatakan optimistis dengan animo masyarakat terhadap kegiatan tersebut. Sampai saat ini baru 25 naskah yang didaftarkan untuk dinilai.

"Kalau melihat semakin banyaknya buku kumpulan puisi yang diterbitkan dalam kurun waktu dua tahun belakangan ini, kami optimis akan banyak penyair yang tertarik ikut

mendaftar. Pengalaman kami pun mengatakan, menjelang batas akhir pendaftaran biasanya terjadi ledakan jumlah peserta," ujar Hamsad yang ditemui di kantor DKJ, komplek Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jumat (8/9).

Menurut pengamatan cerpenis yang juga Sekretaris Dewan Pengurus Harian DKJ ini, jumlah terbitan buku puisi memang belum sebanyak novel atau cerpen yang dimuat di media cetak. Tapi, katanya, hal tersebut bukan berarti puisi tidak diminati, melainkan penerbit menganggap puisi karya penyair baru belum layak jual. "Mereka cenderung menerbitkan puisi

para penyair besar seperti WS Rendra, dan Sutardji yang jam terbangnya sudah teruji," katanya.

Ditambahkan Hamsad, penyair baru pun terus lahir dan gairah menulis mereka pun besar, bahkan karyanya pun tidak kalah dengan seniornya. Ia mencontohkan, jumlah puisi yang dikirim ke Majalah Sastra *Horison* ternyata lebih banyak ketimbang jumlah cerpen. "Ini menunjukkan animo yang besar dari masyarakat terhadap puisi," ujarnya.

Namun diakuinya, tingkat apresiasi masyarakat terhadap puisi belum begitu besar dibandingkan dengan peminat cerpen atau novel. Hal tersebut dinilai Hamsad akan berpengaruh pada kegairahan penyair.

Hamsad melihat, secara geografis peta perpuisian saat ini didominasi penyair daerah Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Bali, Sumbar, dan Sulawesi. "Ia menyebut sejumlah nama penyair muda yang belakangan produktif, semisal Agus R Sardjono, Soni Farid Maulana, Jamal D Rachman, Oka Rusmini, dan Achmadun Y Herfanda. (yus)

Warta Kota, 9 September 2000

Siapa Bilang Puisi Mati?

KATA siapa puisi Indonesia mati?" tanya Taufiq Ismail.

Penyair *Benteng* dan *Tirani* ini menolak keras anggapan bahwa sastra Indonesia sedang sepi puisi. Sebagai indikator berdegupnya jantung kehidupan perpuisian, Taufiq menunjuk banyaknya buku kumpulan puisi dan karya sastra lain yang terbit baru-baru ini. Juga maraknya acara pembacaan puisi yang diminati publik serta munculnya penyair-penyair baru.

Dari pengalamannya mengasuh majalah sastra, Taufiq melihat animo anak muda terhadap sastra dan keinginan mereka untuk menciptakan sastra malah meningkat. Taufiq malah mengaku kewalahan menangani karya sastra yang dikirimkan untuk diterbitkan di *Horison*.

Hal senada diungkapkan oleh Sapardi Djoko Damono. Sastrawan yang juga guru besar Fakultas Sastra Universitas Indonesia ini malah mengatakan

puisi adalah salah satu bentuk kesenian yang paling berkembang saat ini.

"Puisi itu populer dengan cara lisan. Memang tidak banyak yang baca puisi. Tapi kalau ada deklamasi, pasti banyak yang datang," jelasnya ketika dihubungi di kampusnya, Kamis (7/9).

Sastrawan yang tidak mempercayai pembagian angkatan sastra itu malah bilang bahwa sekarang ini banyak sekali seniman muda yang bisa menggantikan sastrawan senior. Dan ke-

banyakan sastrawan baru tersebut berasal dari daerah. Ia menyebut Gus TF Sakai dari Sumatera Barat, Acep Zamzam Noor (Jawa Barat), dan Do-

rothea Rosa Herliany (Jawa Tengah).

Pengganti Rendra, Sutardji Calzoum Bachri, Taufiq Ismail, atau saya sendiri sudah berlimpah.

Puisi memang

tak punya banyak penonton seperti sepak bola atau telenovela tapi ia masih mendapat apresiasi yang sangat baik dari masyarakat," jelasnya. (sra)

Puisi memang tak punya banyak penonton seperti sepak bola atau telenovela...

BUKU KUMPULAN PUISI TERBITAN 1999-2000

Terbitan Indonesia Tera

1. *Celana*, Joko Pinurbo, Juni 1999
2. *Di atas Umbria*, Acep Zamzam Noor, November 1999
3. *Mahasukka*, Arif B Prasetyo, Mei 2000
4. *Masih Bersama Langit*, Eka Budianta, Mei 2000
5. *Air Mengukir Ikan*, Juniarso Ridwan, Mei 2000
6. *Kita Lahir Sebagai Dongengan*, Soni Farid Maulana, kumpulan sajak, Juni 2000
7. *Aku Ingin Jadi Peluru*, Wiji Thukul, kumpulan sajak, Juni 2000

Warta Kota, 9 September 2000

SUTARDJI CALZOOM BACHRIBila Presiden *Ogah* KKN

Bagaimana bila seorang presiden *Ogah* KKN. Tanyakan kiatnya kepada **Sutardji Calzoum Bachri**. Ceritanya, karena tak mau KKN, pria yang menobatkan dirinya sebagai "Presiden

Penyair" itu berkali-kali menolak karya muridnya untuk dipublikasikan di rubrik budaya yang diasuhnya di sebuah media massa. Meski sudah kenal dekat dengan Medy Loekito, penyair wanita yang jadi muridnya itu, tak berarti membuat Tardji — panggilan akrab sang presiden — mudah meloloskan puisi-
puisi orang dekatnya itu.

Berkali-kali Tardji mengembalikan puisi Medy yang dikirimkan kepadanya, dan ia pun berkali-kali selalu mengingatkan Medy agar terus memperbaiki puisinya. "Saya malu, karena Medy adalah murid saya. Karenanya saya tak memuatnya," ujar Tardji, yang kini menjaga

rubrik budaya di sebuah harian nasional. Kalau dimuat, itu namanya KKN.

Menurut Tardji, Medy selalu ia mentor ketika membuat puisi. Tapi, setiap kali Medy mengirim puisi kepadanya, untuk dimuat di rubrik yang ia asuh itu, setiap kali itu pula ia menolaknya. Tardji lantas mengoreksi puisi-puisi Medy kata per kata, mulai dari pilihan kata untuk judul sampai ke isi dan kata sambung. "Puisi pendek itu harus hemat kata. Setiap kata begitu mahal harganya," ujarnya.

Menurutnya, puisi-puisi Medy masih banyak kekurangannya. Medy mengungkapkan sesuatu dengan kata-kata verbal, yang seharusnya dihindari dari puisi, terlebih puisi pendek. Medy memang suka membuat puisi-puisi pendek. "Ide-ide Medy sebenarnya sudah bagus. Tapi ia kurang bisa mengambil spirit kata-kata sehingga sugestinya tidak muncul. Kalau saya perbaiki, puisi-puisi Medy itu tentu menjadi bagus. Tapi saya tak perlu melakukannya, biar ia sendiri yang memperbaikinya," tutur Tardji, ketika menilai puisi-puisi Medy, di Taman Ismail Marzuki, pekan lalu.

Itulah contoh anti KKN-nya Tardji. Medy pun maklum dan tak berani menyuap sang presiden. ■ pry

Republika, 25 September 2000

SUTARDJI CB**Puisi Murid Sendiri**

R. 15/9-2000
Kagum terhadap sajak Sutardji Calzoum Bachri? Oke oke saja, asalkan tak menjadi muridnya, demi popularitas. Kenapa? Presiden Penyair Indonesia itu enggan diajak KKN.

Keengganan tersebut dialami Medy Loekito. Penyair perempuan itu pun berguru kepada Sutardji. Asyik *dong*, bukankah perkoncoan di kalangan penyair, terkadang dapat melambungkan seseorang. Medy sebagaimana diakui Sutardji, rajin mengirimkan sajaknya kepada sang mentor. Maklum penyair asal Riau ini, kini menjadi redaktur tamu Sastra Budaya, di sebuah harian nasional.

Dimuat? "Saya malu karena Medy adalah murid saya. Karenanya saya tak memuatnya," tukas Sutardji, belum lama ini di TIM Jakarta, saat menilai sajak-sajak Medy. Tapi, maklum guru yang baik, penyair yang pernah tersohor dengan bir saat membacakan sajak itu menoreksi sajak Medy kata demi kata. "Puisi pendek itu harus hemat kata. setiap kata begitu mahal harganya," ujarnya.

Di mata Tardji — demikian panggilan karibnya — sajak Medy acap kali verbal dalam pengucapannya. "Ide-ide Medy sebenarnya sudah bagus. Tapi ia kurang bisa mengambil spirit kata-kata sehingga sugestinya tidak muncul. Kalau saya perbaiki, puisi-puisi Medy itu tentu menjadi bagus. Tapi saya tak perlu melakukannya, biar ia sendiri yang memperbaikinya," ujarnya.

■ pry

Republika, 15 September 2000

'Penyair tak Boleh Berhenti pada Puisi'

Hal lumrah yang sering dilakukan penyair muda adalah membaca puisi dengan intonasi keras-teriak. Inilah kesalahan para penyair muda itu, sehingga orang susah memahami puisi yang sedang mereka bacakan. Pun tak mampu membangun suasana meditatif, kendati puisi-puisinya berpotensi memunculkan suasana tersebut.

Tak luput, Toto ST Radik (Serang) dan Hamdy Salad (Yogyakarta), melakukan hal itu ketika tampil dalam acara *Baca Puisi Tiga Kota* yang digelar oleh Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jumat (8/9) lalu. Penyair lain, Medy Loekito (Jakarta), tampil dengan intonasi datar dan monoton.

Publik pun susah memahami puisi mereka jika hanya mengandalkan pembacaan seperti itu. Apalagi, tak banyak yang mendapatkan *copy* naskah puisi-puisi yang mereka bacakan itu, meski Toto ST Radik menjual *copy* naskah puisinya. Sutardji Calzoum Bachri pun memilih tidak memberi komentar pada puisi-puisi Toto, karena ia tak memegang naskah puisi penyair yang giat berkesenian di Serang itu. "Maaf saya tak bisa mengkritik puisi Toto," ujar Tardji.

Puisi-puisi ketiga penyair itu sebenarnya berpotensi memunculkan suasana meditatif-sugestif, karena sifatnya yang kontemplatif. Bahkan, Hamdy Salad berani mengaku, puisi-puisinya lebih gelap dari puisi-puisi Toto Radik dan Medy Loekito. Puisi gelap pernah muncul di

awal dekade 70-an, dan kemudian mempunyai gerbong panjang di kalangan penyair muda, dengan puisi yang benar-benar gelap, tak bisa dipahami publik.

Toto mencoba mengangkat persoalan masa lalu ke dalam puisinya. Ia mencoba mengurai nilai-nilai yang terkandung dari peradaban masa lalu. Karena ia berasal dari Serang, ia banyak mengungkapkan peradaban kerajaan di Banten.

Medy, penyair yang sehari-harinya menjadi karyawan sebuah perusahaan Jepang, mencoba bergumam dengan

kalimat-kalimat pendek dalam puisinya. Ia menampilkan kegigihannya untuk selalu menggeluti puisi-puisi pendek. Tapi, kata-kata yang dipilih penyair yang sudah menerbitkan dua antologi tunggal itu, kurang mampu menghadirkan keheningan. Meski ia menyebut keheningan, kesepian, tapi dengan kata-kata verbal.

Tengoklah puisi *Sketsa Malam: malam hening/ di atap/ kucing mengintai bulan*. Medy banyak melakukan kesalahan seperti ini. Ketika membicarakan daun kering yang berguguran misalnya, secara verbal, ia menyebut daun kering, dan sebagainya dan sebagainya. Medy yang senang menulis puisi pendek, tampak kurang bisa memilih kata-kata yang lebih sugestif. Maka, penyair Sutardji Calzoum Bachri pun mengkritik habis puisinya, sejak dari pilihan kata hingga penggunaan kata sambung.

Medy, kata Sutardji, masih terlalu banyak mengobrol

kata. Ia masih menggambarkan suasana secara fisik, sehingga menutup peluang publik merangsang diri untuk menciptakan suasana yang tak terungkap. "Padahal, dalam sajak pendek setiap kata begitu mahal," ujar Tardji.

Bagi Tardji, rahasia puisi pendek justru terletak pada halaman kosong yang tak tersebut dalam kata. Maka, jika mau bicara daun kering yang berjatuhan, tak perlu mengatakan ada daun kering yang berguguran. "Kalau sepi diucapkan dengan kata-kata, tentu menjadi ramai," ujar Tardji.

Penyair yang gemar menulis puisi pendek, kata Tardji, selayaknya membiarkan halaman kosong itu berbicara, sehingga keheningan itu mengemuka. Maka, dari 13 puisi yang dibacakan Medy, hanya satu yang dipuji Tardji, yaitu puisi *Le Parfait: batu/ di bening bulan*. Puisi ini dinilai Tardji mengandung misteri. Karenanya menjadi indah. "Itulah puisi pendek."

Hamdy Salad, penyair lulusan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, banyak mengangkat persoalan sosial. Tapi, karena ia mampu meyembunyikan fakta di balik imajinasi, puisinya tidak menjadi sarkasme. "Hamdy bisa membuat protes sosial, tapi tak terlihat protesnya," ujar Tardji. Benar adanya. Lihatlah puisi berjudul *Dering 500 Miliar*.

Puisi itu berangkat dari kasus Ketua DPA Baramuli dan Rp 500 Miliar. Tapi, di pena Hamdy, 500 Miliar menjelma menjadi butiran darah, bukan gemerincing uang. Ia

juga menjelma menjadi biji-biji tasbih, menjadi butir sperma, yang menguap dari 200 juta tubuh. Sebagaimana kasusnya yang tak tuntas, penyair yang juga rajin menulis cerpen dan esai ini pun mencatat: *...Kemanakah engkau akan mengeluh?!*

Namun, hal sama yang juga dilakukan Hamdy, sebagaimana dilakukan Medy, adalah menyebut sesuatu secara verbal. Meski Hamdy kaya imajinasi, tapi dalam hal-hal tertentu ia juga kurang cermat memilih kata, sehingga tampak jelas. Mencermati kalimat-kalimat Hamdy, seolah menemukan kenyataan bahwa ketika

Hamdy ingin mengatakan dada, ia mempertegas dengan menempatkan tangan pada dada. Itulah gambaran puisi Hamdy.

Menurut Tardji, Hamdy sering terjebak pada pemilihan kata yang bersifat sloganistik, mengiringi kata-kata imajinatif sebelumnya. Seperti terlihat dalam puisi *Bayi-bayi Berteriak: ...anak dunia menagih nyawa/ menembus jantung di dada....* Atau juga kalimat *...tangan-tangan menjelma senapan/ dalam pertarungan sampai mati....*

Menurut Sutardji, kalimat *menembus jantung di dada, ataupun dalam pertarungan sampai mati*, terasa kental sifat slogannya, ketimbang sebagai kalimat yang imajinatif. Kata Tardji, hal ini mengganggu pencapaian suasana sugestif yang maksimal.

Tapi, menurut Danarto, penialain puisi dengan pedekatan kebahasaan sudah tak layak lagi. Menurutnya, yang perlu ditangkap adalah roh-nya. Roh puisi Toto dan Hamdy, menurut Danarto, adalah pengumbaran emosi, yang kemudian menjebak kedu-

anya, juga mengumbar emosi ketika membacaknya.

Sedangkan untuk puisi Medy, menurut Danarto, terlihat adanya upaya penekanan emosi. Danarto pun lantas mencoba mengagumi Medy. "Bagaimana mungkin, seorang penyair bisa menahan emosinya, seperti yang dilakukan Medy. Itu luar biasa," kata Danarto.

Bagaimana pun, bagi Tardji, puisi-puisi ketiga penyair itu rata-rata bagus. "Selepas polemik di masa puisi gelap, terus-menerus bermunculan puisi-puisi bagus dari penyair-penyair muda. Cuma, bagaimana kelanjutannya, mereka harus berupaya terus berkarya untuk menjadi penyair nomor satu, itu yang harus mereka lakukan," kata Tardji memberi nasihat.

Tardji menegaskan, tentu mereka tak boleh puas hanya sebagai penyair dengan karya puisi bagus. Sebab, tak akan banyak orang yang membaca puisi mereka. "Tapi kalau menjadi penyair nomor satu, tentu pembacanya akan semakin banyak," ujar Tardji.

■ priyantono oemar

Puisi dari Bali

BOLEH dikata sejak tahun 1980-an para penyair (di) Bali mulai dikenal memberikan sumbangan pada perpuisian nasional. Bila bicara Bali tentang seni, orang tidak hanya menyebut pencapaian Pulau Dewata ini dalam senirupa, atau tari, tetapi juga sastra mulai dipercekapkan. Tetapi, apakah pencapaian mereka dalam puisi setara dengan apa yang telah mereka capai dalam seni lukis atau tari, misalnya, tentulah sejumlah sajak yang saya tampilkan di sini tidaklah cukup sebagai *sample* untuk memberikan jawaban. Tidak semua penyair yang juga kuat dan menarik seperti Frans Nadjira, Tan Lioe Ie, dan lain-lain ditampilkan di sini. Lagipula berhubung keterbatasan ruangan hanya beberapa sajak dari masing-masing penyair yang dapat dimuat.

SEHUBUNGAN dengan kegandrungan pada keragaman yang sekarang sudah merembak dan hampir pula menjadi slogan, membaca sajak dari Bali cenderung akan timbul pertanyaan dari para pembaca apakah yang Bali dari karya-karya penyair (di) Bali. Sebagaimana halnya para penyair di mana pun mereka dilahirkan atau menetap, mereka bukanlah katak di bawah tempurung. Mereka mengembara baik secara fisik maupun lewat hati dan pikiran, berinteraksi dengan berbagai kebudayaan lain atau kebudayaan dunia. Sebagaimana pula tampak dalam beberapa sajak yang ditampilkan di sini yang juga memanfaatkan idiom-idiom non-Bali. Jadi menentukan yang

Bali dari para penyair (di) Bali bukanlah hal yang gampang, bukan hanya karena pengaruh atau interaksi tadi itu, tetapi mungkin terutama sesuatu yang roh itu, jiwa, spirit, semangat, selalu hidup bergerak memperbaharui dirinya sendiri dengan halus kadang tersamar, dan tak mudah untuk sekali lintas bisa melihatnya. Diperlukan jarak waktu dan sajak yang banyak dari masing-masing penyair agar agak mudah memahami adanya kualitas dan intensitas dari kehadiran roh atau semangat serta identitas ekspresi dari suatu daerah budaya sesuai dengan perkembangan zaman. Ungkapan daerah yang muncul dalam puisi tidak langsung begitu saja puisi menjadi unik, karena itu dengan mudah dibubuhkan secara tidak berjiwa

(artifisial) sekadar untuk menghibur para pembaca-turis yang memang lebih suka menikmati kulit luar (eksotik).

Tak ada yang "lembut dan menyenangkan" dalam sajak Oka Rusmini (ia mengirimkan sekitar duapuluh sajak, yang sayang tak bisa dimuat semuanya karena keterbatasan tempat). Sajak-sajaknya penuh dengan suasana sadis, ngeri dan menjijikkan: api, darah, ulat, belatung, bangkai manusia, muntah, lendir perempuan. Bahkan sajak bisa berupa muntahan: "sajak kau muntahkan untuk seorang perempuan" (*Ulat*). Dan obsesi terhadap lelaki kerap muncul. Hampir di setiap sajaknya selalu ada kata lelaki. Di suatu sajaknya berjudul 1992 ia berucap: "Api itu terus menjilati

tubuhku. Lelakikuh kau?". Dan di sajak yang lain: "hanya lelaki lelaki yang ada dalam pori-pori otakku". (Sajak 15-06-1998).

Bagi saya membaca puisi Oka Rusmini seperti berada dalam ruang yang menyakitkan, pahit, namun agaknya memang diperlukan jalan berduri atau obat pahit untuk sampai pada pence-
rahan: "Potong nadi sebelum menelan pil puisi". (Tarot).

I Wayan Arthawa agaknya lebih mampu menulis sajak yang bersuasana alam yang dikaitkan dengan diri (*Pertemuan Musim*), dibanding dengan sajaknya yang bernuansa sosial (*Jangan Biarkan Pertiwi Jadi Sungai Darah*): "Jangan biarkan pertiwi/dialiri sungai darah/dari luka manusia/karena kabut kehidupan/hati yang gelap/membuat kita saling bermusuhan". Kalau yang mengucapkan ini Amien Rais, Mathori Abdul Jalil, Megawati

Soekarnoputri, Khofifah Indar Parawansa dan semacamnya, saya bisa sangat kagum karena terasa ada kesadaran puitik pada para tokoh politik. Tetapi, jika ini ditulis oleh penyair, saya hanya bisa prihatin karena ini terbilang ungkapan klise dalam kualitas penyair.

Putu Visi Lestari, dengan larik-larik pendeknya, saya kira untuk mendorong pembaca meningkatkan intensitas renungan pada *enjambement* itu. Dari dua sajak yang ditampilkan kelihatan penyair muda usia ini (19 tahun) memiliki bakat kuat, dan bakal memberikan kekayaan bagi khazanah perpuisian Indonesia di Bali bersama-sama para penyair pendahulunya: Umbu Landu Paranggi, Warih Wisatsana, Putu Fajar Arcana, dan Nanoq da Kansas (Wayan Udiyana), yang sajak-sajaknya tampil juga di sini. ♦

SUTARDJI CALZOOM
BACHRI

Puisi Puisi

Nanoq Da Kansas

Merindukan Hening Bayu Semesta

kemudian tak kubicarakan sementara pohonan
atau
barisan daun ilalang yang pernah menggores
bahumu. Angin menelikung cakrawala
mengambilmu dari bau tanah pedusunan kita
lalu pada cahaya merkuri atau televisi
engkau bahkan tak akan disinggahi debu

sebagaimana engkau ketawa di atas punggungku
membayangkan kuda menembus bebukitan
pada putaran eskalator plaza pun engkau
akan dibujuk untuk dewasa
menempuh waktu bagai taksi yang dirundung
persaingan demi persaingan dan
di manakah ibumu? Lelapkah engkau memeluk
rimba animasi yang dikirim iklan di hari
ulang tahunmu?

tak akan kubicarakan sementara waktu kampung
halaman nenek moyangmu yang lugu
cakrawalaku sebatas bukit. Sedangkan
jemari jalanan beraspal yang meyatinkanmu
berlipat lipat mendekap telingamu
untuk terhindar dari jeritan
seekor merpati yang mengabarkan rinduku

Warid Wisatsana

Lebih Tua

Andai bayangmu
lebih tua dari dirimu
la menjelma sebelum kau lahir
lalu pergi mengikutimu
kemana pun sembunyi.

Sewaktu engkau kecil
la girang menuntunmu menari
Bersil lirik ke angin
agar topan tak turun
Bersil ke air agar tak hanyut perahumu.

Di masa indah remajamu
la bernyanyi merdu
yang membuat setiap batu
tersedu selalu merindu,
Setiap kelopak bunga meliuk terbuka.

Bayang adalah kekasih tubuh,
ingin pasrah jadi tawanan terang.

Di remang dinding, kadang menyelinap
lenyap
serupa gelap. Atau tengadah
ke awan merah, seolah rubah yang hilang arah.

Sekali waktu dengan samaran payung hitam
Terisak ia di kelok setapak, jalan sunyi setapak.
Mendengar, menyaksikan dua letusan bergema di remang pagi;

Seorang gadis yahudi, seorang prajurit nazi
Sia-sia mati. Jari mungil lunglai,
sejengkal dari topi merah jambu. Dari seikat bunga,
perlambang kekal, segala yang ingin kekal!

Lihat, bayangan mereka kini meratap dalam gelap.
Tangan muram saling genggam,
melangkah sedih.

Melangkah menjauh dari dingin tubuh,
dari amis darah dan genangan amarah

Nanoq Da Kansas

Ke Buleleng Pulang Ke Jembrana

setelah hutan ini — pohonan yang memanggul langit bahkan lebih ikhlas dari nasibnya sendiri,
kita jelang percakapan panjang : secarik songket tua, kalung pelangi dan potongan bambu melapal mantra.

pernah aku membangun kampung berpilar wargasari anak cucu siwa-budha berusuk adzan negeri loloan beratap rumbai kerudung mastuli dara pegayaman
jadilah engkau tanah; ladang anggur di denbukit hijau kelapa pesisir jimbarwana biar impas kiriman laut lewat jala-jala perahu melayu bugis ke gunung sampai ke lembah-lembah o, nusantara kecil di bibir bali assamalu alaikum semoga damai!

kini kutengok lagi rumahku setelah sejarah menetapkan dirinya hampir di puncak kecemasan : tetaplah tanah! tetaplah rindu! memelihara anak-anak zaman atas nama puisi, cinta yang hakiki seperti hutan memanggul langit lebih ikhlas dari nasibnya sendiri om santhi santhi santhi, semoga

oka rusmini

Ulat

peristiwa: 14-05-1995

sebuah pintu kubuka dengan darah. impian-impian pecah di genggam tangan berharap sepotong daging menambal lubang yang rajin dicangkul seorang perempuan yang pernah memintaku jadi anaknya sebuah pintu kubuka dengan luka "jangan mendekat. bara di tanganku akan membakarmu" tapi aku tak punya sungai tidak juga laut. sajak kau muntahkan untuk seorang perempuan. sebuah pintu kututup. mata lelaki itu datang padaku. Berpuluh-puluh tahun dia sembunyikan rahasia kami

"kau miliki permainan itu. Jangan mendekat. Perahu layar. Laut yang kuuntai. Huruf-huruf yang kusedar dipejam matamu"

Sebuah jendela kubuka (penuh belatung. Bangkai manusia. sepotong kepala anjing. lendir perempuan)

1999

Umbu Landu Paranggi

Ni Reneng

Sebatang pohon nyiur
meliuk di tengah Denpasar
(akar akarnya memeluk tanah
dan tanah memeluk akar akarnya)
sudah terangkai sekar setangkai
menimba hawa tikar pandan
anyaman bulan di pelataran
maka kuapung apungkan diri
berayun dan beriring menghilir
telah tereguk air telaga
dalam satu tarikan nafas
bangau tak pernah risau
akan warna helai teratai
lalu menebal dasar telaga
melayani turun naiknya embun
datang dan perginya sekawanan pipit
perdu saja mengerti keresahan langit
sandaran sikap kepala kita
dalam rimba babad prasasti
dan ritus tabuh tarian...

selembar demi selembar daun sirih
menyalakan perbincangan senja senja
dalam perjalanan meraut kecemasan
antara sehari hari kefanaan
dan arah keabadian
sepasang mata angin
disini, di pusaran jantung Bali

ibu, biar bersimpuh rohku
pada kedua tapak tanganmu
bekal kesepi malam malam mantram
memetik kidung cipratan bening embun
menyusuri jelajahan jejak aksara
menjaga kemurnian rasa dahaga
dan lapar gambelan sukma kelana

jika kematian kebahagiaan kayangan
maka sia sia derita mengempang raga
masih misteri sisa warna matahari
lalu kubaca baca keriputmu
(kemana mana jalanan basah
bayang bayang pohon peneduh)
dan gelombang riang dirambutmu
sebumbang kesadaran sunyi
melautkan permainan cahaya
kesabaran ombak memintal pantai
jukung jukung cakrawala menjaring angin
sambil mempermainkan punggung ta-
ngan
dan telapak bergurat rahim semesta
kata ibu keindahan itu
sedalam seluas samudera mistika
menyangga langit kerinduan kita
bersama kutemui pondok didasar laut
dimana bunga bunga bermekaran
harum bau nyawa tarian
dan semerbak syair selendang purba

Denpasar, Oktober-November 1984

Putu Fajar Arcana

Julurkan Lidahmu Kuta

Rasanya kita pernah bertemu, kekasih.
Kau julurkan lidahmu. Aku terperangkap
dalam keramaian yang asing
Kita pernah bersepakat tentang laut
yang cemburu pada warna kulitmu. Melepuh
terbakar matahari.
Aku diam saat kau mencium kakiku.

Sambil menghirup udara panas
seorang ibu tersipu:
"Massage, Sir! Mari berteduh
di kerindangan pohon kecil itu," katanya.

Tapi kita selalu berselisih jalan
tentang keteduhan. Saling cemburu
berebut pasir dalam bayangan
rambutmu yang terbakar.
Aku diam saat kau memintal rambutku.

Honey, apakah kau pernah cemburu, honey.
Dalam keramaian
udara milik siapa saja.
Lidahmu bisa menjilati tubuh siapapun.
Tapi senja tak selalu
menyepuhkan samar sinarnya.
Dan kau kehilangan sebelah matamu.

Kita selalu tak sepakat
tentang lidah yang asing.

1995

I Wayan Arthawa

Jangan Biarkan Pertiwi Jadi Sungai Darah

Jangan biarkan pertiwi
dialiri sungai darah
dari luka manusia
karena kabut kehidupan
hati yang gelap
membuat kita saling bermusuhan
persentuhan jiwa taruhannya nyawa
pembunuhan tak terbendung
menari dalam aliran sungai darah

Jangan biarkan pembunuhan menari
di bumi pertiwi ini

Hidup manusia buah semadi-Nya
lewat kesabaran dan kasih-Nya

Hidup ini
kita perlu merenung
menatap langit kesabaran
menjauhkan awan gelap menyelimuti nurani
bersihkan dengan doa perdamaian

Manusia saling memerlukan
satu dengan lainnya
Saudara-saudaraku
kita alunkan buah renungan
doa semesta
umat manusia

Putu Vivi Lestari

*Dosa
adalah firman
hari ini*

Bunga Karang
(selaput lendir uterus lunak)
membenam
bulan keenam
malaikat
Galilea
mencelupkan firman
di rahimku

Bulan keenam
bibirku belum merah
oleh sesat kata-kata
kerling bunga pacar
sembunyikan kuku
dengan jemari
yang belum selesai
meneliti gurat tubuhnya
mimpi mengenakan
tubuhnya tak sampai padaku

Malaikat
Galilea
mencelupkan firman
di rahimku

menyelipkan Kshetra yang jauh
bukan oleh janji masa lalu
13 tahun pengasingan
mata dadu
atau sankhas Bisma

yang menderu di angin
melambai
panji Arjuna
pengabdian dan kesucian

Pengabdian dan kesucian
di Yordan
sungai cuma mengirim
merpati
di padang gurun
tinggal 40 hari
keinginan

Bibirku belum merah
oleh sesat kata-kata
memutar tali pusar
kaku
boneka menunggu
wajan mengepul
tudung saji
masa lalu, kini, dan esok
hingga puting susuku
jatuh
karena cecapan
yang tak selesai

Tetap saja
 rusukmu yang berlebih
 memungutku
 di pinggiran
 di pakaian dalamku
 Tuhan bersidekap
 kitab kata-kata
 sesat
 aku menebus
 dosa vagina
 sarang laba-laba lapuk
 koyak di taman firdaus

Sebab tegukan botol-botol
 terhampar di lorong suram
 dan tubuh
 bukan cuma milikku

Aku kembali
 kelahiran dua kali
 menebus dosa
 sebelum hari
 roti tidak beragi
 mengekalkan taurat

Maka
 di taman Getsemani
 sediakan cawanmu
 untuk perjanjian baru
 agar kaumku
 tak lagi menanam teluh

menandak hasrat
 karena sejarah cemas
 Pilatus terbungkus
 kitab kata-kata
 sesat
 menjemput usia
 di kayu keramat
 Golgota
 Jumat agung lengang

Tapi
 malam hari
 musim dingin
 selalu
 tersisa riuh
 lipatan bibirmu
 di daerah tak terpeta
 ketika usia
 belum mengajarimu
 birahi

Kau yang tersalibkan
 di Betania
 usaplah rabuku
 agar tak lagi 9 bulan
 aku memilah Tuhan
 dan taiba-tiba pengembara
 yang mencelupkan firmannya
 di rahimku
 bertanya, "Apa yang telah ku-
 lakukan hari ini?"

Bagonjong, Wujud Arsitektur dari Karya Sastra

SIAPA nyana kepiawai-an orang Minangkabau, Sumatera Barat (Sumbang), berpantun-pantun adat, berpeta-tah-petitih atau bersastra sedari dulu sampai sekarang ternyata bisa membuahkan hasil yang mengagumkan. Salah satunya, arsitektur rumah bagonjong.

"Arsitektur rumah bagonjong atau rumah gadang awalnya merupakan implementasi dan manifestasi karya sastra lama. Arsitek rumah bagonjong, Tan Tejo Gurhano, menurut hikayat tanpa tahun yang jelas, konon menerjemahkan karya sastra pantun-pantun adat ke dalam bentuk gambar, sehingga jadilah arsitektur rumah bagonjong," kata budayawan Eddy Utama.

Ia mencontohkan, dalam pemilihan tapak rumah (tempat rumah gadang akan didirikan), misalnya, diterjemahkan dari: *Nan lereng ditanam tabu. Nan tunggang ditanam buluah. Nan gurun buek ka parak. Nan banchah jadikan sawah. Nan munggu ka pandam pakuburan. Nan gauang katabek ikan. Nan lambah kubangan kabau. Nan padek ka parumahan.* Artinya, rumah gadang tidak boleh didirikan pada tanah yang basah, rendah atau labil atau di atas lahan pertanian. Masyarakat Minangkabau

dituntun dalam penggunaan lahan dan tanaman harus disesuaikan dengan kondisi dan sifat masing-masing.

Begitulah. Siapa pun yang sempat melihat keelokan alam, keragaman seni-budaya, dan tradisi yang berkembang dan hidup dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, salah satu yang paling berkesan pastilah soal rumah bagonjong tadi.



RUMAH gadang atau rumah yang besar, sesungguhnya adalah sebuah bangunan tempat tinggal, mempunyai banyak kamar tetapi jumlahnya ganjil, ruang tengah yang luas dengan bentuk bangunannya yang khas. Selain tempat tinggal, rumah gadang juga dijadikan sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas dan upacara-upacara adat seperti upacara perkawinan, kematian dan menobatan/mendirikan penghulu. Oleh karena itu rumah gadang juga sering disebut Rumah Adat.

Menurut Ir Raudha Thaib MP, salah seorang keturunan Raja Pagaruyung, bagi masyarakat Minangkabau rumah gadang mempunyai multifungsi. Tidak hanya tempat untuk mengadakan upacara-upacara adat, tetapi sekaligus "pusat informasi"

suatu kaum/suku terhadap keberadaan anggotanya. Dari rumah gadang itu mereka mengetahui, mengenal, dan mengontrol setiap tindakan dan perilaku anggota kaum.

"Rumah gadang juga merupakan 'alamat yang jelas' dari seseorang, tempat pulang/kembali. Dan lebih dari itu, rumah gadang adalah tanda dan status dari seseorang. Menurut ajaran adatnya, seseorang dapat dikatakan orang Minang apabila orang itu mempunyai rumah gadang," ungkap Raudha.

Oleh karena begitu pentingnya, rumah gadang mendapat perlakuan istimewa. Dia selalu dipertahankan oleh setiap anggota kaumnya; dijaga status, wibawa, dan fungsinya. Bila rumah gadang tidak mendapat perawatan yang baik, mungkin karena tidak ada dana untuk perbaikannya, maka adatnya membolehkan kaum itu menggadaikan tanah pusaka untuk membiayai perbaikan. Rumah gadang tidak dapat dimiliki secara pribadi, tetapi harus atas nama kaumnya.

Menurut Raudha, yang juga dikenal luas sebagai sastrawan dengan nama Upita Agustine,

mendirikan rumah gadang adalah suatu kerja besar dan utama bagi sebuah kaum. Setiap tahapan dari proses pendiriannya diperhitungkan dengan cara seksama dan dapat dilihat sebagai sebuah pola dari penggunaan tanah dan tumbuh-tumbuhan.

Dicontohkan, misalnya soal pemilihan tapak rumah, tidak boleh didirikan pada tanah yang basah, rendah dan labil atau di atas lahan pertanian. Soal arah depan rumah gadang, yang harus mempertimbangkan segi keamanan, kepercayaan, dan kesehatan. Soal pemilihan bahan dan waktu pengambilan.

"Bahan atau kayu yang akan dipakai untuk mendirikan rumah gadang diperhitungkan dengan teliti. Kayu yang akan dijadikan bahan harus memenuhi beberapa persyaratan dan waktu tata cara pengambilan yang tepat. Misalnya, misalnya kayu tak boleh diambil dari kayu yang ditebang sedang dalam masa berbunga. Bila kayu sedang berbunga digunakan untuk tiang atau dinding, akan mudah dimakan kumbang dan rayap. Umumnya jenis kayu yang dipakai untuk bangunan rumah gadang disesuaikan dengan kegunaan, seperti untuk tiang, lantai, dinding, pintu, paran dan lain-lain," jelas Raudha.

Bahan atap yang baik adalah ijuk dari pohon enau. Bentuk

atap yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka rumah gadang dikenal juga dengan sebutan rumah bagonjong. Atapnya yang lancip berguna untuk membebaskan endapan air pada ijuk yang berlapis-lapis. Air hujan yang bagaimana pun lebatnya, akan meluncur cepat pada atapnya.

Sementara itu, menurut Yulfi-an Azrial, budayawan yang menulis buku *Budaya Alam Minangkabau*, kolong rumah gadang dibuat tinggi agar memberikan hawa yang segar terutama pada musim panas. Di samping

itu lebih aman menghadapi bahaya banjir.

"Hal yang tak kalah pentingnya dari segi arsitekturnya, adalah tiang-tiang rumah gadang yang tidak ditanam ke dalam tanah. Tiang-tiang ini hanya diletakkan di atas batu layah. Untuk menghubungkan tiang-tiang dan bagian rumah tidak digunakan paku, melainkan pasak dari bambu. Kondisi ini membuat rumah gadang relatif tahan terhadap guncangan gempa ataupun angin kencang," katanya.



KEBERADAAN rumah gadang juga didukung desain dari lingkungan pekarangannya. Setiap tanaman yang ditanam di pekarangan mempunyai aturan tersendiri, mengacu pada ungkapan adat. Untuk tanaman obat-obatan dan aromatik, seperti bunga culan, inai, piladang hitam, sidingin di dekat tangga. Bunga melati di bawah jendela. Bunga *cimpago langgo* dan *dalimo angso* di depan dan belakang anjung *bungo nango* di samping rumah. *Rumpuik sa-*

ruik di dekat sandi, *bungo rayo* jalan ke tepian.

Untuk tanaman hias, seperti kemuning ditanam pada keempat sudut halaman. Puding emas untuk pagar bagian dalam. Puding perak pagar bagian luar. Sedangkan lanjuang ditanam berderet di jalan masuk halaman dengan (gerbang). Pucuk lanjuang itulah nanti, kata Raudha, yang diselipkan di pintu rumah oleh seseorang yang menyampaikan berita kematian.

Sedang tanaman rempah-rempah, ditanam pada sebuah parak (ladang kecil) di samping pekarangan rumah gadang mempunyai fungsi tersendiri. Seperti serai, salam, belimbing,

tapak leman, asam puyuh dan lain-lain.

Tanaman buah-buahan seperti jambak, harus ditanam di tengah halaman. Manggis dan lansek ditanam di bagian kiri dan kanan halaman. Kepala puyuh,

di samping kiri-kanan dapur. Limau manis di bagian belakang. Pisang dekat dapur, pisang dekat anjung.

"Dari pola tanaman pekarangan rumah gadang seperti itu, dapat dikatakan bahwa masyarakat Minang sangat arif dan sangat mengenal betul yang akan mereka tanam. Baik mengenai tempat tumbuh, cara tumbuh, sifat dan kegunaan yang selalu disesuaikan dengan

penempatannya," tambah Raudha, pengasuh mata kuliah adat dan kebudayaan Minangkabau di Universitas Andalas, Padang.

Hal lain yang cukup penting untuk diamati lebih jauh di sini adalah prinsip-prinsip penataan yang mereka pakai. Ajaran adatnya yang berpunca kepada alam, dan alam mengajarkan prinsip keseimbangan kepadanya, dicoba dituang dalam berbagai aspeknya. Penataannya berada dalam pola simetris. Sehingga rumah gadang sebagai bangunan yang juga simetris sejalan dengan keseimbangan penataan tanamannya.

Orang Minangkabau sangat mempertimbangkan keberadaan satwa baik yang dipelihara maupun yang liar dalam kehidupan mereka, terutama di sekitar rumah gadang mereka. Dari tanaman pekarangan yang ditata sedemikian rupa akan memberikan kesempatan atau mengundang satwa liar untuk hidup

di sekitar rumah gadang, seperti burung pipit, balam yang bersarang di pohon limau. Lebah bergantung di paran rumah dengan aman tanpa ditakuti, dan lain sebagainya.

Uniknya lagi, keberadaan satwa dan fauna dilukiskan dalam pola ukiran. Nama-nama ukiran yang menghiasi dinding, jendela, pintu dan bagian-bagian lainnya dari sebuah rumah gadang berasal dari nama tanaman-tanaman dan hewan.

"Ukiran yang terdapat di Istana Silinjuang Bulan, di Batu-sangkar, telah melestarikan hampir dua ratus nama tumbuh-

an dan hewan yang hidup di Minangkabau," tandas Raudha.

Misalnya pada *bandua ayam* (bagian memanjang di bawah jendela) dihiasi dengan tiga jenis ukiran dengan nama *aka cino bapilin*, *siriah gadang*, dan *sikambang manih*. Pada bagian dinding yang lebih luas dihiasi dengan ukiran yang bernama *pucuk rabuang*, *aka cino* dan

tabandang ka langik. Pada ventilasi di atas jendela dihiasi ukiran dengan nama *sikambang manih*. Pada ujung atap dihiasi ukiran *pisang sasikek*, *tantadu bararak* dan *itiak pulang patang*. Pada pintu masuk dihiasi ukiran *daun bodi*, *bungo lado*, *buah palo*, *pucuk rabuang*.

Ukiran-ukiran tersebut mempunyai makna masing-masing. *Sikambang manih*, misalnya, motif ini bermakna kemeriahan, keramahan, dan kesopanan. *Aka cino*, bermakna kehalusan dan keserasian. *Itiak pulang patang*, bermakna keteraturan, ketertiban dan kedisiplinan.

Guna menjaga kelestarian arsitektur rumah bagonjong ini, sejak masa Harun Zain jadi Gubernur Sumbar (tahun 1970-an) sampai sekarang, gedung-gedung instansi pemerintah dan swasta, sekolah, perguruan tinggi, pasar, dan sebagainya marak berarsitektur bagonjong, baik sebagian atau seluruhnya.

(Yurnaldi),

Kompas, 24 September 2000

Riau Lupa Sejarahnya

— Dalam Cerpen-cerpen Taufik Ikram Jamil

KATA "amuk" telah hilang, dibawa lari singa Bungsu. Penduduk sebuah desa di Melayu menjadi gempar, karena dengan demikian mereka seperti telah kehilangan jiwa. Diskusi punya diskusi, akhirnya ada yang menyarankan bahwa kata amuk hanya bisa ditemukan dengan melakukan "amuk" itu sendiri.

"Kisah dalam cerpen berjudul *Pagi Jumat Bersama Amuk* tersebut menunjukkan keyakinan pengarang, bahwa terapi paling mujarab untuk keluar dari alienasi sosial-politik adalah membuka kembali sejarah," kata Tommy F Awuy, pengamat sosial-budaya yang juga anggota Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), dalam diskusi tentang Cerpen-cerpen Taufik Ikram Jamil di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, Sabtu 16/9.

Menurut dosen filsafat Universitas Indonesia (UI) dan Institut Kesenian Jakarta (IKJ) ini, mungkin saja Taufik berpandangan bahwa Riau tengah mengalami amnesia sejarah, lupa akan sejarahnya. Namun, dari sudut pandang lain, bagi Taufik sejarah bukanlah sekadar sejarah, tetapi memiliki filosofi tertentu. Dalam *Batam Dilanggar Todak* ia menulis, sejarah juga memiliki nuansa sendiri sehingga dapat diterjemahkan dan disampaikan dengan berbagai cara, karena pada



Taufik Ikram Jamil

hakikatnya sejarah bisa ditemui, dicari, dan diciptakan.

Taufik telah berusaha melayani tantangan realitas dengan menunjukkan fakta-fakta sejarah tertentu dan menjelaskan bagaimana bahasa hadir sebagai sebuah konstruksi sosial. Itu semua ia lakukan demi membangkitkan kembali sebuah kesadaran atas hak sosial untuk diperjuangkan dan dipertahankan.

Berbagai penghargaan telah diterima cerpenis, penyair, penulis roman, sekaligus wartawan ini. Di antaranya adalah penghargaan dari DKJ sebagai cerpenis terbaik Indonesia tahun 1999 untuk cerpennya *Jumat Pagi Bersama Amuk*, serta juara pertama lomba penulisan cer-

pen Indonesia yang diselenggarakan majalah sastra *Horison* (1997) untuk cerpen *Menjadi Batu*.

♦♦♦

DALAM pandangan Tommy F Awuy, gaya penulisan Taufik Ikram Jamil tidak terpaku dalam paradigma tunggal. Tentang hal ini Tommy mencatat, "Ia menulis begitu saja. Terkadang sangat realistis tetapi banyak juga cerpenya yang surealis."

Melihat latar belakangnya yang wartawan, tidak mengherankan kalau cerpen-cerpennya ditulis dengan bahasa yang jernih dan lugas, bernuansa jurnalistik. Atau malah terkadang bergaya esai untuk menjelaskan detail latar belakang persoalan. Di hampir semua cerpen Taufik, hanya ada satu problematika yang mencolok, yakni soal kehidupan sosial politik, khususnya di Riau, tanah kelahirannya.

Bahkan, cerpen-cerpen yang berlatar belakang cinta atau kehidupan rumah tangga pun sebenarnya merupakan metafor-metafor politik pembangunan Orde Baru. Seperti terlihat dalam dialog yang mengakhiri cerpen *Jangan*, sebagaimana dikutip Tommy berikut. "Tam, kalau perkataanmu sebagai suatu kenyataan dalam hidup, alangkah zalimnya kita. Sesuatu harus menyingkirkan sesuatu...." (p09)

SASTRA RIAU — Sastra di Indonesia masih ditulis orang. Salah satu buktinya adalah karya-karya Taufik Ikram Jamil yang dipilih untuk acara pembahasan karya, Sabtu 16 September pukul 14.00 di Galeri Cipta III, Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Tampil sebagai pembahas adalah penyanyi dan ahli filsafat Tommy F Awuy dengan moderator Eddy A Effendy. Cerita pendeknya berkarakter kuat, dan lebih kuat lagi adalah semangatnya untuk membela Melayu di tengah cemarut proses bersama menuju Indonesia baru. Semangat se-

rupa juga sering muncul di dalam berbagai laporan jurnalistiknya—ia seorang wartawan surat kabar ini yang ditempatkan di Pekanbaru. Sebagai pengarang, karya-karyanya tersebar di berbagai media massa, beberapa memenangi penghargaan seperti Lomba Menulis Cerpen *Horison* dan penghargaan Cerita Pendek Terbaik dalam Surat Kabar oleh Dewan Kesenian Jakarta. (efix)

Kompas, 14 September 2000

Kebudayaan Jangan Dieksploitasi

Jakarta, Kompas

Keinginan untuk menggabungkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan yang selama ini di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional ke Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, hendaknya tidak menimbulkan eksese berupa pengeksploitasian (produk) kebudayaan untuk bisnis pariwisata. Walau bagaimanapun, kebudayaan tetap harus dipertahankan agar peninggalan sejarah bangsa ini dapat terjaga.

Demikian Prof Dr Edi Sedyawati selaku Ketua Lembaga Penelitian untuk Masalah Kemanusiaan dan Ilmu Sosial Universitas Indonesia kepada *Kompas* di Jakarta, akhir pekan lalu (2/9). Mantan Dirjen Kebudayaan ini dimintai pendapatnya berkaitan isu bahwa ruang lingkup tugas Ditjen Kebudayaan akan diintegrasikan ke Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

Sinyal tersebut semakin kuat ketika Menteri Kebudayaan dan Pariwisata I Gede Ardika mengisyaratkan keinginannya mewujudkan pengintegrasian urusan itu. Bahkan kepada pers

ia mengungkapkan sudah "merancang" strategi bahwa kebudayaan akan memayungi industri pariwisata.

Edi Sedyawati tidak melihat pengintegrasian Ditjen Kebudayaan ke Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagai sesuatu yang perlu dipermasalahkan secara serius. "Yang menjadi kunci utama adalah *the man behind the gun* atau pengelolanya," kata Edi.

Meski demikian, kalau boleh memilih ia mengaku lebih senang bila urusan kebudayaan tetap berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional, atau departemen lain yang mena-

ngani masalah informasi. Alasan Edi tidak lain karena kebudayaan berkaitan erat dengan ilmu dan informasi.

"Untuk melestarikan kebudayaan maka diperlukan ilmu. Arti penting kebudayaan juga perlu diinformasikan kepada masyarakat agar mereka ikut melestarikannya," ujar guru besar Fakultas Sastra UI itu, yang juga adalah Ketua Umum Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia.

Melalui museum

Eksplotasi terhadap (produk) kebudayaan yang semata-mata untuk mendapatkan uang—seperti pencurian benda-benda bersejarah, atau merusak dan memperjualbelikannya—merupakan tindakan yang tidak menghargai kebudayaan bangsa. Jika hal itu terjadi, demikian Edi Sedyawati, berarti masyarakat Indonesia telah kehilangan nilai-nilai budayanya. Akibat

lebih lanjut, generasi yang akan datang tidak dapat mengetahui hasil budaya bangsa Indonesia.

Dalam kaitan ini ia berharap, kebudayaan dan pariwisata hendaknya saling mendukung. Di satu pihak kebudayaan dapat dijadikan obyek wisata, tetapi di lain pihak hasil-hasil kebudayaan—seperti arca, candi dan keramik—tidak boleh dirusak oleh wisatawan. Oleh karena itu, tambah Edi Sedyawati, perlu ada aturan yang ketat bagi wisatawan untuk mengunjungi obyek kebudayaan.

Dalam hal pemasyarakatan kebudayaan bangsa, Edi melihat bahwa pariwisata bukan satu-satunya cara yang bisa ditempuh. "Museum juga dapat digunakan sebagai sarana untuk memperkenalkan budaya bangsa. Bahkan museum merupakan sarana yang lebih baik dalam memperkenalkan keanekaragaman budaya, apalagi melalui museum keanekaragaman budaya itu tidak akan tereksploitasi," paparnya.

Pada saat pencaangan Tahun Seni dan Budaya (1998) semasa menjabat Dirjen Kebudayaan, Edi dengan tegas menolak pendiktomian antara seni budaya dan

pariwisata. Ia justru ingin mengajak semua pihak untuk melihat kehidupan budaya di negara ini sebagai sesuatu yang terintegrasi (Kompas 13 Januari 1998).

Ikhwal perubahan Menteri Negara Pariwisata, Seni dan Budaya menjadi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Edi berharap agar penanganan administrasinya lebih bagus. Kegiatan di bidang kebudayaan yang positif seperti memperkenalkan ke negara lain juga harus ditingkatkan.

Mengenai pernyataan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata I Gede Ardika yang akan menempatkan kebudayaan sebagai payung pariwisata, Edi Sedya-wati melihatnya sebagai tanggapan positif Menteri Kebudayaan dan Pariwisata terhadap kebudayaan. Apalagi pada kabinet baru ini kebudayaan disebut terlebih dahulu, baru kemudian diikuti oleh pariwisata. "Ini menunjukkan bahwa arti kebudayaan lebih luas dibandingkan dengan pariwisata," katanya. (p28)

Kompas, 5 September 2000

K

Kebudayaan Sebaiknya Jangan Diinstitusikan

Jakarta, Kompas

Tindakan pemerintah melembagakan kebudayaan ke dalam sebuah institusi—apalagi dengan menggabungkannya bersama kegiatan bisnis pariwisata—adalah langkah untuk mencabut kebudayaan dari akarnya. Tindakan semacam itu hanya menempatkan kebudayaan sebagai sekumpulan artefak yang ujung-ujungnya dikaitkan dengan usaha untuk meraup dolar.

Demikian kesimpulan dari percakapan dengan pengamat kebudayaan Tommy F Awuy dan sastrawan Ajip Rosidi yang dihubungi secara terpisah, Rabu (6/9). Keduanya, menyayangkan sikap pemerintah yang berencana mengintegrasikan urusan kebudayaan ke Departemen Kebudayaan dan Pariwisata yang baru saja dibentuk. Bahkan Tommy F Awuy menilai, langkah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang melembagakan kebudayaan ke dalam sebuah departemen adalah kebijakan setengah hati, atau tindakan mendekonstruksi kebudayaan.

"Dengan menciptakan institusi bagi kebudayaan maka kebudayaan sebagai konsep pemikiran dan proses penyadaran lalu dipersempit. Begitu pun wawasan dan kesadaran kita pada kebudayaan," kata Tommy yang juga adalah dosen filsafat pada Fakultas Sastra Universitas Indonesia (FSUI).

Bagi Ajip Rosidi, kebijakan tersebut adalah cermin dari sikap pemerintah yang mengang-

gap kebudayaan hanya penting bila ia dalam hubungannya dengan pariwisata. Oleh karena itu, dalam kaitan dibentuknya Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Ajip hanya menaruh sedikit harapan akan adanya usaha pengembangan kebudayaan untuk mempertinggi derajat bangsa Indonesia.

Menurut Ajip, selama ini pemerintah seakan-akan lebih mementingkan "menjual kesenian" kepada kaum wisatawan daripada menggalang kehidupan kesenian yang sehat dalam masyarakatnya sendiri. Padahal, jika kesenian itu tetap hidup, masyarakat dapat memberi suplai yang cukup dan terus-menerus kepada industri pariwisata.

"Seharusnya yang diutamakan ialah pembinaan kehidupan kesenian yang sehat dalam masyarakat kita sendiri. Adapun minat wisatawan hanyalah hasil sampingan belaka, bukan tujuan utama," katanya.

Serahkan ke masyarakat

Dalam perspektif yang lebih luas, Tommy berpendapat bah-

wa urusan kebudayaan sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Oleh karena itu ia tidak sependapat adanya gagasan menginstitusikan kebudayaan, apalagi dengan menempatkannya dalam sebuah departemen. Sebab, kata Tommy, kalau kebudayaan diinstitusikan malah ia akan memasung kebudayaan itu sendiri.

"Biarkan kebudayaan ada dalam pikiran masyarakat," kata salah seorang pengurus harian Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) ini.

Selain mendekonstruksi kebudayaan, kebijakan melembagakan kebudayaan ke dalam suatu institusi semacam Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, juga dinilai bisa membahayakan tatanan yang ada di masyarakat. Ketika kebudayaan hanya dilihat sebagai artefak-artefak, lebih mengacu ke hal-hal yang materialistik, maka wawasan dan kesadaran kita pada kebudayaan pun semakin dipersempit. Jika kondisi ini berkepanjangan, lambat laun cara berpikir masyarakat cenderung akan bersifat hitam-putih.

"Artinya, ketika kebudayaan tidak lagi berfungsi sebagai konsep pemikiran dan jauh dari proses penyadaran, kita pun akan kehilangan kearifan. Ini yang mungkin akan membahayakan," ujar Tommy.

Dalam bahasa yang berbeda, Ajip mengingatkan risiko terburuk akibat kebijakan pemerintah tersebut, yakni hilangnya se-

buah budaya masyarakat. Adapun budaya yang masih "tersisa", tambahnya, adalah yang hanya bisa dijual kepada wisatawan.

Selama ini upaya pemerintah mengangkat martabat kebudayaan cuma tindakan yang bersifat tambal sulam. Tentang hal ini ia mencontohkan usaha untuk mempopulerkan kesenian daerah, seperti wayang, kepada generasi muda melalui pertunjukan di hotel-hotel mewah atau tempat bergengsi lainnya. Di satu sisi usaha ini seakan-akan ingin menunjukkan bahwa kesenian yang ditampilkan itu memang bergengsi. Akan tetapi, kata guru besar tamu di Osaka

University of Foreign Studies (Jepang) ini, dengan begitu kita telah mencabut kesenian itu dari akarnya, yaitu rakyat tempatnya hidup dan berkembang.

"Ibaratnya kita mencangkoknya ke tanah lain atau ke habitat lain yang untuk itu terpaksa kita lakukan berbagai penyesuaian. Sedangkan erosi yang dihadapi di lingkungan tempat lahir dan hidupnya sendiri tidak pernah kita sentuh sama sekali," jelas Ajip.

Tentang pilihan terburuk bila bidang kebudayaan harus masuk ke sebuah departemen, Ajip mengharapkan agar kebudayaan tetap di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional.

"Karena dalam proses pewarisannya, kebudayaan itu lebih pas melalui pendidikan di sekolah daripada dijual kepada wisatawan," katanya. (mam/ken)

Kompas, 7 September 2000

Pemerintah 'Merusak' Kebudayaan Daerah

Akibat perlakuan yang salah oleh pemerintah, kebudayaan daerah kini mengalami erosi yang begitu dahsyat.

JAKARTA — Selama 55 tahun negara Indonesia berdiri, kebudayaan daerah di mata pemerintah sepertinya dianggap tidak patut dan tidak punya hak untuk tumbuh. Menurut sastrawan dan budayawan Ajip Rosidi, kebudayaan daerah hanya dianggap semacam pupuk atau kayu penopang kebudayaan nasional. Di sisi lain, kebudayaan nasional hingga kini belum terlihat sosoknya.

Ajip Rosidi mengungkapkan hal itu, di acara diskusi peluncuran buku 'Ensiklopedi Sunda' yang ia susun bersama timnya, selama 10 tahun. Dalam diskusi peluncuran itu, hadir pula sebagai pembicara, Ketua LIPI Dr Taufik Abdullah. Penerbitan ensiklopedi ini, kata Ajip, dilatari oleh rusaknya kebudayaan daerah itu. Dengan upaya penerbitan ini diharapkan ada penulisan mengenai informasi budaya daerah, terutama Sunda.

Akibat perlakuan yang keliru terhadap kebudayaan daerah, kata Ajip, kebudayaan daerah mengalami erosi yang begitu dahsyat. Sementara, pemerintah hanya bertindak separuh hati untuk penyelamatkannya. "Erosi itu berlangsung perlahan, sehingga tidak disadari oleh kebanyakan orang, padahal

berlangsung secara pasti dan terus-menerus," ujar Ajip di Jakarta, kemarin.

Kata Ajip, orang baru terhenyak ketika menyaksikan maraknya lagu dangdut menggiringi pementasan seni tradisi. Dengan dangdut itu, memang, kalangan muda ikut asyik berajojing menikmati pementasan kesenian tradisi itu. Upaya penyelamatan yang muncul selama ini, kata Ajip, banyak berupa mengangkat pementasan seni tradisi di hotel-hotel atau tempat mewah lainnya, dengan membuat penyesuaian-penyesuaian.

"Tapi dengan begitu, kita telah mencabut kesenian itu sendiri dari akarnya, yaitu rakyat tempatnya hidup dan berkembang. Kita mencangkuknya ke tanah lain, ke habitat yang lain, yang untuk itu terpaksa kita lakukan berbagai penyesuaian. Sedangkan erosi yang dihadapi di lingkungan tempat lahir dan hidupnya sendiri tidak kita sentuh sama sekali," urai Ajip.

Kebudayaan daerah, kata sastrawan yang kini mukim di Jepang itu, kini memang benar-benar telah rusak, sehingga kesenian daerah yang juga bagian dari kebudayaan itu juga rusak. Rusaknya kebudayaan daerah itu, kata

Ajip, sebutlah misalnya lembaga kondangan di desa-desa, saat orang mempunyai hajjat. "Dulu, lembaga kondangan merupakan tempat pembinaan apresiasi anak-anak terhadap kesenian, ketika mereka diajak orang tuanya menonton pementasan di acara kondangan itu. Sekarang, tak berfungsi lagi. Kian jarang orang yang mempunyai hajjat menanggapi kesenian tradisional. Banyak yang menukarnya dengan pementasan layar-tancap yang lebih praktis dan biayanya lebih murah," ujar Ajip.

Ajip menyatakan, kehidupan kesenian daerah kini, hanya bertumpu pada seniman-seniman daerah yang usianya sudah lanjut. Kebanyakan mereka sudah tidak didukung lagi oleh lingkungannya dan banyak yang tidak mempunyai kader yang akan menggantikannya. Generasi muda, kata Ajip, tidak mempunyai forum pertemuan dengan pertunjukan keseniannya, dan karenanya, mereka tak mempunyai daya apresiasi terhadap kesenian mereka.

"Keterputusan masyarakat pemilik kesenian daerah itu dengan kesenian daerahnya menjadi lengkap, yakni tidak ada pembinaan ketrampilan dalam berkesenian dan tidak ada juga pembinaan apresiasi publik terhadapnya," tambah Ajip.

Tindakan pemerintah selama ini yang hanya mengemas kesenian daerah sebagai paket pertunjukan untuk wisatawan, dan mengabaikan pengembangan kesenian di ko-

munitasnya sendiri, dinilai Ajip juga kurang tepat. Dengan kebijakan itu, Ajip menilai, seolah pemerintah hanya menganggap lebih penting 'menjual kesenian' ketimbang menggalang kehidupan kesenian di kalangan bangsa sendiri. "Padahal, hanya dengan menumbuhkan kehidupan kesenian yang sehat dalam masyarakat kita sendiri, kita dapat memberi suplai yang cukup dan terus-menerus kepada industri pariwisata," tegas Ajip.

Kembali Ajip menegaskan, yang dibutuhkan sebenarnya adalah pembinaan kehidupan kesenian yang sehat di komunitasnya sendiri. Sementara, munculnya minat wisatawan merupakan hasil sampingan. "Bukan tujuan utama," tegasnya.

Sementara itu, dari Bali ada kabar, perhatian seniman Made Wianta terhadap kondisi jalan di Bali yang semakin padat mendorongnya untuk menggelar seni "Jalan". Acara yang dipusatkan di Desa Lodtudo, Ubud Kabupaten Gianyar, 9 September mendatang, melibatkan sekitar 50 orang pemain.

"Mereka bukan seniman, tapi pekerja yang memang sehari-harinya terlibat dengan urusan di tengah jalan," ujar Wianta dalam jumpa wartawan di Denpasar, Rabu (6/9). Pertunjukan yang diberi judul *Performance Art "Jalan"* itu lahir dari ingatan Wianta ketika dia melintasi jalan di Sukawati, Gianyar pada 1979. Ketika itu dia menyaksikan dua orang gadis yang mengendarai sepeda motor, disambar sebuah truk. Kedua anak muda itu meninggal seketika, dan mati sia-sia, dengan darah yang mengalir di tengah jalan.

Dikatakannya, citra jalan kini sudah berubah fungsinya dan mengalami pergeseran makna secara drastis. Dulu jalan menjadi alat transportasi dan komunikasi yang menghubungkan tempat satu dengan yang lainnya. Tetapi kini menjadi simbol kematian dan kekacauan. Jalan yang berhotmik membuat kehidupan menjadi kompleks dan makin *stressful*. "Padahal seharusnya jalan membuat hidup jadi sederhana dan mudah," tandasnya.

■ pry/aas

Republika, 7 September 2000

Tiga Pandangan Sempit tentang Kebudayaan

PALING tidak ada tiga pandangan sempit tentang kebudayaan yang selama ini kita pahami. Sekalipun mungkin kita sendiri sangat menyadari bahwa arti kebudayaan tidak sesempit itu, namun karena pandangan-pandangan itu dianggap operasional—khususnya bisa dengan mudah "diprojektikan"—maka terus saja itu dipertahankan.

Pertama, kebudayaan hanya dilihat dari sisi material sebagai hasil karya manusia secara nyata. Pandangan ini dipegang teguh terutama oleh para ilmuwan sosial warisan, baik positivisme maupun materialisme. Mereka berasumsi bahwa kebudayaan hanya mungkin diangkat pada tingkat wacana ilmiah sejauh ia dilihat sebagai sebuah fakta obyektif. Kita tidak bisa membicarakan hal-hal apa yang mungkin ada di balik fakta obyektif dan karenanya kita tidak bisa mendefinisikan kebudayaan itu secara spekulatif.

Pandangan ini, tegasnya, melihat kebudayaan hanya sebatas artefak-artefak. Arti kebudayaan pun menjadi pasif tetapi memang jelas bisa diamati dengan seperangkat ukuran ilmiah. Positivisme menganggap bahwa apa saja yang tidak bisa dibicarakan secara ilmiah maka tidak bermakna. Sementara obyek-obyek material bagi materialisme adalah fakta ilmiah.

Kedua, kebudayaan dilihat sebagai sebuah tatanan institu-

sional. Pandangan ini memberikan arti bahwa proses berkarya manusia harus berada dalam sebuah bingkai yang bernama "pengaturan" dan "pengawasan". Dalam arti lain, kebudayaan itu merupakan sebuah proses pendidikan yang ditentukan oleh sebuah "agen", yang dalam hal ini adalah "penguasa" (pemerintah).

Pandangan kedua ini sudah sangat jelas kita ketahui dan kita rasakan praktiknya selama berciri Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud). Dengan adanya departemen seperti itu proses kreatif masyarakat disesuaikan dengan selera penguasa yang kebetulan represif. Pendidikan pun seperti ini tidak menganggap anak-anak didik sebagai subyek yang mampu berkreasi secara mandiri. Kurikulum serba diseragamkan, sementara arti kebudayaan direduksi sebatas pada wilayah seni-sastra. Lalu menjadi lebih "amburadul" ketika didirikan Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya (Parsenibud).

Pada kemudian hari, Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan Depdikbud dengan hanya menjadikannya sebagai Departemen Pendidikan Nasional. Sementara urusan kebudayaan sebagai institusi ternyata masih dipertahankan dalam Direktorat Jenderal Kebudayaan, hingga baru-baru ini konon berubah menjadi Direktorat Nilai Estetika (makh-

luk macam apa pula ini?).

Cara Presiden Abdurrahman Wahid tersebut bisa kita sebut sebagai upaya "mendekonstruksi" makna kebudayaan dengan "setengah hati". Menurut kabar pula, urusan kebudayaan akan sepenuhnya diserahkan pada Parsenibud yang kini bernama Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Ternyata pemahaman tentang kebudayaan yang sempit tetap saja dilestarikan dengan hanya memindahkannya ke institusi lain. Akan tetapi, tentu saja ada maksud tertentu di sini, yaitu agar kebudayaan itu lebih operasional lagi secara komersial. Tepatnya, kebudayaan dan seni dilihat sebagai artefak yang mungkin bisa menampakkan eksotisme-eksotisme etnis untuk menarik perhatian

wisatawan. Jika memang demikian, alangkah merananya konsepsi kita tentang kebudayaan.

Pandangan ketiga, ialah kebudayaan dilihat dari sisi ideologi nasional. Hal ini tidak lepas dari pengaruh pandangan Ki Hajar Dewantara tentang kebudayaan nasional yang katanya merupakan "puncak-puncak dari kebudayaan daerah". Pandangan ini menjadi sangat ideologis terutama ketika Orde Baru melakukan ideologi kesatuan secara represif, yaitu menyeragamkan puncak-puncak kebudayaan daerah itu ke dalam definisi tunggal, yakni berasaskan Pancasila.

Pandangan bahwa kebudayaan nasional itu sendiri sebagai puncak-puncak dari kebudayaan daerah sudah cukup menyesatkan, sebab dengan menyebut istilah "puncak" seolah-olah kita sudah memastikan hidup matinya sebuah kebudayaan.

♦♦♦

KETIGA pandangan sempit tentang kebudayaan di atas sudah seharusnya kita buang jauh-jauh. Kita biarkan kebudayaan itu merupakan sebuah proses dari cara berpikir manusia orang per orang yang sekalipun berdimensi kolektif juga tetapi jangan sampai terjerumus ke dalam atas nama sebuah ideologi. Maksudnya, kebudayaan tidak perlu diatur atau diawasi oleh sebuah insti-

tusi.

Kebudayaan sebaiknya mengalir begitu saja dalam kehidupan keseharian kita. Kebudayaan merupakan sebuah model kesadaran manusia untuk menentukan nasibnya sendiri. Model kesadaran itu begitu luas meliputi berbagai unsur kehidupan. Lagi pula, kalau dalam sebuah negara sudah mengakses unsur-unsur kehidupan seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, agama, ekonomi, politik, dan sebagainya ke dalam sebuah institusi, lalu mengapa pula masih harus ada departemen kebudayaan sementara unsur-unsur kehidupan tersebut sudah merupakan kebudayaan itu sendiri? Ini berarti semakin memasung makna kebudayaan itu sendiri.

Tiga pandangan yang sempit di atas itu akan semakin memprihatinkan, mungkin "hancur-hancuran", khususnya jika kita masih *ngotot* mendampirkan kebudayaan dengan unsur atau bagian daripadanya, misalnya kebudayaan dengan seni, apalagi dengan pariwisata. Bagaimana mungkin memandang kebudayaan yang demikian luas itu lalu tinggal dipersempit pada makna komersial? Kebudayaan yang maknanya dipersempit ini dengan sendirinya akan mempersempit wawasan berpikir dan pengetahuan kita sendiri.*

(Tommy F Awuy, dosen filsafat di Fakultas Sastra UI dan Institut Kesenian Jakarta).

Ngurah Bagus, Bapak Studi Kebudayaan Bali

"AH itu hanya mitos saja. Saya orang biasa yang membantu siapa saja yang hendak mengetahui kebudayaan Bali entah itu peneliti asing atau pribumi," kata Prof Dr I Gusti Ngurah Bagus (67) mengenai julukan yang diberikan antropolog Belanda Dr Henk Schulte Nordholt.

Henk menyebutnya *"the father of Balinese studies"*, sama tinggi dengan antropolog senior Amerika Serikat, Hildred Geertz, yang dikatakannya sebagai *"the mother of Balinese studies"*. Sebutan itu muncul pada tahun 1997 ketika Henk berceramah di Universitas Udayana. Kata dosen University of Amsterdam ini, "Keduanya telah merangsang dan membukakan sekaligus menantang para sarjana yang mengadakan penelitian tentang Bali."

Komentar Ngurah Bagus di rumahnya di Denpasar, Senin (4/9), "Sebagai ilmuwan saya senang dapat membantu mahasiswa atau peneliti yang ingin mengetahui lebih jauh tentang kebudayaan Bali. Kebetulan banyak sarjana yang dulu saya bantu, kini telah menjadi 'orang' lalu mereka memberi referensi nama saya bagi kolega atau mahasiswa-wanya."

Namun, Ngurah Bagus mengakui, ia terkejut ketika menerima penghargaan internasional dari Australian National University di Canberra. Tahun 1988, dalam rangka 200 Tahun Australia, negara tetangga di sebelah selatan itu mengadakan Seminar VII Asosiasi Pengkajian tentang Asia. Dalam seminar tersebut digelar diskusi tentang Bali yang khusus dipersembahkan kepada Ngurah Bagus.

"Sewaktu datang di Australia, saya tidak menyangka akan mendapatkan kehormatan itu. Dalam seminar itu ikut seluruh antropolog Australia yang kebanyakan saya kenal. Waktu itu saya sempat bersalaman dengan Bob Hawke (Perdana Menteri Australia tahun itu—

Red) yang hadir dalam seminar," kata Ngurah Bagus.

♦♦♦

DALAM buku *Proses & Protes Budaya, Persembahan untuk Ngurah Bagus*, ada komentar yang menarik dari Prof Dr Hj Partini Sardjono Pr. Ketika menyusun disertasi, Partini kesulitan untuk mendapatkan bahan naskah berbahasa Jawa Kuno di Bali. Ia minta tolong kepada Ngurah Bagus, teman sesama mahasiswa di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Dalam waktu yang sangat singkat, Partini segera dihubungkan dengan orang-orang yang dapat dimintai keperluannya untuk menyelesaikan disertasinya.

"Bahkan beliau bersusah payah menelusuri sendiri asal-usul naskah, menemukan juru tulis dan penyalin naskah," kata Partini.

Ngurah Bagus mengabdikan lebih daripada setengah usianya untuk mengembangkan Fakultas Sastra Universitas Udayana. Studi awalnya linguis-

tik, namun seperti umumnya orang Bali yang sudah mengenyam pendidikan di Jawa, pikirannya terus berkembang. Kini ia tidak hanya ahli bahasa, tetapi juga antropolog, pengamat sosial dan pariwisata yang kritis, kritisi agama Hindu, dan bahkan politikus.

Tidak hanya itu, di Bali ia juga dikenal sebagai demonstran yang sangat aktif memerangi keserakahan orang-orang pusat. Katanya, "Sejak awal tahun 1990-an saya sudah sering mendemonstrasi ke DPRD, terutama lewat isu pariwisata di Bali. Tahun 1998 tidak berbeda dengan Jakarta, di Bali saya bersama dengan mahasiswa mengobarkan perlunya reformasi di segala bidang dengan turun ke jalan."

Sebagai buah dari aktivitas politiknya yang kekiri-kirian ("Hampir semua antropolog di Jawa itu kiri dan mereka itu yang memberi dorongan,"

katanya) tahun 1999 ia diangkat sebagai anggota MPR Utusan Daerah. Ia mengakui sampai saat ini hanya

sedikit mahasiswa asli Bali yang tertarik menjadi demonstran. Di kalangan wartawan sering ada *joke*, polisi Bali lebih berani *menggebuk* mahasiswa karena kebanyakan pendemo bukan penduduk asli Bali.

"Saya akan buka rahasia mengapa ini terjadi. Karena pada umumnya masyarakat Bali masih trauma dengan zaman PKI dulu. Waktu itu banyak sekali mahasiswa yang mati karena ber-demonstrasi dan kemudian dilanjutkan dengan konsep NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus) yang menjauhkan kehidupan politik dari mahasiswa," katanya.

◆◆◆

SAMPAI saat ini, berbagai jabatan masih melekat pada bapak yang mempunyai tiga anak dan tiga cucu ini. Yang utama ia masih menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Kajian Budaya Unud. Dari hasil perkawinan dengan Dra Made Sulatri Apt, guru besar kelahiran Denpasar ini di-

karuniai Dr I Gusti Ayu Agung Prahar-sini, Ir I Gusti Agung Ngurah Kerta Diksita, dan Ir I Gusti Ngurah Nitia Santhiarsa.

Anak guru SD ini mulai aktif mempublikasikan karyanya sejak tahun 1962. Dari biografinya yang setebal lima halaman ketik satu spasi itu, paling tidak ia telah menghasilkan 60 karya tulis yang beraneka ragam. Mulai dari bahasa sebagai titik awalnya lantas berkembang ke studi antropologi, sejarah, arkeologi, sastra dan kebudayaan Bali.

Tak heran ketika ia berusia 65 tahun, murid dan koleganya membuat buku yang didedikasikan untuknya. Bahkan tahun 2000 ini, sebuah buku berjudul "To Change Bali" diterbitkan University of Wollongong, juga dipersembahkan untuk profesor yang awet muda itu.

Sebagai manusia yang mempunyai prinsip hidup tinggi, tak terhindarkan, Ngurah Bagus juga sering bertentangan dengan sesama budayawan di Bali.

Misalnya ketika di Bali beberapa waktu lalu menggelar seminar internasional mengenai pelestarian warisan budaya (CHC, *cultural heritage conser-*

vation) yang dibuka Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), ia bahkan tak datang. Justru pada hari yang sama, ia membuat diskusi bersama dengan rekannya dari Amerika Hildred Geertz mengenai transformasi masyarakat Bali.

Sejak akhir tahun 1960-an, ia sudah melihat bahwa akan terjadi perubahan besar-besaran dalam masyarakat Bali. Pada awalnya, masyarakat Bali itu agraris. Namun, ketika tahun 1960-an, pariwisata sudah mulai berkembang dan berbagai fasilitas seperti hotel, pendidikan dibangun, ia berpendapat akan terjadi perubahan dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri.

"Terus terang saya anti-CHC dalam memandang Bali karena ada unsur dasar pelestarian itu. Padahal dalam kacamata saya, masyarakat Bali itu berubah dan bertransformasi menjadi Bali yang baru. Saya menginginkan agar CHC bertitik tolak dari sini. Masyarakat Bali itu perlu dimantapkan dan dikonsolidasikan dalam menghadapi perubahan ini," jelasnya.

◆◆◆

LALU apa yang membuatnya gelisah di usia senja ini?

"Masalah politik. Kita sekarang sedang mencari format nasionalisme yang baru. Hendaknya format baru itu betul-betul didasari keadilan dan kebersamaan walaupun saya tidak menuntut 100 persen. Misalnya, jelas sekali orang Hindu tak akan bisa jadi presiden, kita tahu itu. Saya ingin agar orang Hindu lebih aktif dalam dunia politik karena secara makro kesempatan itu telah dibuka," jelasnya.

(Bambang Sigap)

Seminar Internasional II Ramayana dan Mahabharata

Seni Budaya Berperan Merajut Kemanusiaan

Jimbaran, Kompas

Suatu produk budaya dapat berperan efektif dalam menjalin hubungan antarbangsa. Hubungan itu tidak bertolak dari sudut kuat-lemah atau menang-kalah, melainkan lebih pada kedamaian dan keharmonisan.

"Rasanya tidak terlalu berlebihan untuk mengungkapkan bahwa karya sastra Ramayana dan Mahabharata yang telah memberi kontribusi besar dalam merajut kemanusiaan di dunia. Itu dapat memperkaya, mengembangkan dan memperkuat dan bukannya penaklukan atau pemusnahan harkat, martabat dan peradaban manusia," kata Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri pada pembukaan Seminar Internasional II Ramayana dan Mahabharata, di Jimbaran-Denpasar, Kamis (14/9).

Seminar diikuti oleh 10 negara, di antaranya India, Sri Lanka, Thailand, Malaysia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan Indonesia selaku tuan rumah. Dalam acara itu hadir Dubes India untuk Indonesia M Venkatraman, Menteri Pendidikan Nasional Yahya A Muhaimin, dan Gubernur Bali Dewa Made Beratha.

Karya sastra Ramayana dan Mahabharata, kata Wapres, dapat dijadikan suri teladan dalam upaya membangun tatanan dunia yang baru. Hal itu sejalan dengan salah satu cita-cita bangsa Indonesia untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Wapres menyebutkan, dengan menggunakan Ramayana dan Mahabharata sebagai sumber cerita yang utama, seni pewayangan dalam berbagai jenis dan bentuknya yang dikenal luas di Indonesia itu menuturkan berbagai nasihat dan ajaran tentang moralitas, karakter, dan perilaku baik dan buruk.

"Melalui warisan cerita dan aktualisasi terhadap kondisi serta perkembangan zaman, pewayangan bukan saja berkembang sebagai produk budaya, tetapi pada gilirannya berfungsi sebagai instrumen tradisional yang ampuh dalam melestarikan dan mengembangkan budaya dalam arti yang lebih luas," ujar Megawati.

Wapres yakin seminar ini akan menyimak peran Ramayana dan Mahabharata dari perspektif hubungan antarbangsa. Secara internal, tinjauan kedua karya sastra tersebut sudah sering dilakukan. Oleh karena itu, tidaklah keliru kalau hal itu dikaitkan dengan perkembangan masyarakat yang begitu dinamik, tetapi tetap akan ada kebutuhan yang besar untuk terus menggali dan mencari aktualisasi nilai-nilai filosofis yang ada dalam cerita Ramayana dan Mahabharata.

Seperti halnya di banyak negara, kata Wapres, dua karya sastra itu telah sejak lama dikenal dengan baik di Indonesia. Lebih dari sekadar sangat dikenal, dua karya tersebut bahkan terasa telah lebur dalam napas kehidupan sebagian masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Bali.

Nilai kemanusiaan

Sementara itu, Prof Dr I Gusti Ngurah Bagus selaku ketua pelaksana seminar mengungkapkan, pemahaman yang mendalam terhadap kisah epik Ramayana dan Mahabharata diyakini dapat meningkatkan kesadaran bangsa Indonesia terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dengan begitu, perasaan iri hati dan dengki serta tindak kekerasan yang bisa menimbulkan ketegangan—baik di tingkat lokal maupun nasional dan internasional—dapat dihindari.

Melalui pendalaman maupun penelitian mengenai Ramayana dan Mahabharata, demikian I Gusti Ngurah Bagus, dapat diungkapkan nilai-nilai luhur dari kedua epik tersebut. Nilai-nilai yang dikandungnya itu diyakini dapat memperkokoh kesadaran umat manusia akan hati nurani demi tegaknya harkat dan martabat manusia.

"Pemahaman yang mendalam terhadap Ramayana dan Mahabharata akan dapat meningkatkan kesadaran bangsa Indonesia tentang kepekaan hati nurani berkaitan dengan pengukuhan identitas bangsa Indone-

sia yang cinta pada keindahan dan perdamaian," ungkap Ngurah Bagus yang sehari-hari adalah guru besar di Universitas Udayana.

Menurut Ngurah Bagus, pengaruh dari kedua karya epik yang dibuat 7.000 tahun lalu itu sangat luas. Hal itu tampak pada karya sastra, agama, ekonomi, pariwisata, seni pertunjukan dan dunia politik kontemporer Indonesia. Dalam kaitan seminar ini, ia berpendapat bahwa kegiatan tersebut sangat besar manfaatnya dalam menggalang kerja sama dan solidaritas para ilmuwan, khususnya ilmu sosial dan humaniora. Kegiatan ini juga diharapkan bisa memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu dan wawasan pemikiran.

Kegiatan yang akan berlangsung hingga Jumat ini menampikan sekitar 50 pemakalah dari berbagai negara. Seminar ini merupakan kelanjutan dari seminar serupa di Kuala Lumpur (Malaysia) tahun lalu. Semula, seminar kedua di Bali ini baru akan dilaksanakan tahun 2000, mengingat pelaksanaan acara ini diagendakan setiap dua tahun sekali. Namun, dengan pertimbangan bahwa tahun ini adalah tahun terakhir menjelang masuk ke milenium ketiga, akhirnya diputuskan pelaksanaannya dipercepat.

(gun/sig)

Kompas, 15 September 2000

Gelar Wacana Kebudayaan dan
Pariwisata Hasilkan Pokok Pikiran

Budayawan dan Industri Samakan Persepsi

*Dalam kaitannya
dengan
pariwisata,
kebudayaan
menjadi
landasan
sekaligus atap
yang
memayunginya.
Sedangkan
pariwisata
sebagai alat
implemetasi dari
konsepsi
kebudayaan.*

**Kebudayaan dan
pariwisata dapat
hidup berdampingan
secara damai di
bawah satu atap
departemen.
Kebudayaan sebagai
landasan dan payung,
pariwisata menjadi
kendaraan
pengantarnya.**

IBARAT pembentukan bahtera rumah tangga, penggabungan kebudayaan dan pariwisata di bawah satu atap departemen bisa dianalogikan dengan kawin "paksa" karena perjodohan orang tua. Mereka tampak masih canggung mendayung bahtera bersama menuju suatu pulau harapan yang posisi dan arahnya masih perlu disepakati bersama. Apa mau dikata, perjodohan itu merupakan "takdir" yang harus mereka jalani.

Untuk menyamakan persepsi antara unsur-unsur terkait di bidang kebudayaan dan pariwisata, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan Gelar Wacana Kebudayaan dan Pariwisata, di Jakarta 21-22 September.

Gagasan penyelenggaraan kegiatan tersebut muncul seiring dengan tampilnya mantan Dirjen Pariwisata I Gde Ardika sebagai menteri yang membawahi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Agustus lalu. Dari awal, Ardika tampaknya sudah mencium adanya kekhawatiran dari sementara kalangan seniman dan budayawan.

Monolog Butet Kertaradjasa, misalnya, khawatir dunia seniman akhirnya menjadi industri pariwisata dengan terbentuknya Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Menurut dia, kebudayaan sebaiknya diurus sendiri oleh masyarakat dan tumbuh bersama masyarakat. Kalau toh ada departemen, Butet berharap fungsinya hanya sebatas fasilitator.

Kekhawatiran juga menghantui seniman dan budayawan Sujiwo Tejo. Meski setuju kebudayaan dihapus dari Depdiknas, dia tidak sependapat jika kebudayaan disatukan dengan pariwisata karena justru akan menyempitkan arti kebudayaan. Dia menilai kebudayaan seharusnya menjadi payung segala bidang dan tidak hanya menjadi milik satu departemen.

nya. ● Nurcholis MA Bastari/MI-4

perspektif. Wacana Kebudayaan dan Partiwisata berhasil menggariskan pokok-pokok pikiran tentang visi, misi, dan strategi bagi Depbudpar. Dalam pokok-pokok pikiran tentang visi yang terdapat dalam Depbudpar, antara lain digagas kan sektor kebudayaan dan partiwisata sebagai kesatuan sistem yang secara sinergi mampu menggerakkan sektor lain yang terkait dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Digariskan pula bahwa pengembangan kebudayaan dan partiwisata merupakan tugas pemerintahan dan komponen masyarakat lainnya.

Dalam pokok-pokok pikiran tentang misi yang terdapat lima butir, antara lain disebutkan perlunya memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat dan kebudayaan lokal dalam pembangunan kebudayaan dan partiwisata. Sedangkan pokok-pokok pikiran tentang strategi yang terdapat dalam pembangunan kebudayaan dan partiwisata, antara lain disebutkan perlunya menggariskan keharusan untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan dan partiwisata pada kemajemukan budaya lokal, nasional, dan internasional yang ada.

Pokok-pokok pikiran itu akan menjadi titik landasan dalam pembentukan Rencana Strategis Departemen sebagai jawaban dari Propenas dan GBHN. "tutur Ardiaka. Di harapkan, akhir Oktober, Rencana Strategis itu sudah rampung. Saya gambira Celar Wacana telah meletakkan modal dasar utama, berupa kesamaan persepsi dan semangat kebersamaan dari semua pihak untuk ikut memiliki dan menggerakkan kebudayaan dan partiwisata nasional," ujar

Persamaan persepsi. Sebagai langkah awal, Celar Wacana Kebudayaan dan Partiwisata telah berhasil menggariskan "hubungan" dengan masyarakat sebagai kesatuan sistem yang secara sinergi mampu menggerakkan sektor lain yang terkait dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Digariskan pula bahwa pengembangan kebudayaan dan partiwisata merupakan tugas pemerintahan dan komponen masyarakat lainnya.

kini sebagai ujung tombaknya, tak kurang sebagai sanatorium, untuk mengembalikan manusia-manusia Indonesia yang terkontaminasi dan salah format oleh krisis menjadi waras kembali dan layak SDM dari batunya," tegasnya. Sementara itu, Ketua Asosiasi Kongres dan Konvensi Indonesia (INCCA) Iqbal Alan Abdullah berpendapat partiwisata adalah industri sehingga harus komersial. Sedangkan kebudayaan ada yang bisa dikomersialkan, ada pula yang tidak bisa dikomersialkan. "Partiwisata itu mencari objek/ daya tarik, baik tempat atau budaya. Itu yang dikemas oleh industri partiwisata. Soal mana yang bisa dijual dan mana yang tidak, tergantung masyarakatnya sendiri," ujarnya.

Menyempatkan diri hanya sekedar alat tung gangan partiwisata, itu merupakan sikap yang berlebih-lebihan. "Kami justru ingin mengembangkan kebudayaan dalam arti yang seluas-luasnya. Esensinya, kebudayaan adalah hasil cipta karya manusia, baik berupa ide, gagasan, maupun nilai-nilai yang mempengaruhi sikap, perilaku, dan alat atau benda yang diciptakan," jelas Ardiaka. Dalam pengertian seperti itu, Ardiaka berpendapat kebudayaan mencakup peran sangat penting dalam memajukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kaitannya dengan partiwisata, kebudayaan menjadi landasan sekaligus atap yang menyatukannya sedangk an partiwisata sebagai alat implementasi dari konsepsi kebudayaan. Budayawan Putu Wijaya melihat, "perkawinan" kebudayaan dan partiwisata dalam satu departemen justru menjadi peluang untuk melakukan reposisi. Ada kesempatan untuk mencंद्रukkan kebudayaan dan partiwisata pada portsinnya sehingga terjadi pengertian dan praktek yang lebih baik. Konsep partiwisata budaya, misalnya, secara gamblang menerangkan bagaimana potensi komersial dari budaya dalam pengembangan partiwisata.

"Tetapi dalam praktiknya, posisi konsep itu diam-diam terbalik. Partiwisata menjadi sesat karena bukannya memamerkan persona budaya, tetapi sudah berusaha menjual budaya dengan cara-cara yang dikehendaki oleh wisatawan. Kesalahan aplikasi yang bukannya tak disengaja itu harus didaur ulang supaya penjualan persona budaya tidak menjadi pelajaran budaya," kata Putu Wijaya.

Putu Wijaya malah melihat peluang Depbudpar menjadi di laboratorium aktualisasi persoalan-persoalan budaya agar menjadi relevan dan tidak ketinggalan zaman. "Kementrian Kebudayaan dengan putra mahkota partiwisata

